

**REVITALISASI KAWASAN BERSEJARAH PADA DAERAH TEPI AIR
DI KECAMATAN MEMPURA KABUPATEN SIAK**

TUGAS AKHIR

*Diajukan untuk memenuhi Syarat Guna Mendapatkan
Gelar Sarjana Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota
Fakultas Teknik Universitas Islam Riau*



OLEH :

DOLI CHANDRA HUTABARAT
133410422

PROGRAM STUDI TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2019

**REVITALISASI KAWASAN BERSEJARAH PADA DAERAH TEPI AIR
DI KECAMATAN MEMPURA KABUPATEN SIAK**

Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau



Nama : Doli Chandra
Hutabarat

NPM : 133410422

PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

TAHUN 2019

LEMBAR PENGESAHAN

**REVITALISASI KAWASAN BERSEJARAH PADA DAERAH TEPI AIR
DI KECAMATAN MEMPURA KABUPATEN SIAK**

TUGAS AKHIR

Disusun Oleh

DOLI CHANDRA HUTABARAT

NPM 133410422

Disetujui Oleh:

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Faizan Dalilla. ST.,M.Si

Mira Hafizah Tanjung. ST.,M.Sc

Disahkan Oleh:

DEKAN FAKULTAS TEKNIK

KETUA PROGRAM STUDI

Ir. H. Abd. Kudus Zaini, MT

Puji Astuti, ST., MT

PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR

Saya mengakui bahwa tugas akhir ini merupakan hasil karya saya sendiri kecuali ringkasan dan kutipan (baik secara langsung maupun tidak langsung), saya ambil dari beberapa sumber dan disebutkan sumbernya didalam daftar pustaka. Secara ilmiah saya bertanggung jawab atas kebenaran data dan fakta tugas akhir ini.

Pekanbaru, 01 Desember 2019

Doli Chandra Hutabarat
NPM : 133410422

REVITALISASI KAWASAN BERSEJARAH PADA DAERAH TEPI AIR DI KECAMATAN MEMPURA KABUPATEN SIAK

Oleh:

Doli Chandra Hutabarat, Faizan Dalilla, Mira Hafizhah Tanjung
email:dollychandra18.dc@gmail.com

ABSTRAK

Kecamatan Mempura merupakan daerah lanskap budaya yang menampilkan bangunan-bangunan pemerintahan Kolonial Belanda, memiliki banyak peninggalan sejarah dan banyak juga bangunan bersejarah yang masih menunjukkan karakteristik aslinya. Kawasan Mempura saat ini cenderung mengalami kerusakan dan masih sangat kurangnya perhatian dari Pemerintah. Hal itu menyebabkan beberapa bangunan yang bentuk fisiknya mengalami kerusakan, dan warna cat pada dinding yang sudah memudar. Sehingga dibutuhkan adanya pelaksanaan revitalisasi terhadap kawasan bersejarah, diantaranya diarahkan sebagai kawasan wisata budaya.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengidentifikasi bagaimana karakteristik kawasan bersejarah di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak dan kemudian apa sajakah faktor pendukung dan penghambat dalam merevitalisasi kawasan bersejarah di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode analisis Deskriptif Kualitatif. Dan tahap selanjutnya dilakukan wawancara terhadap dinas terkait dan masyarakat setempat serta melakukan pengamatan di wilayah studi.

Hasil dari penelitian ini adalah Kawasan Mempura memiliki nilai sejarah dengan keberadaan bangunan-bangunan peninggalan Kolonial Belanda yang sudah layak untuk di revitalisasi dan dikembangkan, seperti: Bangunan Tangsi Belanda, Rumah Controlluer Siak, dan Rumah Landraad di kawasan tersebut. Dan juga mengidentifikasi karakteristik kawasan bersejarah melalui karakteristik fisik, karakteristik non fisik, karakteristik sosial, karakteristik ekonomi dan karakteristik lingkungan, kemudian mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam merevitalisasi yang diketahui dari segi 1) bangunan bersejarah, 2) kawasan, 3) kebijakan pemerintah, 4) peranan masyarakat dan 5) pendanaan/anggaran. Oleh karena itu program revitalisasi pada Kawasan Mempura ini sangat cocok untuk dilakukan dan kemudian dikembangkan menjadi kawasan wisata budaya yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Kabupaten Siak, Kawasan Mempura, Revitalisasi, Kawasan Bersejarah

REVITALIZATION OF HISTORIC AREAS IN WATER EDGE AREA IN MEMPURA DISTRICT, SIAK DISTRICTS

By:

Doli Chandra Hutabarat, Faizan Dalilla, Mira Hafizhah Tanjung
email:dollychandra18.dc@gmail.com

ABSTRACT

Mempura District is a cultural landscape area that features Dutch colonial government buildings, has many historical heritages and many historic buildings that still show their original characteristics. The Mempura area currently tends to suffer damage and there is still very little attention from the Government. That caused some buildings whose physical form was damaged, and the color of the paint on the walls that had faded. So it takes the implementation of the revitalization of historic areas, including directed as a cultural tourism area.

The purpose of this study was to identify how the characteristics of the historic area in the District of Mempura in Siak Regency and then what are the supporting and inhibiting factors in revitalizing the historic area in the District of Mempura in Siak Regency. The method used in this research is descriptive qualitative analysis method. And the next stage was an interview with the relevant department and the local community and conducted observations in the study area.

The results of this study are that the Mempura Region has historical value with the existence of Dutch colonial heritage buildings that are already eligible for revitalization and development, such as: the Dutch Tangsi Building, the Siak Controlluer House, and the Landraad House in the region. And also identify the characteristics of historic areas through physical characteristics, non-physical characteristics, social characteristics, economic characteristics and environmental characteristics, then find out supporting and inhibiting factors in revitalizing known in terms of 1) historic buildings, 2) areas, 3) government policies, 4) the role of the community and 5) funding / budget. Therefore, the revitalization program at Mempura Zone is very suitable to be carried out and then developed into a sustainable cultural tourism area.

Keywords: Siak Regency, Mempura Region, Revitalization, Historic Area

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-NYA. Maka saya dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “Revitalisasi Kawasan Bersejarah Pada Daerah Tepi Air di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak”

Adapun Tugas Akhir ini dibuat untuk diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Strata Satu (S-1) pada Program Studi Perencanaan Wilayah Dan Kota Fakultas Teknik Universitas Islam Riau. Dalam kesempatan ini penulis juga ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas segala bantuan dalam pembuatan tugas akhir, diantaranya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH, M. C. I, selaku rektor Universitas Islam Riau.
2. Bapak Ir. H. Abdul Kudus Zailani, MT selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Islam Riau.
3. Ibu Puji Astuti, ST, MT selaku Ketua Program Studi Perencanaan Wilayah Dan Kota, serta selaku penguji sidang tugas akhir yang telah bersedia memberi waktu dan sarannya kepada penulis.
4. Bapak Muhammad Sofwan, ST, MT selaku Sekretaris Program Studi Perencanaan Wilayah Dan Kota Fakultas Teknik Perencanaan Wilayah Dan Kota.
5. Bapak Faizan Dalila, ST, M.Si selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan dan waktu serta saran pikirannya dalam penulisan tugas akhir ini.

6. Ibu Mira Hafizhah Tanjung, ST, M.Sc selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan waktu serta saran pikirannya dalam penulisan tugas akhir ini.
7. Ibu Rona Muliana ST, MT selaku Tim Dosen Penguji Sidang tugas akhir yang telah bersedia memberikan waktu dan sarannya kepada penulis.
8. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staf Program Studi Perencanaan Wilayah Dan Kota Universitas Islam Riau yang telah banyak membantu dan memberikan ilmu selama penulis menuntut ilmu hingga selesai.
9. Dipersembahkan khusus kepada orang tua penulis, Ayah dan Ibu tercinta yang telah banyak memberikan bantuan baik moril maupun materil serta do'anya untuk penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
10. Dipersembahkan juga terkhusus kepada kekasih penulis, Susy tercinta yang telah banyak memberikan bantuan baik moril maupun semangat serta do'anya untuk penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Saya menyadari bahwa dalam penulisan tugas akhir ini masih banyak kekurangan, oleh sebab itu saya selaku penulis sangat mengharpakan kritik dan saran ysng membangun agar agar dapat menyempurnakan penelitian dalam tugas akhir ini dan juga dengan selesainya tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi kita semua.Amin.

Pekanbaru, 20 Desember 2019

Doli Chandra Hutabarat
133410422



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR ISI

	Hal.
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan dan Sasaran Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Ruang Lingkup Penelitian.....	9
1.5.1 Ruang Lingkup Wilayah	9
1.5.2 Ruang Lingkup Materi	9
1.6 Kerangka Pemikiran Studi	12
1.7 Sistematika Penulisan.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Pengertian Revitalisasi Kawasan Bersejarah	16
2.1.1 Pengertian Revitalisasi	16
2.1.2 Pengertian Kawasan Bersejarah	20
2.1.3 Kriteria Kawasan Bersejarah.....	22
2.1.4 Tipologi Kawasan Bersejarah	22
2.1.5 Pengertian Cagar Budaya	23
2.2 Karakteristik Kawasan Bersejarah	24
2.2.1 Karakteristik Fisik	25
2.2.2 Karakteristik Non Fisik	25
2.2.2.1 Karakteristik Ekonomi	26
2.2.2.2 Karakteristik Sosial	26
2.2.3 Karakteristik Lingkungan.....	27

2.3 Kriteria Revitalisasi dan Konservasi Kawasan Bersejarah	27
2.3.1 Kriteria Revitalisasi.....	27
2.3.2 Kriteria Konservasi.....	29
2.4 Lingkup, Kriterion dan Kategori Objek Pelestarian.....	31
2.4.1 Lingkup Objek Pelestarian	31
2.4.2 Kriteria Objek Pelestarian	31
2.4.3 Kategori Objek Pelestarian.....	32
2.5 Revitalisasi Merupakan Sebuah Upaya Pelestarian	34
2.6 Pengembangan Kawasan Bersejarah.....	35
2.6.1 Pelestarian Kawasan Bersejarah.....	35
2.6.2 Pemanfaatan Bangunan Bersejarah Sebagai Obyek Pariwisata	37
2.7 Manfaat Pelestarian Kawasan Bersejarah	39
2.8 Hubungan Revitalisasi dengan Pelestarian	41
2.9 Kebijakan-kebijakan Pemerintah Pelestarian Kawasan Bersejarah.....	42
2.10 Faktor Pendukung dan Penghambat Revitalisasi Kawasan Bersejarah	43
2.10.1 Bangunan Bersejarah	43
2.10.2 Kawasan Bersejarah.....	44
2.10.3 Peranan Masyarakat	45
2.10.4 Kebijakan Pemerintah	46
2.10.5 Pendanaan/Anggaran.....	48
2.11 Faktor Penyebab Rendahnya Kualitas Komponen Revitalisasi	49
2.12 Konsep Pariwisata Budaya.....	50
2.12.1 Defenisi Kebudayaan	50
2.12.2 Karakteristik Objek Pariwisata Budaya	51
2.12.3 Prinsip Pengembangan Pariwisata Budaya	51
2.12.4 Tujuan Pengembangan Objek Wisata Budaya	52
2.13 Konsep, Jenis, Kriteria Pembangunan Tepi Air (<i>Waterfront</i>).....	53
2.13.1 Konsep Pembangunan Tepi Air (<i>Waterfront</i>)	53
2.13.2 Jenis-jenis Tepi Air (<i>Waterfront</i>)	54
2.13.3 Kriteria Tepi Air (<i>Waterfront</i>)	55
2.14 Studi Kasus Proyek Sejenis.....	55
2.15 Sintesa Teori.....	60

2.16 Keaslian Penelitian.....	63
-------------------------------	----

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metodologi Pendekatan.....	71
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	72
3.3 Metode Penelitian.....	72
3.3.1 Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif	72
3.3.2 Metode Penelitian Deskriptif Kuantitatif	73
3.4 Teknik <i>Purposive Sampling</i>	73
3.5 Jenis Data	76
3.6 Sumber Data.....	77
3.7 Metode Pengumpulan Data.....	78
3.8 Teknik Analisis Data.....	79
3.8.1 Analisis Identifikasi Karakteristik Kawasan Bersejarah.....	79
3.8.2 Analisis Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Revitalisasi.....	80
3.9 Desain Survei	81

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Siak	84
4.1.1 Sejarah Kabupaten Siak	84
4.1.2 Letak Geografis dan Batasan Wilayah	88
4.1.3 Kondisi Fisik Wilayah.....	92
4.1.4 Nama-Nama Tempat Wisata di Kabupaten Siak	96
4.2 Gambaran Umum Wilayah Kecamatan Mempura	104
4.2.1 Kecamatan Mempura	104
4.2.2 Sejarah Kawasan Mempura.....	105
4.2.3 Tingkat Kesuburan Lahan di Kecamatan Mempura	107
4.2.4 Sarana Pendidikan di Kecamatan Mempura	108
4.2.5 Sarana Kesehatan di Kecamatan Mempura.....	109
4.2.6 Sarana Peribadatan di Kecamatan Mempura	109
4.3 Gambaran Umum Kebijakan Kawasan Bersejarah.....	109
4.3.1 Visi dan Misi Pengembangan Kawasan Benteng Mempura.....	110

4.4 Gambaran Umum Desa Benteng Hulu.....	111
4.5 Gambaran Umum Desa Kampung Tengah	114
4.6 Gambaran Umum Desa Benteng Hilir	117
4.7 Kebijakan Terkait Revitalisasi di Kabupaten Siak.....	120
4.7.1 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Siak Tahun 2015-2025.....	120
4.7.2 Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Siak tahun 2011-2031.....	121
4.7.3 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Siak tahun 2016-2021 Terkait Kawasan Bersejarah.....	124
4.8 Implementasi Peraturan Pariwisata Terhadap Perencanaan Wilayah	125
4.8.1 Kebijakan Ruang (RTRW) Kabupaten Siak	125
4.8.2 Rencana Penyusunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Siak 2011-2016 Tentang Pariwisata	126
 BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	
5.1 Karakteristik Kawasan Bersejarah	127
5.1.1 Karakteristik Fisik Kawasan	128
5.1.2 Karakteristik Non Fisik Kawasan	144
5.1.2.1 Karakteristik Sosial	145
5.1.2.2 Karakteristik Ekonomi	146
5.1.3 Karakteristik Lingkungan.....	147
5.2 Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Revitalisasi Kawasan Bersejarah.....	149
5.2.1 Bangunan Bersejarah	150
5.2.2 Kawasan	152
5.2.3 Kebijakan Pemerintah	153
5.2.4 Peranan Masyarakat	157
5.2.5 Pendanaan/Anggaran.....	158

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan	163
6.2 Saran.....	164

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

	Hal.
Tabel 2.1 Sintesa Teori	62
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu	65
Tabel 3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian	72
Tabel 3.2 Informan Penelitian.....	76
Tabel 3.3 Desain Survei	82
Tabel 4.1 Luas dan Persentase Luas Wilayah Kabupaten Siak Bersdasarkan Kecamatan Tahun 2018.....	91
Tabel 4.2 Data Curah Hujan Rata-Rata Bulanan 1880-1978.....	92
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk per Desa di Kecamatan Mempura	98
Tabel 4.4 Jumlah Kepala Keluarga di Kecamatan Mempura	98
Tabel 4.5 Kondisi Kesuburan Lahan Dirinci Menurut Desa di Kecamatan Mempura tahun 2018.....	99
Tabel 4.6 Jumlah Sarana Pendidikan di Kecamatan Mempura.....	100
Tabel 4.7 Jumlah Sarana Kesehatan di Kecamatan Mempura.....	100
Tabel 4.8 Jumlah Sarana Peribadatan di Kecamatan Mempura.....	101
Tabel 4.9 Penggunaan Lahan di Desa Benteng Hulu.....	102
Tabel 4.10 Jumlah Penduduk di Desa Benteng Hulu.....	102
Tabel 4.11 Jumlah Sarana Pendidikan di Desa Benteng Hulu.....	103
Tabel 4.12 Jumlah Sarana Kesehatan di Desa Benteng Hulu	103
Tabel 4.13 Jumlah Sarana Ibadah Desa Benteng Hulu	104
Tabel 4.14 Penggunaan Lahan di Desa Kampung Tengah	105
Tabel 4.15 Jumlah Penduduk di Desa Kampung Tengah	105
Tabel 4.16 Jumlah Sarana Pendidikan di Desa Kampung Tengah	106
Tabel 4.17 Jumlah Sarana Kesehatan di Desa Kampung Tengah.....	106
Tabel 4.18 Jumlah Sarana Peribadatan di Desa Kampung Tengah	107
Tabel 4.19 Penggunaan Lahan di Desa Benteng Hilir	108
Tabel 4.20 Jumlah Penduduk di Desa Benteng Hilir	108
Tabel 4.21 Jumlah Sarana Pendidikan di Desa Benteng Hilir	109
Tabel 4.22 Jumlah Sarana Kesehatan di Desa Benteng Hilir.....	109
Tabel 4.23 Jumlah Sarana Peribadatan di Desa Benteng Hilir.....	110

Tabel 4.24 Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Siak 2011-2031 Terkait Kawasan Bersejarah	111
Tabel 4.25 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Siak tahun 2016-2021 Terkait Kawasan Bangunan Bersejarah	114
Tabel 5.1 Penggunaan Lahan pada Kawasan Kecamatan Mempura	121
Tabel 5.2 Karakteristik Bangunan Bersejarah	130
Tabel 5.3 Penduduk Menurut Mata Pencaharian Lima Tahun Terakhir di Kawasan Mempura	133
Tabel 5.4 Jumlah Penghasilan per Bulan Masyarakat di Kawasan Mempura.....	134
Tabel 5.5 Jumlah Penduduk per Desa di Kecamatan Mempura	136
Tabel 5.6 Hasil Wawancara Terkait Inventarisasi	142
Tabel 5.7 Rangkuman Faktor-Faktor dan Kondisi Lapangan	145
Tabel 5.8 Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Revitalisasi.....	148

DAFTAR GAMBAR

	Hal.
Gambar 1.1 Peta Administrasi Kecamatan Mempura.....	11
Gambar 1.3 Kerangka Berfikir.....	13
Gambar 2.1 Skema Hubungan Peremajaan, Rehabilitasi, Redevelopment dengan Revitalisasi.....	19
Gambar 4.1 Peta Administrasi Kabupaten Siak.....	119
Gambar 5.1 Penggunaan Lahan Permukiman.....	119
Gambar 5.2 Penggunaan Lahan Perkantoran.....	120
Gambar 5.3 Penggunaan Lahan Perdagangan dan Jasa.....	120
Gambar 5.4 Penggunaan Lahan Pendidikan dan Sosial.....	121
Gambar 5.5 Bangunan Benteng Tangsi Belanda	122
Gambar 5.6 Peta Penggunaan Lahan	124
Gambar 5.7 Benteng Tangsi Belanda.....	124
Gambar 5.8 Rumah Controlluer Siak.....	126
Gambar 5.9 Rumah Landraad Siak.....	127
Gambar 5.10 Rumah Datuk Pesisir.....	129
Gambar 5.11 Peta Sebaran Bangunan Bersejarah.....	124

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Revitalisasi adalah kegiatan pengembangan yang ditujukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting Cagar Budaya dengan penyesuaian fungsi ruang baru yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dan nilai budaya masyarakat. Menurut Permen PU No. 18 tahun 2010 tentang Pedoman Revitalisasi Kawasan, definisi revitalisasi adalah upaya untuk meningkatkan nilai lahan/kawasan melalui pembangunan kembali dalam suatu kawasan yang dapat meningkatkan fungsi kawasan sebelumnya. Tujuan dari revitalisasi ini adalah untuk meningkatkan vitalitas kawasan terbangun melalui intervensi perkotaan yang mampu menciptakan pertumbuhan dan stabilitas ekonomi lokal, terintegrasi dengan sistem kota, layak huni, berkeadilan sosial dan berwawasan budaya serta lingkungan. (Widiastuti, 2010) dalam Krisnawati (2014).

Berdasarkan UU No. 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang: Kawasan adalah suatu wilayah yang mempunyai fungsi dan atau aspek pengamatan fungsional tertentu. Dengan demikian, batasan suatu kawasan tidak ditentukan oleh batasan administratif (desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, dan seterusnya) tetapi lebih ditentukan dengan memperhatikan *economic of scale* dan *economic of scope*.

Kawasan bersejarah merupakan sumber daya budaya yang terdapat hampir seluruh wilayah Indonesia. Pemanfaatan kawasan bersejarah sebagai daya tarik wisata harus sesuai dengan peraturan yang ditetapkan (Chulsum dan Novia, 2006) dalam Krisnawati (2014), bahwa arsitektur dan kota di Indonesia saat ini

banyak yang menderita sesak nafas. Karena ketiadaan biaya dan bangunan-bangunan kuno itu dibiarkan berdiri sendiri tanpa pernah dipelihara, Sementara bangunan-bangunan kuno ini memiliki nilai-nilai sejarah. Bangunan-bangunan kuno yang tidak terawat sehingga menjadi kumuh dan cenderung bangunan-bangunan tersebut akan hancur sendiri, sehingga menimbulkan erosi identitas budaya. Oleh karena itu, revitalisasi kawasan bersejarah sangat dibutuhkan agar tetap bisa menjaga cagar budaya yang sudah diwariskan oleh para pendahulu kita (Sidharta dan Budhihardjo, 1989) dalam Krisnawati (2014). Sebagaimana dijelaskan pada QS an-nisa/4:33. (Kementrian Agama RI, 2012:65)

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ ۖ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ
أَيْمَانُكُمْ فَآتَوْهُمْ نَصِيبَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

Terjemahnya :

Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.

Bagi setiap laki-laki dan perempuan, kami jadikan pewaris yang berhak menerima harta peninggalan dan menjadi penerus mereka. Mereka adalah kedua orangtua, kerabat, dan orang-orang yang telah di janjikan si mayit akan diberi warisan dari selain jalur kerabat, sebagai imbalan atas pertolongan yang harus mereka berikan bila diminta. Berilah hak mereka dan jangan menguranginya. Sesungguhnya Allah mengawasi segala sesuatu dan selalu hadir menyaksikan segala yang kalian perbuat. (Prof. Dr. H. M. Quraish Shihab, MA.)

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Peranan, tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah

sangat besar terhadap revitalisasi kawasan bersejarah. Mulai dari proses pendataan (inventarisasi), pendaftaran (registrasi), membuat peringkat kawasan bersejarah, membentuk tim ahli kawasan bersejarah, menetapkan status kawasan bersejarah hingga menyebarluaskan informasi tentang kawasan bersejarah dengan tetap memperhatikan keamanan dan kerahasiaan data.

Revitalisasi pada prinsipnya tidak sekedar menyangkut masalah konservasi bangunan dan ruang kawasan bersejarah saja, tetapi lebih kepada upaya mengembalikan atau menghidupkan kembali kawasan yang tidak berfungsi atau menurun fungsinya agar berfungsi kembali, atau menata dan mengembangkan lebih lanjut kawasan yang berkembang sangat pesat namun kondisinya cenderung tidak terkendali. Gejala penurunan kualitas fisik dapat dengan mudah diamati pada kawasan bersejarah atau tua, karena sebagai bagian dari perjalanan sejarah (pusat kegiatan perekonomian dan sosial budaya), kawasan tersebut umumnya dalam umumnya dalam tekanan pembangunan (serageldin *et al*, 2000). Namun bukan berarti kegiatan revitalisasi hanya terbatas pada kawasan bersejarah/tua. Hilangnya vitalitas awal dalam suatu kawasan historis budaya umumnya ditandai dengan kurang terkendalinya perkembangan dan pembangunan kawasan, sehingga mengakibatkan terjadinya kehancuran kawasan, baik secara *Self destruction* maupun *Creative destruction* (Danisworo, 2006).

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki latar belakang sejarah yang sangat menarik. Indonesia pernah dijajah oleh 3 negara, yaitu: Inggris, Belanda, dan Jepang. Dengan demikian dapat terbayangkan oleh kita banyaknya keanekaragaman benda sejarah peninggalan zaman penjajahan. Walaupun beberapa diantaranya telah ditemukan, hingga saat ini masih banyak

benda serta sisa-sisa bangunan peninggalan bersejarah di wilayah Indonesia yang belum ditemukan.

Salah satu peninggalan bersejarah yang perlu kita lindungi adalah berupa bangunan-bangunan yang usianya sudah lebih dari 50 tahun. Pada saat ini bangunan tersebut lebih kita kenal dengan sebutan bangunan cagar budaya atau dapat juga dikatakan sebagai bangunan pusaka atau heritage. Bangunan seperti ini perlu kita lestarikan keberadaannya agar kita tidak kehilangan bukti fisik serta rekaman peristiwa dimasa lalu sehingga dapat kita jadikan sebagai pedoman di masa depan. Namun pada kenyataannya, di Indonesia saat ini masih banyak bangunan kuno dan bersejarah yang mengalami kerusakan dan tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah.

Kabupaten Siak merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Riau, memiliki luas daerah 8.556,09 km². Kabupaten siak juga merupakan wilayah yang dialiri sungai besar yaitu sungai siak, sehingga Kabupaten Siak memiliki banyak wilayah yang berada pada kawasan tepi air. Kabupaten Siak memiliki karakteristik tersendiri dengan memiliki bagian darat dan air di sungai Siak. Kawasan tepi air ini adalah cikal bakal dari pertumbuhan Kabupaten Siak, maka bangunan-bangunan yang berada pada tepian air yang bersejarah ini harus di revitalisasi. Hal tersebut menjadi bagian penting perkembangan Kabupaten Siak kedepannya. Untuk itu, tetap diperlukan perbaikan dan peningkatan aktivitas ekonomi (*economic revitalization*) yang merujuk kepada aspek sosial budaya serta aspek lingkungan (*environmental objectives*). Hal tersebut mutlak diperlukan karena melalui pemanfaatan yang produktif, diharapkan akan terbentuklah sebuah

mekanisme perawatan dan kontrol yang langgeng terhadap keberadaan fasilitas dan infrastruktur.

Menurut Yusuf *et al*(1992) kekayaan budaya yang dimiliki Kabupaten Siak cukup banyak diantaranya peninggalan sejarah seperti Istana Asserayah Hasimiah, Balairung Sari atau Balai Kerapatan Tinggi, Masjid Raya Siak Syahbudin (Masjid Kerajaan), Tanah Lapang (Alun-Alun), Rumah Tahanan Kerajaan, Makam Sultan Syarif Kasim II dan Permaisuri, Latifah School, Madrasa Nisa (Sekolah Agama Putri), Madrasah Taufiqiyah (Sekolah Madrasah Putra), Gedung Mesiu (Gedung Obat Bedil), Asrama Polisi Kerajaan Siak, Kantor dan Pelabuhan LLSDF, Kantor Imigrasi, Pemancar TVRI, PLN, kelenteng dan gereja tua serta pasar lama. Pada Kecamatan Mempura terdapat Tangsi Belanda, Rumah Controleur, Rumah Landrat, Rumah Datuk Pesisir dan Makam Sultan Abdul Jalil Rahmad Syah. Kecamatan Koto Gasib Terdapat Makam Putri Kaca Mayang, dan di Kecamatan Bunga Raya terdapat Makam Raja Kecil Buantan.

Kecamatan Mempura terkhusus di daerah Desa Benteng Hulu, Desa Kampung Tengah, dan Desa Benteng Hilir merupakan daerah yang memiliki banyak peninggalan sejarah dan banyak bangunan-bangunan bersejarah yang masih ada sehingga berpotensi untuk menjadi destinasi wisata budaya dibandingkan dengan kecamatan lainnya yang ada di Kabupaten Siak (Yusuf *et al*, 1992). Salah satunya adalah Benteng Tangsi yang merupakan warisan sejarah zaman penjajahan belanda yang masih memiliki nilai arsitektural bagunan yang bergaya kolonial. Dalam Tangsi ini terdapat berbagai macam bangunan yang antara lain berfungsi sebagai penjara, asrama, kantor, gudang senjata, dan logistik. Riwayat pembangunan Tangsi ini tidak diketahui dengan pasti, tetapi

pembangunannya jelas sezaman dengan masa masuknya pengaruh (hegmoni) Belanda di Kesultanan Siak, yaitu abad ke-19.

Berdasarkan latar belakang diatas, perlu dilakukan suatu penelitian di Desa Sungai Mempura, Desa Kampung Tengah, dan Desa Benteng Hulu, tepatnya pada 3 (tiga) Bangunan yang terdapat di desa-desa tersebut yaitu Bangunan Benteng Tangsi, Landrat dan Controleur sebagai upaya untuk melakukan revitalisasi terhadap bangunan bersejarah pada kawasan tersebut dengan judul ***“Revitalisasi Kawasan Bersejarah pada Daerah Tepi Air di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak”***.

1.2 Rumusan Masalah

Pada saat sekarang ini keadaan kawasan bersejarah yang ada di Desa Benteng Hulu, Desa Kampung Tengah, dan Desa Benteng Hilir masih banyak yang belum adanya perhatian Pemerintah. Beberapa bangunan-bangunan diantaranya yang bentuk fisiknya mengalami kerusakan. Tidak hanya warna catnya yang mulai memudar, kusen-kusen jendela serta pintu yang mayoritas terbuat dari kayu juga sudah banyak yang lapuk.

Bila hal tersebut dibiarkan berlangsung begitu saja, maka tidak mungkin akan menjadi sebuah kawasan yang tidak memiliki bangunan bersejarah, sehingga potensi-potensi bangunan bersejarah tersebut akan hilang. Salah satu cara untuk merevitalisasi kawasan bersejarah adalah dengan memanfaatkan kembali bangunan tersebut. Oleh karena itu, banyak hal yang perlu kita perhatikan agar nilai-nilai sejarah pada kawasan bersejarah tersebut dapat terjaga.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana karakteristik kawasan bersejarah di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak?
2. Apa sajakah faktor pendukung dan penghambat dalam merevitalisasi kawasan bersejarah di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak?

1.3 Tujuan dan Sasaran Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam merevitalisasi kawasan bangunan bersejarah di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak. Arahannya ini dapat digunakan untuk meningkatkan nilai-nilai bangunan bersejarah yang ada pada kawasan tersebut dan sebagai rekomendasi penanganan terhadap kegiatan revitalisasi di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak sebagai kegiatan pembangunan dengan sasaran penelitian sebagai berikut:

1. Teridentifikasinya karakteristik kawasan bersejarah di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak.
2. Mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat dalam merevitalisasi kawasan bersejarah di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat mendukung upaya pelaksanaan revitalisasi kawasan bersejarah melalui pengelolaan data, analisis dan upaya pelaksanaan

revitalisasi yang disajikan dalam bentuk informasi spasial sehingga dapat lebih menarik dan menjadi suatu aset penting di Kabupaten Siak. Berikut manfaat lain dari penelitian ini:

1. Pihak Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah agar menjadi motivasi bagi pemerintah selaku pengelola untuk melakukan peningkatan pengelolaan bangunan dan kawasan bersejarah, sehingga dapat meningkatkan potensi bangunan bersejarah yang ada sebagai wisata budaya di Kabupaten Siak.

2. Pihak Akademis

Kegiatan dan hasil ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan bagi penulis serta dapat menjadi referensi yang dapat diajukan sebagai bahan percontohan bagi penelitian yang sama selanjutnya.

3. Pihak Masyarakat

Penelitian ini membuka pikiran masyarakat bahwa bangunan bersejarah itu sangat penting untuk dijaga dan dilestarikan. Karena ini merupakan salah satu bukti kehidupan dari nenek moyang atau orang-orang terdahulu. Sehingga membuka pikiran masyarakat untuk ikut serta menjaga dan melestarikan peninggalan-peninggalan bersejarah tersebut.

4. Peneliti

Agar apa yang telah dilakukan selama penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan dalam rangka memperdalam dan mengembangkan ilmu pengetahuan dalam upaya pelaksanaan

revitalisasi kawasan bersejarah serta memberikan pengalaman langsung dalam pelaksanaan dan penulisan penelitian serta menyusun hasil penelitian.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

1.5.1 Ruang Lingkup Wilayah

Ruang Lingkup Wilayah penelitian atau lokasi studi pada penelitian ini berada di Desa Benteng Hulu, Desa Kampung Tengah, dan Desa Benteng Hilir. Tiga desa ini merupakan desa yang ada di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak.

Adapun Jumlah Desa di Kecamatan Mempura yang terdiri dari 8 (delapan) Desa/Kelurahan dengan luasnya 437,45 km², yaitu Desa Kota Baringin, Desa Paluh, **Desa Benteng Hilir, Desa Benteng Hulu, Desa Kampung Tengah**, Kelurahan Sungai Mempura, Desa Merempan Hilir, dan Desa Teluk Merempan. Berikut inilah batas-batas Kecamatan Mempura sebagai berikut:

1. Sebelah Utara, berbatasan dengan Kecamatan Siak.
2. Sebelah Selatan, berbatasan dengan Kecamatan Dayun.
3. Sebelah Timur, berbatasan dengan Kecamatan Pusako, dan
4. Sebelah Barat, berbatasan dengan Kecamatan Koto Gasib.

1.5.2 Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup materi yang di bahas dalam penelitian ini adalah:

1. Karakteristik kawasan bersejarah di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak tepatnya di Desa Benteng Hulu, Desa Kampung Tengah dan Desa Benteng Hilir dengan menggunakan analisis deskriptif dengan metode wawancara dan

observasi lapangan. Identifikasi karakteristik kawasan bersejarah didasarkan pada usia bangunan, fungsi bangunan, status kepemilikan bangunan, bentuk/arsitektur bangunan serta titik persebaran bangunan.

2. Faktor pendukung dan faktor penghambat revitalisasi kawasan bersejarah di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak tepatnya di Desa Benteng Hulu, Desa Kampung Tengah dan Desa Benteng Hilir dari segi bangunan bersejarah, kawasan, kebijakan, peranan masyarakat, dan pendanaan dengan menggunakan metode deskriptif dengan metode wawancara dan observasi lapangan





Gambar 1.1 Peta Administrasi Kecamatan Mempura

1.6 Kerangka Pemikiran Studi

Kerangka berfikir ini bertitik tolak dari kondisi yang ada dilapangan saat ini, dimana belum maksimalnya kegiatan revitalisasi kawasan bersejarah yang ada di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak. Atas dasar kondisi tersebut, sangat diperlukan alternatif atau jalan keluar yang paling optimal dalam menangani permasalahan ini. Maka dari itu jalan keluar yang akan diberikan diantaranya dengan membuat secara diagramatis atau kerangka berfikir, yang mana didalamnya terdapat permasalahan yang akan dibahas yang akan di rangkum didalam rumusan masalah kemudian diidentifikasi dan menemukan sasaran yang akan dilakukan dengan menggunakan metode apa selanjutnya menentukan analisis apa yang digunakan agar dapat memecahkan persoalan yang akhirnya menemukan hasil dari penelitian yang dilakukan dan di rangkum dalam kesimpulan dan saran yang mana dapat dilihat dari pada gambar 1.2 berikut ini:

Latar Belakang

Revitalisasi adalah upaya untuk memvitalkan kembali suatu kawasan atau bagian kota yang dulunya pernah vital atau hidup, akan tetapi kemudian mengalami kemunduran atau degradasi. Proses revitalisasi sebuah kawasan mencakup perbaikan aspek fisik, aspek ekonomi dan aspek sosial. Kabupaten Siak merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Riau, memiliki luas daerah 8.556,09 km². Kabupaten siak juga merupakan wilayah yang dialiri sungai besar yaitu sungai siak, sehingga Kabupaten Siak memiliki banyak wilayah yang berada pada kawasan tepi air. Kabupaten Siak memiliki karakteristik tersendiri dengan memiliki bagian darat dan air di sungai Siak. Kawasan tepi air ini adalah cikal bakal dari pertumbuhan Kabupaten Siak, maka bangunan-bangunan yang berada pada tepian air yang bersejarah ini harus di revitalisasi

INPUT

Rumusan Masalah

- Masih banyak kawasan yang terdapat bangunan atau benda bersejarah yang belum mendapatkan perhatian dari pemerintah dan masyarakat sekitar.
- Jika belum ada penanganan khusus terhadap kawasan bersejarah tersebut, maka bangunan yang ada di kawasan itu akan cenderung hancur dengan sendiri nya.
- Salah satu cara untuk merevitalisasikan kawasan bersejarah adalah dengan memanfaatkan kembali bangunan tersebut dan menyuntikkan aktivitas-aktivitas baru, membuat bangunan-bangunan tersebut menjadi vital kembali.

Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam merevitalisasi kawasan bersejarah di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak.

Sasaran

Teridentifikasi Karakteristik Kawasan Bersejarah di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak.

1. Karakteristik fisik kawasan
2. Karakteristik non fisik kawasan
 - Karakteristik sosial
 - Karakteristik ekonomi
3. Karakteristik Lingkungan
 - Topografi
 - Hidrologi
 - Iklim
 - Demografi

Mengetahui Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat dalam Merevitalisasi Kawasan Bersejarah di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak.

- Bangunan bersejarah
- Kawasan
- Kebijakan pemerintah
- Peranan masyarakat
- Pendanaan/anggaran

Wawancara, Survey dan Observasi lapangan

Deskriptif Kualitatif

PROSES

Kesimpulan dan Saran

OUTPUT

Gambar 1.2
Kerangka Pemikiran Studi

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan proposal tugas akhir ini dibagi dalam 3 (tiga) bab, diantaranya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian. Sasaran penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup (ruang lingkup wilayah dan ruang lingkup materi), kerangka pemikiran studi, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan mengenai lkajian pustaa atau teori yang digunakan sebagai acuan dalam pembahasan tema yang dipilih dan diambil dari beberapa literatur dan sumber-sumber terpercaya yang mana diantaranya membahas terkait revitalisasi kawasan bersejarah, karakteristik kawasan fisik dan non fisik, karakteristik sosial dan ekonomi, faktor pendukung dan penghambat, dan penilaian kawasan.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menyajikan pendekatan, tahapan dan jenis penelitian serta teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memecahkan permasalahan dan mencapai tujuan penelitian baik dari tempat dan waktu penelitian, metode penelitian, penentuan metode deskriptif kualitatif dan informan penelitian, sumber data, teknik analisis, serta desain survei.

BAB IV GAMBARAN UMUMLOKASI PENELITIAN

Bab ini menyajikan deskripsi atau gambaran wilayah studi seperti sejarah perkembangan Kabupaten Siak, letak geografis Kabupaten Siak, sejarah Kecamatan Mempura, letak geografis Kecamatan Mempura, penggunaan lahan Kecamatan Mempura, sarana Kecamatan Mempura, Kemudian sejarah, letak geografis, penggunaan lahan, dan sarana Desa Benteng Hulu, Desa Kampung Tengah, Dan Desa Benteng Hilir.

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil analisis dan pembahasan studi seperti pembahasan karakteristik kawasan bersejarah, faktor pendukung dan faktor penghambat revitalisasi untuk menentukan kegiatan pelaksanaan revitalisasi pada kawasan bersejarah tersebut

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan tentang kesimpulan penelitian dan disertai dengan saran yang diperlukan dari hasil penelitian terutama untuk menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan dari penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka akan membahas mengenai rujukan bacaan, baik berasal dari buku, jurnal, maupun penelitian terdahulu. Hasil kajian pustaka akan disintesa sebagai dasar pembahasan masalah penelitian.

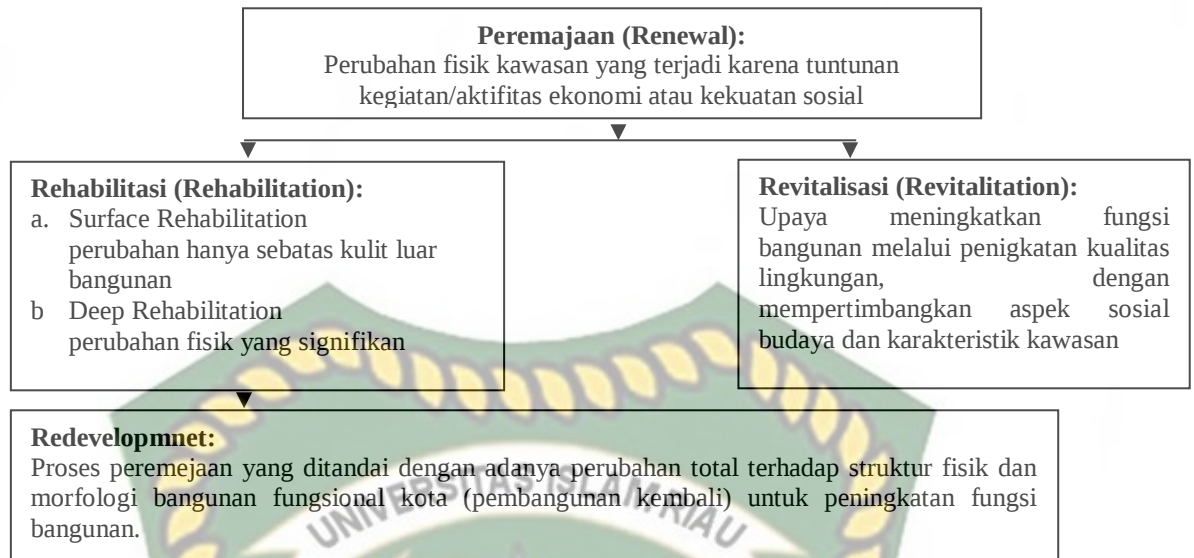
2.1 Pengertian Revitalisasi Kawasan Bersejarah

2.1.1 Pengertian Revitalisasi

Menurut (Danisworo, 2002 dalam Nurfajriani Ulva 2012), Revitalisasi adalah upaya untuk memvitalkan kembali suatu kawasan atau bagian kawasan yang dulunya pernah vital/hidup, akan tetapi kemudian mengalami kemunduran/degradasi. Skala revitalisasi ada tingkatan makro dan mikro. Proses revitalisasi sebuah kawasan atau bagian kota mencakup perbaikan aspek fisik dan aspek ekonomi dari bangunan maupun ruang kota. Revitalisasi fisik merupakan strategi jangka pendek yang dimaksudkan untuk mendorong terjadinya peningkatan kegiatan ekonomi jangka panjang. Revitalisasi fisik diyakini dapat meningkatkan kondisi fisik (termasuk juga ruang ruang publik) kota, namun tidak untuk jangka panjang. Untuk itu, tetap diperlukan perbaikan dan peningkatan aktivitas ekonomi (*economic revitalization*) yang merujuk kepada aspek sosial budaya serta aspek lingkungan (*environmental objectives*). Hal tersebut mutlak diperlukan karena melalui pemanfaatan yang produktif, diharapkan akan terbentuklah sebuah mekanisme perawatan dan kontrol yang langgeng terhadap keberadaan fasilitas dan infrastruktur kota.

Revitalisasi adalah upaya untuk meningkatkan nilai ekonomi lahan melalui pembangunan kembali suatu bangunan untuk meningkatkan fungsi bangunan

sebelumnya (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 18/Prt/M/2010) Revitalisasi bertujuan untuk mengembalikan vitalitas ataupun daya hidup sebuah bangunan atau kawasan pada suatu kota. Umumnya revitalisasi dapat dikaitkan dengan proses peremajaan bangunan, dimana intervensi yang dilakukan dapat mencakup aspek fisik dan non fisik (ekonomi, sosial budaya, dll.). Selama dua dekade terakhir praktek peremajaan dan revitalisasi bangunan telah terjadi beberapa perubahan dan perkembangan konseptual dalam kebijakan penataan lingkungan binaan (Martokusumo, 2008). Bila dikaitkan dengan paradigma keberlanjutan, revitalisasi merupakan sebuah upaya untuk mendaur ulang (recycle) aset perkotaan untuk memberikan fungsi baru, meningkatkan fungsi yang ada atau bahkan menghidupkan kembali fungsi yang pernah ada. Namun, dapat dipastikan tujuannya adalah untuk menciptakan kehidupan baru yang produktif serta mampu memberikan kontribusi positif pada kehidupan sosial-budaya dan terutama kehidupan ekonomi kota (Martokusumo, 2008 dalam Nurfajriani Ulfa, 2012). Hubungan revitalisasi dengan peremajaan, rehabilitasi dan redevelopment dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut ini:



Sumber : Martokusumo, Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota, 2008.

Gambar 2.1
Skema Hubungan Peremajaan, Rehabilitasi, Redevelopment dengan Revitalisasi

Sementara itu, (Budieono, 2006) dalam Rani 2009), mengaitkan revitalisasi sebagai rangkaian upaya untuk menata kembali suatu kondisi kawasan maupun bangunan yang memiliki potensi dan nilai strategis dengan mengembalikan vitalitas suatu kawasan yang mengalami penurunan, agar kawasan-kawasan tersebut mendapatkan nilai tambah yang optimal terhadap produktivitas ekonomi, sosial dan budaya kawasan perkotaan. Vitalitas kawasan adalah kualitas suatu kawasan yang dapat mendukung kelangsungan hidup warganya dan mendukung produktivitas sosial, budaya, dan ekonomi dengan tetap mempertahankan kualitas lingkungan fisik, dan/atau mencegah kerusakan warisan budaya (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 18/Prt/M/2010).

Penetapan kriteria dan rencana revitalisasi kawasan dapat dilakukan dengan menelaah penyebab penurunan kinerja kawasan. Dimensi penurunan

kinerja sebuah kawasan kota dapat mencakup hal-hal sebagai berikut (Martokusumo, 2008) dalam Rani 2009):

- a. Kondisi lingkungan yang buruk, artinya ditinjau dari segi infrastruktur fisik dan sosial tidak layak lagi untuk dihuni. Kondisi buruk tersebut mempercepat proses degradasi lingkungan yang dipastikan justru kontra produktif terhadap proses kehidupan sosial budaya yang sehat.
- b. Tingkat kepadatan bangunan dan manusia melampaui batas daya dukung lahan dan kemampuan infrastruktur (sarana dan prasarana) yang ada.
- c. Efektifitas pemanfaatan lahan sangat rendah, akibat terjadinya penurunan aktifitas/ kegiatan atau dengan kata lain under utilised. Hal ini dapat pula diakibatkan oleh alokasi fungsi yang tidak tepat, termasuk lahan-lahan yang tidak memiliki fungsi yang jelas.
- d. Lahan memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut, karena misalnya letak yang sangat strategis bagi pengembangan tata kota, dan tingkat percepatan pembangunan yang tinggi.
- e. Batasan luas lahan yang cukup, harga memadai dan proses pembebasan lahan memungkinkan.
- f. Memiliki aset lingkungan yang menonjol, seperti peninggalan bersejarah (bangunan dan lingkungan) yang tidak tergantikan, misalnya tradisi penduduk yang khas terhadap pemanfaatan lanskap/ ruang hidupnya (*cultural landscape*), unsur alami yang menarik, sumber tenaga kerja, infrastruktur dasar yang relatif memadai.

Revitalisasi kawasan menurut Departemen Kimpraswil (2002:76) dalam (Antariksa, 2017) adalah rangkaian upaya menghidupkan kembali kawasan yang

cenderung mati, meningkatkan nilai-nilai vitalitas yang strategis dan signifikan dari kawasan yang masih mempunyai potensi dan atau mengendalikan kawasan yang cenderung kacau atau sembarawut. Penataan dan revitalisasi kawasan dilakukan melalui pengembangan kawasan-kawasan tertentu yang layak untuk di revitalisasi baik dari segi *setting* kawasan (bangunan dan ruang kawasan), kualitas lingkungan, sarana, prasarana dan utilitas kawasan, sosial kultural, sosial ekonomi dan sosial politik. Revitalisasi pada prinsipnya tidak sekedar menyangkut masalah konservasi bangunan dan ruang kawasan bersejarah saja, tetapi lebih kepada upaya untuk mengembalikan atau menghidupkan kembali kawasan dalam konteks kota yang tidak berfungsi atau menurun fungsinya agar berfungsi kembali, atau menata dan mengembangkan lebih lanjut kawasan yang berkembang sangat pesat namun kondisinya cenderung tidak terkendali.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2010 pasal 80 ayat 1 dan 2 mengenai revitalisasi, revitalisasi potensi situs cagar budaya atau kawasan cagar budaya memperhatikan tata ruang, tata letak, fungsi sosial, dan/atau lanskap budaya asli berdasarkan kajian. Revitalisasi dilakukan dengan menata kembali fungsi ruang, nilai budaya, dan penguatan informasi tentang cagar budaya.

2.1.2 Pengertian Kawasan Bersejarah

Kawasan bersejarah adalah suatu kawasan yang mampu memberikan gambaran tentang sejarah masa lalu dan di dalamnya memiliki nilai budaya yang tinggi yang sudah sewajarnya harus di jaga kelestariannya. Gambaran tentang sejarah masa lalu itu dapat terlihat dalam bangunan-bangunan, budaya dan tradisi masyarakatnya yang merupakan ciri etnik dari suatu masyarakat. Kawasan

bersejarah juga dapat di artikan sebagai suatu kawasan yang merupakan bagian masa lalu yang merekam berbagai peristiwa yang bersejarah sekaligus menjadi simbol dari peristiwa bersejarah itu sendiri. Kawasan bersejarah adalah kawasan dengan kekayaan sejarah dan budaya serta merupakan jejak peninggalan masa lalu dari suatu kawasan. (Budiharjo, 1993 dalam Nurfajriani Ulva, 2012).

Bersejarah dimengerti sebagai memiliki nilai sejarah. Nilai dimaksud dapat bermakna dimensi yang mewakili kebudayaan sekaligus peradaban yang dibingkai oleh waktu, identitas bahan, teknologi, ilmu pengetahuan, dan dapat saja mengandung nilai estetika dan fungsional. Nilai-nilai tersebut sebaiknya dinyatakan setelah melalui penelitian yang mendalam oleh para ahli. Dalam Al-Quran juga terdapat hukum-hukum sejarah yang menjelaskan bahwa penuturan kisah-kisah dalam Al-Qur'an sarat dengan muatan edukatif bagi manusia, khususnya pembaca dan pendengarnya. Kisah-kisah tersebut menjadi bagian dari metode pendidikan yang efektif bagi pembentukan jiwa yang mentauhidkan Allah SWT. Karena itu ditegaskan Allah SWT dalam QS. Al-A'raf : 176:

..... فَأَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:Maka kisahkanlah kisah-kisah agar mereka berfikir.
 (QS. Al-A'raf : 176)

كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا

Artinya: Demikianlah kami kisahkan kepadamu (Muhammad) sebagian kisah (umat) yang telah lalu, dan sungguh, telah kami berikan kepadamu suatu peringatan (Al-Qur'an) dari sisi kami.

(QS at-Thaaha ayat 99)

Dengan demikian, kawasan bersejarah adalah “setiap wujud fisik konstruksi yang memiliki nilai-nilai signifikan (penting dan asli) yang dapat dipertanggung jawabkan dari sudut waktu, langgam, keindahan, fungsi, kejadian atau peristiwa, dan keunikan” (Rumawan, 2012 dalam Runa, 2016).

2.1.3 Kriteria Kawasan Bersejarah

Kriteria kawasan dapat di nilai sebagai suatu kawasan bersejarah warisan budaya antara lain adalah (Budiharjo 1993) dalam (Ilham Irawan 2016):

1. kawasan bersejarah merupakan kawasan yang pernah menjadi pusat-pusat dari kompleksitas fungsi dan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya yang mengakumulasi makna historis di dalamnya.
2. kawasan bersejarah adalah kawasan yang mampu mengakumulasi nilai-nilai makna kultural. Makna kultural kawasan ini tergambar dalam materi fisik kawasan yang di tonjolkan dalam bentuk-bentuk bangunan, tampilan kawasan atau landscape kawasan.

2.1.4 Tipologi Kawasan Bersejarah

Tipologi kawasan bersejarah yang ada di Indonesia pada umumnya dikelompokkan dalam 2 model yakni (Budiharjo, 1993 dalam Ilham Irawan, 2016):

1. Kawasan tradisional

Adapun ciri – ciri dari kawasan ini adalah :

- a. Merupakan suatu kawasan yang mengakumulasi makna kultural dengan karakter tradisional dari peristiwa-peristiwa itu sendiri.

- b. Tipologi dan makna kultural kawasan tradisional terdefinisi dalam lagi dalam beberapa skala kawasan (perkampungan traditional), perkampungan etnis (kawasan keraton atau kerajaan).

2. Kawasan kolonial

Adapun Ciri dari kawasan ini adalah :

- a. Merupakan kawasan yang mengakumulasikan makna cultural dengankarakter kolonial.
- b. Merupakan kawasan yang menggambarkan tentang kejayaan masa kolonial yang biasanya tampak pada bentuk penataan kawasan dan bentuk arsitektur bangunan.
- c. Kawasan kolonial umumnya berada di kota-kota besar atau daerah-daerah yang dianggap penting untuk menjadi pusat-pusat kegiatan kolonial, baik itu perkantoran, perdagangan, perindustrian, pemukiman, dan umumnya berada dekat dengan laut atau berada di daerah dataran tinggi dan dekat dengan pusat pemerintahan.
- d. Kawasan kolonial ini hadir dalam bentuk benteng-benteng pertahanan yang di dalamnya terdapat pusat pemerintahan kolonial, penjara-penjara maupun sekolah-sekolah.

2.1.5 Pengertian Cagar budaya

Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau

kebudayaan melalui proses penetapan. Sedangkan menurut Ruggles (2007) dalam Sastri (2016) cagar budaya merupakan sebuah konsep yang mempromosikan pengetahuan yang dimilikinya, memfasilitasi komunikasi dan pembelajaran serta memandu pengelolaan dari budaya masa kini dan sejarahnya di masa lalu. Cagar Budaya adalah sumberdaya tidak terbarukan yang dilihat dari usia, arsitektur, nilai sejarah, sosial ekonomi dan budaya, serta teknologi yang menggambarkan peradaban manusia pada masa lalu yang harus dilindungi baik melalui preservasi atau konservasi.

2.2 Karakteristik Kawasan Bersejarah

Pengertian karakteristik secara umum merupakan atribut atau ciri-ciri yang membuat objek dapat dibedakan sebagai sesuatu yang sifatnya individual. Karakteristik biasanya dipahami sebagai suatu atau sejumlah ciri khas yang terdapat pada individu atau kelompok tertentu yang dapat digunakan untuk membedakan individu atau kelompok tertentu yang dapat digunakan untuk membedakan individu atau kelompok tersebut dari individu lain atau kelompok lain. Karakteristik dapat digunakan untuk memberikan gambaran atau deskripsi baik fisik maupun non-fisik dengan penekanan terhadap sifat-sifat, ciri-ciri yang spesifik dan khusus suatu objek, yang membuat objek tersebut dikenali dengan mudah.

Menurut Akbar *et al* (2017) bahwa penentuan sampel kawasan ditentukan berdasarkan Undang-undang No.11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya pada Pasal 5 mengatakan bahwa benda, kawasan atau struktur cagar budaya apabila memiliki kriteria atau ciri-ciri (5):

1. Berusia 50 tahun atau lebih
2. Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 tahun;
3. Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan agama atau kebudayaan
4. Memiliki nilai budaya bagi penguat kepribadian bangsa.

Identifikasi karakteristik bangunan bersejarah didasarkan pada usia bangunan, fungsi bangunan, status kepemilikan bangunan, bentuk/arsitektur bangunan serta titik persebaran bangunan. Selain itu, karakteristik kawasan dibagi menjadi tiga karakteristik utama, yaitu karakteristik fisik, karakteristik non fisik dibagi menjadi 2 bagian yaitu (karakteristik ekonomi dan karakteristik sosial) dan karakteristik lingkungan.

2.2.1 Karakteristik Fisik

Karakteristik fisik mengawali kegiatan fisik revitalisasi dan dilakukan secara bertahap, meliputi perbaikan dan peningkatan kualitas dan kondisi fisik bangunan, tata hijau, sistem penghubung, sistem tanda/reklame dan ruang terbuka kawasan (*urban realm*). Mengingat citra kawasan sangat erat kaitannya dengan kondisi visual kawasan, khususnya dalam menarik kegiatan dan pengunjung, karakter fisik ini perlu dilakukan. Isu lingkungan (*environmental sustainability*) pun menjadi penting, sehingga karakter fisik pun sudah semestinya memperhatikan konteks lingkungan. Perencanaan fisik tetap harus dilandasi pemikiran jangka panjang (Laretna, 2002 dalam Antariksa 2017).

2.2.2 Karakteristik Non Fisik

Karakteristik kawasan non fisik adalah suatu lokasi keberadaan benda atau bangunan bersejarah yang berkaitan dengan masa lalu dan saling berkaitan antara

satu bangunan atau benda bersejarah dengan cerita sejarah yang ada. Sehingga adanya pembuktian dari suatu kejadian di masa lampau. Kawasan bersejarah dalam pengertian yang luas diartikan segala sesuatu yang ada di alam semesta pada masa lalu, baik yang berupa non fisik maupun fisik dan didalamnya terdapat komponen yang saling terkait dan saling melengkapi sehingga membentuk suatu ekosistem. (Danisworo, 2002 dalam Nurfajriani Ulva 2012), dan Karakteristik non fisik terbagi atas beberapa karakteristik yaitu, karakteristik ekonomi dan sosial.

2.2.2.1 Karakteristik Ekonomi

Karakteristik ekonomi yang diawali dengan proses peremajaan artefak urban harus mendukung proses rehabilitasi kegiatan ekonomi. Perbaikan fisik kawasan yang bersifat jangka pendek, diharapkan bisa mengakomodasi kegiatan ekonomi informal dan formal (*local economic development*), sehingga mampu memberikan nilai tambah bagi kawasan kota. (P. Hall/U. Pfeiffer, 2001 dalam Antariksa, 2017). Dalam konteks revitalisasi perlu dikembangkan fungsi campuran yang bisa mendorong terjadinya aktivitas ekonomi dan sosial (vitalitas baru).

2.2.2.2 Karakteristik Sosial

Keberhasilan revitalisasi sebuah kawasan akan terukur bila mampu menciptakan lingkungan yang menarik (*interesting*), jadi bukan sekedar membuat *beautiful place*. Maksudnya, kegiatan tersebut harus berdampak positif serta dapat meningkatkan dinamika dan kehidupan sosial masyarakat/warga (*public realms*). Sudah menjadi sebuah tuntutan yang logis, bahwa kegiatan perancangan dan pembangunan kota untuk menciptakan lingkungan sosial yang berjati diri (*place*

making) dan hal ini pun selanjutnya perlu didukung oleh suatu pengembangan institusi yang baik. P. Hall/U. Pfeiffer (2001) dalam Antariksa (2017).

2.2.3 Karakteristik Lingkungan

Pengertian karakteristik lingkungan secara umum berdasarkan penggunaannya sebagai sebuah istilah yang dipergunakan sehari-hari adalah salah satu atribut atau ciri-ciri yang membuat obyek dapat dibedakan sebagai sesuatu yang sifatnya individual. Pengertian yang mampu menunjukkan adanya kualitas khusus, berperan sebagai pembeda. (Nurjannah, 2013 dalam Antariksa 2017)

Dengan demikian karakteristik lingkungan dapat digunakan untuk memberikan gambaran atau deskripsi baik fisik maupun non fisik (tergantung kandungan/ muatan isi obyek) dengan penekanan terhadap sifat-sifat, ciri-ciri yang spesifik dan khusus suatu obyek, yang membuat obyek tersebut dapat dikendalikan dengan mudah. Salah satu kekuatan yang membentuk karakter lingkungan permukiman adalah keadaan alam yang ada di sekelilingnya. Beberapa ilmuwan telah memperbincangkan hubungan antara pengembangan permukiman manusia dan lingkungan.

2.3 Kriteria Revitalisasi dan Konservasi Kawasan Bersejarah

2.3.1 Kriteria Revitalisasi

Revitalisasi kawasan dilakukan untuk mengoptimalkan fungsi dan peran dari kawasan sehingga kawasan tetap mampu untuk berkembang, adapun kriteria revitalisasi pada suatu kawasan bersejarah adalah:

a) *Kawasan Mati Tapi Berfungsi*

Revitalisasi pada kawasan ini dilakukan untuk kembali menghidupkan kawasan yang dalam perkembangannya cenderung mengalami penurunan baik dari komponen-komponen pembentuk kawasan, penurunan kualitas lingkungan, penurunan kualitas hidup di dalam kawasan. Rendahnya intervensi publik dalam kawasan ini menyebabkan kecilnya keinginan berinvestasi dengan baik oleh pihak swasta maupun masyarakat berdampak pada hilangnya peran dan fungsi kawasan.

Revitalisasi pada kawasan ini dilakukan dengan pengoptimalan kembali potensi kawasan yang tersisa dan peniupan fungsi-fungsi baru ke dalam kawasan untuk memberikan vitalitas baru bagi kawasan.

b) Kawasan Hidup Tapi Kacau

Revitalisasi pada kawasan ini dilakukan karena dalam perkembangan kawasan ini terjadi pertumbuhan ekonomi yang tidak terkendali sehingga menggeser nilai-nilai dan komponen pembentuk kawasan bersejarah, pertumbuhan ekonomi pada kawasan ini berdampak pada meningkatnya nilai properti, hanya saja peningkatan nilai properti ini terkadang memberikan efek berupa penghancuran secara kreatif terhadap aktivitas tradisional dan komponen-komponen pembentuk kawasan akibat pihak pemilik bangunan dalam kawasan ini dan pihak swasta melihat potensi ekonomi yang besar sehingga merubah fungsi dan bentuk bangunan sesuai dengan peluang ekonomi yang ada. Pembangunan yang tidak terkendali ini akan mengikis makna-makna kultur kawasan atau nilai-nilai lama kawasan yang merupakan ciri dan karakter kawasan itu sendiri.

c) Kawasan hidup tapi tidak terkendali

Revitalisasi pada kawasan ini dilakukan untuk mengendalikan perkembangan kawasan ini sehingga makna cultural dan nilai-nilai lama dari kawasan tetap bisa

untuk di pertahankan. Apresiasi budaya dan intervensi publik cukup tinggi terhadap segenap warisan budaya menyebabkan kawasan ini menjadi hidup, hidupnya kawasan ini berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi kawasan terutama dari sektor pariwisata namun karena perkembangan ini tidak diikuti dengan sistem pengontrol dan manajemen yang mampu untuk menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan kepentingan pelestarian maka perkembangan menjadi Tidak terkendali, perkembangan yang tidak terkendali ini akan memberikan dampak pada pergeseran fungsi dan nilai kultural kawasan yang lambat laun akan menenggelamkan budaya dan sejarah kawasan itu sendiri.

Revitalisasi pada kawasan ini dimaksudkan untuk membentuk sistem pengelolaan kawasan dan pengendalian pembangunan dalam kawasan sehingga mampu menyandingkan kepentingan perkembangan ekonomi dan kepentingan pelestarian kawasan bersejarah karena kedua hal ini bukanlah sesuatu yang saling bertentangan.

2.3.2 Kriteria Konservasi

Dalam pelaksanaan atau penjabaran suatu konsep konservasi perlu ditentukan sejumlah tolak ukur (kriteria) dan motivasi. Tetapi terlebih dahulu harus ada dasar yang kokoh untuk mengetahui bagian mana yang dari kota dan bangunan apa yang perlu untuk dilestarikan. Pada studi yang telah dilakukan oleh Lubis pada tahun 1990 dengan meninjau kriteria-kriteria yang digunakan di Nepal, Inggris, dan Australia disimpulkan bahwa tiap negara memiliki kriteria yang berbeda dalam menentukan obyek yang perlu dilestarikan, tergantung dari definisi yang digunakan dan sifat obyek yang dipertimbangkan. (Lubis, 1990)

Kriteria yang digunakan untuk menentukan obyek yang perlu dilestarikan seperti yang dikemukakan oleh (Catanese, 1979.Pontoh, 1992.dan Harvey, 1992)dalam Nasir (1979) juga memiliki beberapa perbedaan. Dari beberapa literatur yaitu (Catanese, 1986. Pontoh, 1992.Rypkema) dalam Tiesdel (1992), kriteria yang menggambarkan dasar-dasar pertimbangan atau tolak ukur mengapa suatu obyek perlu dilestarikan. Tolak ukur tersebut adalah:

1. Tolak ukur fisik-visual:

- a. Estetika/arsitektonis, berkaitan dengan nilai estetis dan arsitektural, meliputi bentuk, gaya, struktur, tata ruang, dan ornamen.
- b. Keselamatan, berkaitan dengan pemeliharaan struktur bangunan tua agar tidak terjadi suatu yang membahayakan keselamatan penghuni maupun masyarakat di lingkungan sekitar bangunan tua tersebut.
- c. Kejamakan/tipikal, berkaitan dengan obyek yang mewakili kelas dan janis khusus, tipikal yang cukup berperan.
- d. Kelangkaan, berkaitan dengan obyek yang mewakili sisa dari peninggalan terakhir gaya yang mewakili jamannya, yang tidak dimiliki daerah lain.
- e. Keluarbiasaan/keistimewaan, suatu obyek observasi yang memiliki bentuk paling menonjol, tinggi, dan besar. Keistimewaan memberi tanda atau ciri suatu kawasan tertentu.
- f. Peranan sejarah, merupakan lingkungan kota atau bangunan yang memiliki nilai historis suatu peristiwa yang mencatat peran ikatan simbolis suatu rangkaian sejarah masa lalu dan perkembangan suatu kota untuk dilestarikan dan dikembangkan.

g. Penguat karakter kawasan, berkaitan dengan obyek yang mempengaruhi kawasan-kawasan sekitar dan bermakna untuk meningkatkan kualitas dan citra lingkungan.

2. Tolak ukur non fisik:

- a. Ekonomi, dimana kondisi bangunan tua yang baik akan menjadi daya tarik bagi para wisatawan dan investor untuk mengembangkannya sehingga dapat digali potensi ekonominya.
- b. Sosial dan budaya, dimana bangunan tua tersebut memiliki nilai agama dan spiritual, memiliki nilai budaya dan tradisi yang penting bagi masyarakat.

2.4 Lingkup, Kriteria dan Kategori Objek Pelestarian

2.4.1 Lingkup Objek Pelestarian

Menurut Shankland (2000) dalam Rendy Maulana (2018) dikatakan bahwa lingkup pelestarian dapat dibedakan atas desa dan kota kecil bersejarah, kawasan bersejarah dalam kota besar, kota bersejarah, dan kelompok bangunan bersejarah. Pada kawasan kota objek dan lingkungan pelestarian digolongkan dalam beberapa luasan, antara lain;

1. Satuan Areal, yaitu berwujud sub wilayah.
2. Satuan Pandang atau View, berupa aspek visual yang memberikan bayangan mental (*image*) antara lain, *path*, *edge*, *node*, *distric*, dan *landmark*.
3. Satuan Fisik, berwujud bangunan, sederetan bangunan, bahkan unsur bangunan seperti struktur, ornamen dan lainnya.

2.4.2 Kriteria Objek Pelestarian

Menurut *National Register of Historic Places, National Park Service US Department of Interior* dalam Maulana Rendy (2018), kriteria objek konservasi antara lain:

1. Berkaitan dengan peristiwa yang memberi kontribusi signifikan dalam alur sejarah bangsa.
2. Berkaitan dengan kehidupan tokoh yang cukup penting dalam sejarah.
3. Perwujudan dari suatu karakter, tipe, periode, metode pembangunan, contoh karya ahli, atau memiliki nilai artistik tinggi.
4. Menghasilkan informasi penting masa prasejarah dan sesudahnya.

Menurut *Introduction to Urban Planning* dalam Antariksa (2017) dijelaskan mengenai kriteria bangunan yang representatif untuk dilestarikan;

1. Estetika: bangunan/lingkungan yang memiliki sesuatu yang khusus dalam sejarah perkembangan “*style*” tertentu.
2. Typikal: bangunan-bangunan yang merupakan wakil dari kelas atau *type* bangunan tertentu.
3. Kelangkaan: bangunan yang hanya satu-satunya atau peninggalan terakhir dari *style* atau gaya yang mewakili zaman tertentu.
4. Peranan sejarah: bangunan/lingkungan yang merupakan tempat terjadinya peristiwa bersejarah, sebagai ikatan simbolis antara peristiwa yang lalu dan peristiwa sekarang.
5. Yang paling menonjol bangunan-bangunan yang paling pertama dibuat, besar, tinggi, dan sebagainya.

2.4.3 Kategori Objek Pelestarian

Menurut *National Register of Historic Places, National Park Service US Department of Interior* dalam Antariksa (2017), katagori objek konservasi meliputi beberapa hal sebagai berikut:

1. Objek religius berupa peninggalan arsitektur atau nilai artistik yang berbeda dalam suatu periode sekarang.
2. Bangunan atau bentuk struktur yang telah dipindahkan dari lokasi eksisting yang memiliki nilai signifikan dalam arsitektur atau bentuk struktur yang masih bertahan terkait dalam peristiwa sejarah tokoh tertentu.
3. Tempat kelahiran atau makam tokoh terkenal dalam sejarah, dalam catatan tidak ada tempat atau bangunan yang terkait dengan riwayat hidupnya.
4. Tempat pemakaman dari tokoh penting; dari zaman tertentu, keunikan desain, atau berkaitan dengan peristiwa sejarah tertentu.
5. Bangunan hasil rekonstruksi dan merupakan satu-satunya bangunan yang dapat diselamatkan.
6. Objek berusia 50 tahun yang memberi nilai yang cukup signifikan atau pengecualian yang dianggap penting.

Menurut *Department of the Environment Circulars 23/77, the secretary of state for Wales* dalam Antariksa (2017), katagori objek konservasi antara lain:

1. Sebuah bangunan yang didirikan sebelum Tahun 1700 yang masih bertahan sesuai dengan kondisi aslinya.
2. Kebanyakan bangunan dari Tahun 1700-1914 hanya bangunan yang mempunyai kualitas dan karakter khusus saja.

3. Pemeliharaan bangunan didasarkan pada:
 - a. *Special value*, berdasarkan tipe arsitektur atau gambar kehidupan sosial ekonomi masa tertentu. Contohnya: bangunan industri, stasiun, sekolah, rumah sakit, dan balai kota.
 - b. Hasil aplikasi perkembangan teknologi. Contohnya: bangunan struktur baja atau awal penggunaan beton.
 - c. Berkaitan dengan sejarah atau tokoh tertentu.
 - d. *Group value*. Contohnya: hasil perencanaan kota.
4. Bangunan dari tahun 1914-1939 adalah jenis-jenis bangunan yang mewakili hasil arsitektur periodenya.
5. Bangunan yang mewakili karya arsitek tertentu tiap periode.

2.5 Revitalisasi Merupakan Sebuah Upaya Pelestarian

Menurut Piagam Burra (1988:34) dalam Antariksa (2017), Revitalisasi adalah menghidupkan kembali kegiatan sosial dan ekonomi bangunan atau lingkungan bersejarah yang sudah kehilangan vitalitas fungsi aslinya, dengan memasukkan fungsi baru kedalamnya sebagai daya tarik, agar bangunan atau lingkungan tersebut menjadi hidup kembali. Proses revitalisasi bukan hanya berorientasi pada keindahan fisik, tetapi juga harus mampu meningkatkan stabilitas lingkungan, pertumbuhan perekonomian masyarakat pelestarian dan pengenalan budaya.

Selain itu, pendekatan revitalisasi harus mampu mengenali dan memanfaatkan potensi lingkungan (sejarah, makna, keunikan lokasi dan citra tempat). Dengan dukungan mekanisme kontrol atau pengendalian rencana

revitalisasi harus mampu mengangkat isu-isu strategis kawasan, baik dalam bentuk kegiatan/aktifitas sosial-ekonomi maupun karakter fisik kota. Kriteria penentu dalam menilai kawasan agar dapat di kembangkan adalah memiliki sumber kemampuan ekonomi kawasan yang dapat diandalkan untuk dikembangkan sebagai kawasan wisata maka kawasan tersebut harus memiliki keunikan, memiliki sejarah yang mengingatkan pada suatu kejayaan kawasan, terdapat peninggalan-peninggalan bernilai tinggi dan masih memungkinkan untuk di kembangkan. Hal-hal itulah yang akan di jadikan daya tarik kawasan sebagai kawasan wisata.

Menurut Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseum, Direktorat Jendral Kebudayaan Indonesia (2016) dalam Hafizhah T (2018), ada beberapa hal yang harus menjadi prinsip pemanfaatan, yaitu:

1. Pemanfaatan cagar budaya dilaksanakan sesuai dengan aspek pelestarian dan tidak mengurangi nilai cagar budaya
2. Pemanfaatan cagar budaya mengutamakan peningkatan kesejahteraan masyarakat
3. Pemanfaatan cagar budaya harus menjaga ketertiban, keamanan dan kehidupan masyarakat setempat
4. Pemanfaatan cagar budaya selaras dengan konservasi (perjanjian internasional) bagi warisan budaya dunia dan peraturan perundangan tentang cagar budaya dan peraturan lainnya
5. Pemanfaatan cagar budaya menghormati hukum adat kepercayaan, dan adat istiadat serta norma-norma masyarakat.

2.6 Pengembangan Kawasan Bersejarah

2.6.1 Pelestarian Kawasan Bersejarah

Pelestarian atau konservasi bukanlah romantisme masa lalu atau upaya untuk mengawetkan kawasan bersejarah, namun lebih di tujukan untuk menjadi alat dalam mengolah transformasi dan revitalisasi kawasan tersebut. Upaya ini bertujuan pula memberikan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik berdasarkan kekuatan aset lama, dan melakukan pencakokan program-program yang menarik dan kreatif, berkelanjutan, serta merencanakan program partisipasi dengan memperhitungkan estimasi ekonomi.

Pelestarian adalah segenap proses pengelolaan suatu tempat dan bangunan atau artefak agar secara historis, makna kultural yang dikandungnya, terpelihara dengan baik. Perlindungan benda cagar budaya merupakan salah satu upaya bagi pelestarian warisan budaya bangsa yang mencerminkan peradaban suatu bangsa. Upaya pelestarian tersebut sangatberarti bagi kepentingan pembinaan dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan, serta pemanfaatan lainnya seperti pariwisata yang dapat meningkatkan pendapatan negara.

Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah (dalam Modul 1 Identifikasi Kawasan) dalam Nurfajriani Ulfa (2012) menjelaskan tentang tahap-tahap revitalisasi yaitusebagai berikut :

- a. Restorasi, Bentuk pelestarian yang paling konservatif adalah restorasi, yang menyangkut pengembalian bangunan-bangunan pada kondisi orisinalnya. Restorasi menyangkut penggantian unsur-unsur yang telahhancur dan membuang elemen-elemen yang telah ditambahkan.

- b. Rehabilitasi, adalah proses pengembalian bangunan atau kawasan kepada kegunaannya semula melalui perbaikan dan perubahan, yang memungkinkan diberlakukannya fungsi baru yang efisien dan sekaligus memelihara serta melestarikan elemn bangunan dan kawasan yang penting dari nilai sejarah, arsitektur dan budaya.
- c. Konservasi adalah kegiatan pemeliharaan dan perawatan suatu bangunan dan kawasan guna mempertahankan nilai kulturnya.
- d. Preservasi adalah tindakan atau proses penerapan langkah-langkah dalam mendukung keberadaan bentuk asli, keutuhan material bangunan/struktur, serta bentuk tanaman yang ada dalam tapak.
- e. Replikasi, atau imitasi tidak digunakan secara luas pada skala kota sesuai untuk beberapa situasi. Jenis imitasi yang lain digunakan bila ada sesuatu kebutuhan untuk mengisi celah-celah antara bangunan yang ada. Bila suatu kawasan sejarah mempunyai sifat-sifat arsitektural maka kadang-kadang diisyaratkan bahwa pembangunan-pembangunan baru itu tidak akan merusak jadi replikasi adalah usaha mereplikasi, atau membentuk kembali bagian bangunan yang hilang dengan menggunakan material yang lama dan baru.
- f. Relokasi merupakan suatu pendekatan lain terhadap pelestarian. Relokasi tidak dipergunakan secara luas namun dalam beberapa keadaan, pemindahan bangunan dari suatu lokasi ke lokasi yang lain bisa dibenarkan.
- g. Rekonstruksi adalah proses membangun kembali bagian atau kawasan sesuai bagian atau keseluruhan bangunan atau kawasan sesuai dengan bentuk awal, dengan menggunakan material baru atau lama.

2.6.2. Pemanfaatan Bangunan Bersejarah Sebagai Obyek Pariwisata

Para wisatawan, baik mancanegara maupun nusantara, umumnya sangat terkesan dengan keseluruhan dari pemandangan yang ada, barang-barang bersejarah yang ditemukan di kawasan wisata, pancaran aura yang terpancar yang terpancar dari lingkungan sekitar, kegiatan atau kebiasaan rutinitas yang masih dipraktekan, keunikan dari suatu kawasan, atau pada fakta bahwa suatu kunjungan wisata memerlukan waktu yang lebih lama. Menurut Baud-Bovy (1998:230) dalam Nurfajriani Ulfa (2012), hal-hal yang dapat membuat wisatawan tertarik adalah :

- a. Pusat orientasi, yang mempresentasikan sejumlah ilustrasi sejarah, tampilan-tampilan yang interaktif, penjelasan-penjelasan deskriptif secara terperinci, dan lain sebagainya.
- b. Kesempatan untuk mengalami sendiri kejadian-kejadian, berbagai aktivitas, dan kondisi sesungguhnya dengan menggunakan aktor atau kondisi tiruan dari suatu sejarah (museum hidup).
- c. Rekonstruksi dari reruntuhan bangunan untuk ilustrasikan skala monumental dari keadaan asli suatu sejarah.
- d. Pusat wisatawan termasuk toko cinderamata, fasilitas informasi dan fasilitas umum lainnya.

Suatu kawasan monumental tidak harus didominasi oleh museum-museum yang ada pada kawasan tersebut dan sebaiknya kawasan tersebut tidak diisolasi dari lingkungan sebenarnya dengan menggunakan taman-taman ornamental, tempat parkir dan lain-lain. Upaya menjaga kelangsungan kawasan monumental tersebut

haruslah tidak kentara dan bersifat sebagai pelengkap. Upaya-upaya tersebut diantaranya adalah :

- a. Menjaga lebar jalan masuk kawasan sekecil mungkin agar jalan masuk langsung menuju ke monumen (sebagai bagian dari kejutan bagi para pengunjung).
- b. Menyembunyikan fasilitas-fasilitas yang sebaiknya tidak terlihat dari kawasan monumental tersebut (seperti tempat parkir).
- c. Melindungi lingkungan sekitar dari perubahan-perubahan yang berarti khususnya dari pembangunan gedung-gedung baru.
- d. Mengatur kunjungan baik berupa kunjungan individual maupun kunjungan berkelompok.

2.7 Manfaat Pelestarian Kawasan Bersejarah

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan pelestarian pada umumnya ialah untuk melindungi, menjaga serta mempertahankan suatu kawasan maupun bangunan yang dianggap memiliki nilai sejarah maupun nilai estetika tinggi yang dapat memberikan manfaat bagi perkembangan kebudayaan. Pelestarian bangunan juga merupakan suatu pendekatan yang strategis dalam pembangunan kota, karena pelestarian menjamin kesinambungan nilai-nilai kehidupan dalam proses pembangunan yang dilakukan manusia. Suatu upaya pelestarian kawasan maupun bangunan menurut (Budihardjo, 1985 dalam Antariksa, 2017) setidaknya ada tujuh manfaat kegiatan pelestarian, antara lain:

1. Pelestarian lingkungan lama akan memperkaya pengalaman visual, menyalurkan hasrat kesinambungan, memberi tautan bermakna dengan

masa lampau, dan memberikan pilihan untuk tetap tinggal dan bekerja didalam bangunan maupun lingkungan lama tersebut.

2. Di tengah perubahan dan pertumbuhan yang pesat seperti sekarang ini, lingkungan lama akan menawarkan suasana permanen yang menyegarkan
3. Teknologi pembangunan yang berorientasi pada nilai-nilai ekonomi diatas lahan berskala besar ternyata berakhir dengan keseragaman yang membosankan. Upaya-upaya yang mempertahankan bagian kota yang dibangun dengan skala akrab dan membantu hadirnya *sense of place*, identitas diri, dan suasana kontras.
4. Kota dan lingkungan lama adalah salah satu asset terbesar dalam industri wisata international, sehingga perlu dilestarikan
5. Upaya preservasi dan konservasi merupakan salah satu upaya generasi masa kini untuk melindungi dan menyampaikan warisan berharga kepada generasi mendatang.
6. Pengadaan preservasi dan konservasi akan membuka kemungkinan bagi setiap manusia untuk memperoleh kenyamanan psikologi yang sangat diperlukan untuk dapat menyentuh, melihat, dan merasakan bukti fisik sesuatu tempat di dalam tradisinya.
7. Upaya-upaya pelaksanaan preservasi dan konservasi akan membantu terpeliharanya warisan arsitektur, yang dapat menjadi catatan sejarah masa lampau dan melambangkan keabadian serta kesinambungan, yang berbeda dengan keterbatasan kehidupan manusia.

Menurut Shirvani (1985) dalam Antariksa (2017), yaitu pelestarian pada suatu kawasan maupun bangunan dapat memberikan beberapa manfaat antara lain:

1. Manfaat kebudayaan, yaitu sumber-sumber sejarah yang dilestarikan dapat menjadi sumber pendidikan dan memperkaya estetika.
2. Manfaat ekonomi, yaitu adanya peningkatan nilai properti, peningkatan penjualan ritel dan sewa komersil, penanggulangan biaya-biaya relokasi dan peningkatan pada penerima pajak serta pendapatan dari sektor pariwisata.
3. Manfaat sosial dan perencanaan, yaitu karena upaya pelestarian dapat menjadi kekuatan yang tepat dalam memulihkan kepercayaan masyarakat.

Menurut Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseum, Direktorat Jendral Kebudayaan Indonesia (2016) dalam Hafizhah T (2018), ada beberapa hal yang harus menjadi prinsip pemanfaatan, yaitu:

1. Pemanfaatan cagar budaya dilaksanakan sesuai dengan aspek pelestarian dan tidak mengurangi nilai cagar budaya
2. Pemanfaatan cagar budaya mengutamakan peningkatan kesejahteraan masyarakat
3. Pemanfaatan cagar budaya harus menjaga ketertiban, keamanan dan kehidupan masyarakat setempat
4. Pemanfaatan cagar budaya selaras dengan konservasi (perjanjian internasional) bagi warisan budaya dunia dan peraturan perundangan tentang cagar budaya dan peraturan lainnya

5. Pemanfaatan cagar budaya menghormati hukum adat kepercayaan, dan adat istiadat serta norma-norma masyarakat.

2.8 Hubungan Revitalisasi dengan Pelestarian

Revitalisasi pada dasarnya adalah salah satu metode pelestarian, baik bangunan maupun kawasan dengan penekanan tidak semata-mata pada aspek fisik, tetapi juga aspek sosial budaya dan ekonomi. James Marston Fitch dalam bukunya *Historic Preservation* (1990) dalam Antariksa (2017) mengatakan, pelestarian dapat dilakukan melalui usaha revitalisasi, yaitu dengan memodifikasi fungsi bangunan lama agar dapat digunakan untuk fungsi baru yang lebih sesuai tanpa mengubah dominasi karakter bangunan semula. Dilihat dari definisi tersebut, pembentukan fungsi baru diharapkan mampu meningkatkan nilai manfaat bangunan melalui keselarasan karakter, visual, maupun keselarasan fungsi yang direncanakan.

Ada tiga keuntungan yang dapat diperoleh dalam perpaduan pelestarian dan revitalisasi Miarsono(1997) dalam Danisworo (2002), yaitu:

- a. Keuntungan budaya, dengan dipertahankannya bangunan bersejarah tersebut maka akan semakin mengikat rasa emosional seseorang terhadap sejarah yang terkandung di dalamnya.
- b. Keuntungan ekonomi, yaitu dapat meningkatkan taraf hidup, omset penjualan, naiknya harga sewa, pajak pendapatan oleh pemerintah daerah dan mengurangi biaya pengganti (*replacement cost*).
- c. Keuntungan sosial, yaitu munculnya kepercayaan diri akibat meningkatnya nilai ekonomi.

Dari beberapa definisi tentang revitalisasi, pada dasarnya revitalisasi memiliki pengertian sebuah upaya memvitalkan kembali (*re-vital-ization*) kondisi suatu kawasan baik secara fisik sosial maupun ekonomi yang pernah ada.

2.9 Kebijakan-Kebijakan Pelestarian Kawasan Bersejarah

Kebijakan pemerintah terhadap pelestarian kawasan bersejarah sangat diperlukan untuk memberi memberikan dasar hukum bagi upaya pelestarian kawasan bersejarah. Kebijakan-kebijakan juga merupakan suatu bentuk kepedulian pihak stockholder dalam upaya pelestarian kawasan bersejarah dan dalam upaya pengembangan potensi kepariwisataan dalam suatu kota.

Upaya pelestarian kawasan bersejarah yang di implementasikan dalam bentuk rencana penataan takkan berarti apa-apa tanpa di dukung oleh perangkat kebijakan-kebijakan pemerintah terhadap pelestarian kawasan bersejarah. Undang-Undang No. 11 tahun 2010 telah jelas mengamanatkan pelestarian kawasan, kawasan bersejarah yang merupakan benda cagar budaya untuk itu pelestarian terhadap kawasan merupakan kegiatan yang mesti dilakukan sebagai bentuk penataan kota. (Nurfajriani Ulva, 2012).

2.10 Faktor Pendukung dan Penghambat Revitalisasi Kawasan Bersejarah

Berhasil tidaknya suatu upaya pemerintah dalam merealisasikan konsep revitalisasi dapat dilihat berdasarkan kinerja faktor-faktor yang mempengaruhinya, Adapun faktor-faktor pendukung dan penghambat yang harus diketahui adalah sebagai berikut: (Budihardjo (1985) dalam (Laretna, Adhisakti T. (2002):

2.10.1 Bangunan Bersejarah

Bangunan bersejarah merupakan bangunan yang memiliki nilai dan makna yang penting bagi sejarah, namun juga ilmu pengetahuan dan kebudayaan, dan ada kalanya bersifat rapuh, unik, langka, dan terbatas. Bangunan bersejarah bersifat rapuh apabila tidak dirawat dengan baik atau karena faktor usia bangunan yang sudah tua. Bangunan bersejarah terbilang unik karena rancangan bentuk dan jenis *façade* bangunannya mengikuti gaya arsitektur dan fungsi sesuai iklim di daerah bangunan itu didirikan. Bangunan bersejarah merupakan monumen yang terbilang langka dan terbatas karena bahan material yang digunakan pada bangunan yang saat ini sulit untuk dicari. Tidak hanya itu saja, gaya dan ornamen yang sudah tidak banyak digunakan lagi pada bangunan-bangunan baru sangat menunjang kelangkaan bangunan bersejarah tersebut.

Bangunan bersejarah juga merupakan aset negara yang bisa dimanfaatkan dari sisi nilai ekonomi dan sosial untuk kesejahteraan masyarakat. Manfaat yang diperoleh dari bangunan bersejarah dalam meningkatkan nilai perekonomian dan sosial salah satunya dapat dilakukan dengan mengubah atau alih fungsi bangunan dan beberapa ruangan di dalamnya menjadi sebuah kafe yang difasilitasi ruang membaca, diskusi atau ruang foto dengan penambahan koleksi barang-barang yang antik untuk mendukung suasana historis dari bangunannya. Nuansa historis itu, perlu dipertahankan agar nilai dan makna sejarah dari bangunan di masa lalu tersebut tidak hilang akibat proses perkembangan zaman.

Bangunan bersejarah yang tidak dilestarikan akan mengalami kemerosotan atau penurunan dalam mutu nilainya. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan menimbang pentingnya bangunan bersejarah tersebut, maka pemerintah

menetapkan undang-undang terkait dengan Cagar Budaya sebagaimana tercantum pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2010.

2.10.2 Kawasan Bersejarah

Kawasan bersejarah adalah suatu kawasan yang mampu memberikan gambaran tentang sejarah masa lalu dan di dalamnya memiliki nilai budaya yang tinggi yang sudah sewajarnya harus di jaga kelestariannya. Gambaran tentang sejarah masa lalu itu dapat terlihat dalam bangunan-bangunan, budaya dan tradisi masyarakatnya yang merupakan ciri etnik dari suatu masyarakat. Kawasan bersejarah juga dapat di artikan sebagai suatu kawasan yang merupakan bagian masa lalu yang merekam berbagai peristiwa yang bersejarah sekaligus menjadi simbol dari peristiwa bersejarah itu sendiri. Kawasan bersejarah adalah kawasan dengan kekayaan sejarah dan budaya serta merupakan jejak peninggalan masa lalu dari suatu kawasan.

2.10.3 Peranan Masyarakat

Peranan masyarakat yaitu melibatkan seluruh warga dalam pengelolaan, seperti adanya institusi peranan masyarakat dalam pengambilan keputusan (forum dengar pendapat, survey masyarakat) dan adanya lembaga-lembaga masyarakat yang memiliki hak dan kemampuan untuk memberikan pendapat pada pemerintah (asosiasi, perkumpulan, lingkungan, RT/RW). Masyarakat harus aktif dalam institusi dan lembaga untuk mempengaruhi keputusan publik.

Keuntungan dari pembangunan pariwisata berbasis masyarakat, yakni membantu menciptakan peluang baru bagi pengembangan kehidupan bermasyarakat, pengembangan regional untuk mempelajari masa lampau, dan

mampu mempromosikan keseimbangan lingkungan alam, benda cagar budaya, tempat tinggal yang nyaman dan *local genius*. Dalam peranan terdapat beberapa hambatan yang harus disadari. Hambatan itu berasal dari rakyat dan dari pemerintah. Hambatan dari rakyat adalah adanya budaya diam atau enggan berpendapat, lemahnya kemauan untuk berpartisipasi karena ada banyak peraturan atau perundang-undangan yang meredam keinginan rakyat untuk berpartisipasi, contohnya UU No. 5 tahun 1979 mengenai kekuasaan Kepala Desa/Pemerintah yang sangat kuat, dan lebih patuh pada perintah atasan dari pada sebagai pengayom masyarakat. Terdapat kaitan yang erat antara partisipasi dan insentif, tanpa suatu insentif maka partisipasi tersebut berubah makna dari suatu keinginan manusia untuk ikut serta secara sukarela dalam suatu kegiatan yang dianggap dapat memperbaiki harkat hidup masyarakat menjadi suatu tindakan paksaan, dan hal ini yang menyebabkan terjadinya mobilisasi.

Usulan yang datang dari dinas (pemerintah) yang biasanya lolos dalam proses seleksi dan dianggap sebagai proyek pembangunan. Usul-usul dari masyarakat akan ditampung untuk memperkecil makna dari partisipasi dan kebiasaan aparat pemerintah untuk curiga terhadap setiap usul dari masyarakat karena merasa ada pihak lain yang menggerakkan.

2.10.4 Kebijakan Pemerintah

Kebijakan pemerintah terhadap revitalisasi kawasan bersejarah sangat di perlukan untuk memberi memberikan dasar hukum bagi upaya merevitalisasi kawasan bersejarah. Kebijakan-kebijakan juga merupakan suatu bentuk kepedulian pihak *stackholder* dalam upaya merevitalisasi kawasan bersejarah dan dalam upaya pengembangan potensi kepariwisataan dalam suatu kota. Upaya

merevitalisasi kawasan bersejarah yang di implementasikan dalam bentuk rencana penataan takkan berarti apa-apa tanpa di dukung oleh perangkat kebijakan-kebijakan pemerintah terhadap merevitalisasi kawasan bersejarah. Undang-Undang No. 11 tahun 2010 telah jelas mengamanatkan revitalisasi bangunan kawasan bersejarah yang merupakan benda cagar budaya untuk itu merevitalisasi terhadap kawasan merupakan kegiatan yang mesti dilakukan sebagai bentuk penataan kota.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Peranan, tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sangat besar terhadap merevitalisasi Kawasan Bersejarah. Mulai dari proses pendataan (inventarisasi), pendaftaran (registrasi), membuat peringkat kawasan bersejarah, membentuk tim ahli kawasan bersejarah, menetapkan status kawasan bersejarah hingga menyebarluaskan informasi tentang kawasan bersejarah dengan tetap memperhatikan keamanan dan kerahasiaan data. Hal ini senada dengan apa yang diisyaratkan dalam QS al-Ma'arij/70:32 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ﴿٣٢﴾

Terjemahnya :

Dan orang-orang yang memelihara amat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya.

Keenam, orang-orang yang memelihara amanat Tuhan, amanat manusia dan tidak mengkhianati komitmen mereka kepada tuhan dan manusia. Ketujuh, orang-orang yang melaksanakan persaksian dengan benar tanpa menyembunyikan sesuatu yang di ketahuinya. Dan, kedelapan, orang-orang yang memelihara salat

mereka dengan melaksanakannya sebaik mungkin. (Prof. Dr. H. M. Quraish Shihab, MA.)

Selain peranan diatas berdasarkan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya, Pemerintah Daerah diberi kewenangan yang cukup besar terhadap kawasan bersejarah.

Adapun kewenangan Pemerintah Daerah tersebut sebagai berikut:

1. Menetapkan etika revitalisasi kawasan bersejarah.
2. Mengkoordinasikan revitalisasi kawasan bersejarah secara lintas sektor dan wilayah.
3. Menghimpun data kawasan bersejarah.
4. Menetapkan peringkat kawasan bersejarah.
5. Menetapkan dan mencabut status kawasan bersejarah.
6. Membuat peraturan pengelolaan kawasan bersejarah.
7. Menyelenggarakan kerjasama revitalisasi kawasan bersejarah.
8. Melakukan penyidikan kasus pelanggaran hukum.
9. Mengelola kawasan bersejarah.
10. Mendirikan dan membubarkan unit pelaksanaan teknis bidang revitalisasi, penelitian dan museum.

Kewenangan yang sama juga diberikan kepada pemerintah pusat, kecuali 5 kewenangan yang bersifat pengaturan ditingkat nasional yaitu:

1. Menyusun dan menetapkan rencana induk revitalisasi kawasan bersejarah.
2. Melakukan revitalisasi kawasan bersejarah yang ada di daerah perbatasan dengan negara tetangga atau yang berada diluar negeri.

3. Menetapkan benda bersejarah, bangunan bersejarah, struktur kawasan bersejarah dan situs bersejarah.
4. Mengusulkan kawasan bersejarah nasional sebagai warisan dunia atau kawasan bersejarah bersifat internasional.
5. Menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria pelestarian kawasan bersejarah.

2.10.5 Pendanaan/Anggaran

Pemerintah kota memerlukan dukungan finansial dalam menyelenggarakan perannya sebagai pelayan dan pelindung kawasan bersejarah. Anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis, yang meliputi seluruh kegiatan lembaga, yang dinyatakan dalam unit (kesatuan) moneter dan berlaku untuk jangka waktu (periode) tertentu yang akan datang.

Peran strategis anggaran daerah semakin menonjol karena dia merupakan alat untuk menentukan pendapatan dan pengeluaran di masa mendatang, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, menetapkan otorisasi pengeluaran di masa mendatang, sebagai sarana pengembangan ukuran standar untuk evaluasi kerja, alat motivasi pegawai, serta alat koordinasi bagi seluruh aktivitas berbagai unit kerja dalam birokrasi pemerintah. Maka prinsip pokok yang menekankan pengelolaan keuangan dan anggaran daerah pada kepentingan public menjadi isu penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah (Kumorotomo, 2005:13).

2.11 Faktor Penyebab Rendahnya Kualitas Komponen Revitalisasi

Komponen-komponen revitalisasi berdasarkan tipologinya dibagi kedalam aspek fisik, aktivitas ekonomi, aktivitas sosial, dan institusional. Komponen-

komponen disetiap aspek dalam konteks revitalisasi kawasan bersejarah menurut Zielenbach (2000) dalam (Danisworo (2002) mengalami penurunan fungsi sehingga dalam skala besar akan mempengaruhi sebuah vitalitas kawasan. Berikut ini adalah komponen-komponen revitalisasi.

1. Aspek Fisik

Moughtin (1992)dalam Danisworo (2002), Tidak adanya pedestrian yang nyaman dan memberikan kesenangan, keterbatasan ruang untuk penghijauan dan perparkiran, adanya bangunan-bangunan yang tidak harmonis dengan karakter kawasan, pengaturan jaringan jalan yang tidak tepat.

Lynch dalam Moughtin (1992): Landmark yang tidak terekpose dengan baik.

Rojas (2007): tidak adanya pada bangunan-bangunan di kawasan urban heritage.

2. Aspek Ekonomi

Smith (1995)dalam Danisworo (2002) Matinya aktivitas ekonomi yang disebabkan oleh minimnya keragaman dan kreativitas produk ekonomi.

Menurut Peacock (2008) dalam Danisworo (2002) kurangnya promosi produk ekonomi menyebabkan produktivitas dan daya saing ekonomi akan menurun.

3. Aspek Sosial

Zielenbach (2000) dalam Danisworo (2002), Minimnya modal sosial yang dimiliki oleh masyarakat, tidak adanya motor penggerak dimasyarakat, dan minimnya sumberdaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.

4. Aspek Institusional

Ross (1995) dalam Danisworo (2002) Minimnya dana yang disediakan untuk pelestarian, lemahnya proses implementasi kebijakan dan pengawasan dan minimnya orientasi pemerintah pada pelestarian.

2.12 Konsep Pariwisata Budaya

2.12.1 Definisi Kebudayaan

Kata budaya atau kebudayaan adalah kata yang sudah sangat sering digunakan atau didengar dalam berbagai kesempatan, tetapi makna yang diberikan pada kata tersebut tidak selalu jelas dan sama. Sebagian orang cipta, rasa dan karsa manusia sedangkan sebagian lagi menganggap kebudayaan sebagai adat istiadat dan segala sesuatu yang berkaitan dengan tradisi atau kebiasaan lama, sementara ada juga yang menganggap kebudayaan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan kesenian. Kata budaya dan kebudayaan pada dasarnya memiliki makna yang sama yakni simbol-simbol yang digunakan oleh manusia untuk berkomunikasi dan beradaptasi dengan lingkungannya yang dipelajarinya dalam kehidupannya sebagai warga suatu masyarakat. Objek wisata budaya adalah jenis tempat wisata yang menampilkan obyek berupa rumah adat, makam, benteng, suku, obyek sejarah dan lain-lain. (Rieke Susanti, 1995).

2.12.2 Karakteristik Objek Pariwisata Budaya

R.G. Sukadijo, Anatomi Pariwisata hal-54 mengemukakan karakteristik objek wisata budaya dapat dibagi antara lain :

- a. Bangunan bersejarah, memiliki bangunan sejarah seperti candi, pura, vihara, masjid, benteng, kuburan, istana dan museum.

- b. Sejarah daerah atau suku yang terkenal, sejarah daerah atau suku yang masih terpelihara baik dari cerita rakyat atau dalam karya tulis yang diwariskan dari generasi ke generasi.
- c. Kebiasaan/transaksi yang khas seperti kebenaran berpakaian, berbicara/komunikasi pasti hidup dan sistem mencari nafkah yang khas.
- d. Benda-benda peninggalan sejarah seperti keris, tombak, salokoa (makhotakerajaan) dan lain sebagainya.
- e. Karya seni tradisional seperti ukiran, lukisan, seni tari, seni suara, drama.

2.12.3 Prinsip Pengembangan Pariwisata Budaya

Prinsip-prinsip yang menjadi dasar pengembangan pariwisata budaya harus berbasis masyarakat. Masyarakat harus dilibatkan pada seluruh kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pariwisata budaya. Kesadaran, dukungan dan kepedulian mereka terhadap lingkungan atas lingkungan kehidupan sosial budaya juga dibutuhkan. Pemantauan dan evaluasi diarahkan untuk mengawasi penyelenggaraan pariwisata budaya tetap mengacu pada prinsip yang ada serta dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten.

Penyelenggaraan pariwisata budaya bisa berhasil jika proses pemantauan dan evaluasi dilaksanakan oleh stakeholder dengan cara partisipasi yang melibatkan seluruh pihak. Pemantauan dan evaluasi juga harus dilakukan secara periodik pada tingkatan implementasi, dilakukan secara periodik pada setiap tingkatan implementasi, serta menggunakan alat ukur penyelenggaraan pariwisata budaya yang meliputi kelestarian lingkungan sosial dan budaya, penguatan kondisi sosial-budaya dan peningkatan ekonomi masyarakat.

2.12.4. Tujuan Pengembangan Objek Wisata Budaya

- a. Melestarikan dan memanfaatkan warisan budaya serta memberikan cerminan perkembangan sejarah perjuangan bangsa dan peradaban manusia.
- b. Membuka peluang masyarakat luas untuk berperan aktif dalam proses pembangunan kebudayaan nasional dan menikmati hasil-hasilnya.
- c. Mendokumentasikan, meneliti dan menginfokan seni, ilmu dan religiserta sebagai puast rekreasi.
- d. Bertindak sebagai media pembinaan seni, ilmu dan religi dengan menjabarkan nilai-nilai falsafah yang terkandung dalam histori budaya tersebut yang sarat dengan etikamoral dan pedoman-pedoman hidup.
- e. Pembinaan generasi muda akan pentingnya pelestarian budaya yang merupakan kebanggaan dan kekayaan daerah.

2.13 Konsep, Jenis, Kriteria Pembangunan Tepi Air (*Waterfront*)

2.13.1 Konsep Pembangunan Tepi Air (*Waterfront*)

Konsep pembangunan tepi air adalah konsep pengembangan daerah tepian air baik itu tepi pantai, sungai ataupun danau. Pengertian “*waterfront*” dalam Bahasa Indonesia secara harafiah adalah daerah tepi laut, bagian kota yang berbatasan dengan air, daerah pelabuhan. Danisworo (2002) dalam Echols (2003).

Konsep pembangunan tepi air juga dapat diartikan suatu proses dari hasil pembangunan yang memiliki kontak visual dan fisik dengan air dan bagian dari upaya pengembangan wilayah perkotaan yang secara fisik alamnya berada dekat dengan air dimana bentuk pengembangan pembangunan wajah kota yang terjadi berorientasi kearah perairan. Kawasan tepi air adalah area yang dibatasi oleh air

dari komunitasnya yang dalam pengembangannya mampu memasukkan nilai manusia, yaitu kebutuhan akan ruang publik dan nilai alami. Kawasan tepi air merupakan lahan atau area yang terletak berbatasan dengan air seperti kota yang menghadap ke laut, sungai, danau atau sejenisnya.

Prinsip perancangan *waterfront city* adalah dasar-dasar penataan kota atau kawasan yang memasukkan berbagai aspek pertimbangan dan komponen penataan untuk mencapai suatu perancangan kota atau kawasan yang baik. Banyaknya jumlah kota yang berada di daerah pesisir dapat menimbulkan beberapa permasalahan pada kota itu, jika tidak di tata dengan baik. Permasalahan yang dapat ditimbulkan yaitu pencemaran, kesemerawutan lingkungan, dan sampah. Kekumuhan lingkungan tersebut juga dapat menimbulkan masalah kriminalitas di daerah tersebut. Oleh karena itu, pembangunan kota pesisir di Indonesia harus memecahkan permasalahan tersebut.

2.13.2 Jenis-Jenis Tepi Air (*Waterfront*)

Berdasarkan tipe proyeknya, *waterfront* dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu:

1. Konservasi adalah penataan waterfront kuno atau lama yang masih ada dan menjaganya agar tetap dinikmati masyarakat.
2. Pembangunan Kembali adalah upaya menghidupkan kembali fungsi-fungsi waterfront lama yang sampai saat ini masih digunakan untuk kepentingan masyarakat dengan mengubah atau membangun kembali fasilitas-fasilitas yang ada.
3. Pengembangan adalah usaha menciptakan waterfront yang memenuhi kebutuhan kota saat ini dan masa depan.

Berdasarkan fungsinya, *waterfront* dapat dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu:

1. *Mixed-used waterfront*, adalah waterfront yang merupakan kombinasi dari perumahan, perkantoran, restoran, pasar, rumah sakit, dan/atau tempat-tempat kebudayaan.
2. *Recreational waterfront*, adalah semua kawasan waterfront yang menyediakan sarana-sarana dan prasarana untuk kegiatan rekreasi, seperti taman, arena bermain, tempat pemancingan, dan fasilitas untuk kapal pesiar.
3. *Residential waterfront*, adalah perumahan, apartemen, dan resort yang dibangun di pinggir perairan.
4. *Working waterfront*, adalah tempat-tempat penangkapan ikan komersial, reparasi kapal pesiar, industri berat, dan fungsi-fungsi pelabuhan.

2.13.3 Kriteria Tepi Air (*Waterfront*)

Dalam menentukan suatu lokasi tersebut waterfront atau tidak maka ada beberapa kriteria yang digunakan untuk menilai lokasi suatu tempat apakah masuk dalam waterfront atau tidak. Berikut kriteria yang ditetapkan:

1. Berlokasi dan berada di tepi suatu wilayah perairan yang besar (laut, danau, sungai, dan sebagainya). Biasanya merupakan area pelabuhan, perdagangan, permukiman, atau pariwisata.
2. Mempunyai fungsi-fungsi utama sebagai tempat rekreasi, permukiman, industri, atau pelabuhan.
3. Dominan dengan pemandangan dan orientasi ke arah perairan.
4. Pembangunannya dilakukan ke arah vertikal horizontal.

2.14 Studi Kasus Proyek Sejenis

1. Revitalisasi Goedang Ransoem, Sawahlunto, Sumatera Barat

Museum Gedung Ransum didirikan pada tahun 1918. Dulunya museum ini dibangun untuk dijadikan dapur umum, tempat memasak untuk memenuhi kebutuhan makanan bagi para buruh tambang. Pada saat dapur umum ini dibangun, Pemerintah Kolonial sudah memanfaatkan kemajuan teknologi untuk memasak, yaitu dengan menggunakan teknologi uap panas. Sejak tahun 1945, Dapur Umum tidak lagi efektif sebagai penyedia kebutuhan makanan bagi pegawai tambang. Tempat tersebut diambil alih oleh Tentara Kedaualatan Republik Indonesia (TKRI). Pada tahun 1948, dapur umum kembali beralih fungsi menjadi tempat memasak makanan bagi tentara Belanda. Aktivitas memasak di dapur umum berhenti sejak tahun 1950. Pada tahun 1950-1960, Dapur Umum dimanfaatkan sebagai tempat penyelenggaraan Administrasi PT. BO, kemudian beralih bangunan ini berubah fungsi menjadi tempat pendidikan formal setingkat SMP pada tahun 1970-2005. Hingga sekarang, bangunan ini difungsikan menjadi tempat hunian bagi karyawan tambang (www.wisatakandi.com).

Melihat latar belakangnya, bekas dapur umum tersebut begitu banyak menyimpan sejarah perjalanan Kota Sawahlunto. Seiring visi dan misi Pemerintah Daerah yang mencanangkan, bahwa pada tahun 2020, Sawahlunto menjadi Kota Wisata Tambang yang Berbudaya, maka bekas dapur umum ini ditetapkan menjadi Museum Gudang Ransum oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Jusuf Kalla (www.wisatakandi.com).

2. Revitalisasi Gedung Arsip Nasional, Jakarta

Bangunan ini yang awalnya adalah rumah tinggal seorang petinggi VOC bernama Reinier de Klerk yang merupakan Gubernur-Jendral Hindia-Belanda XXXI. Rancangan dasar kompleks bangunan ini dibuat sendiri oleh de Klerk. Bangunan utamanya mengikuti model closed Dutch style atau Indische Woonhuizen dengan ciri tanpa beranda, baik di bagian depan maupun di belakangnya. Konon model ini sesuai untuk rumah di daerah tropis. Jendela-jendela berukuran besar dan jumlahnya relatif banyak merupakan ciri lain dari rumah tropis di samping langit-langit yang tinggi. Sepeninggal de Klerk bangunan ini telah berganti-ganti kepemilikannya. Sampai akhirnya pada tahun 1925, setelah dipakai untuk kantor dinas pertambangan, pemerintah memutuskan untuk menjadikannya Landsarchief atau Arsip Negara.

Berbagai perbaikan dilakukan, taman-taman di bagian depan dan belakang rumah induk dikembalikan seperti semula. Paviliun diperbaiki untuk menyesuaikan dengan fungsi barunya. Setelah pengakuan kedaulatan RI oleh pemerintah Belanda pada 1949, Arsip Negara diubah menjadi Kantor Arsip Negara yang berada di bawah Departemen PP&K. Pada 1961 diubah lagi menjadi Gedung Arsip Nasional hingga sekarang. Namun seiring usianya yang semakin menua, perlahan-lahan gedung mulai mengalami pelapukan di sana sini, terutama yang berbahan kayu. Sistem drainase yang dirancang sebelumnya sudah tidak lagi memadai. Sehingga ketika terjadi hujan, air menggenang di sekitar bangunan. Keadaan lingkungan di kiri-kanan yang padat bangunan, di sepanjang Jl. Gajah Mada, ikut menyebabkan genangan itu. Melihat kondisi yang demikian itu sejumlah pengusaha asal Belanda di Jakarta tergerak untuk melakukan

pemugaran demi pelestariannya. Maka pada 1993 dibentuklah Stichting Commite Cadeau Indonesie (SCCI) atau Yayasan Komite Hadiah Indonesia di Belanda, yang bertugas menghimpun dana. Revitalisasi dan renovasi melibatkan perusahaan konsultan dan kontraktor utama, yakni PT Han Awal Architects & Partners, Budi Liem Architects & Partners, PT Decorient-Balast Joint Operation Project, dan PT MLD (Belanda). Dalam proyek ini dilibatkan juga ahli-ahli lain, di antaranya beberapa arkeolog dari Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala (Ditbinjarah), Dirjen Kebudayaan, Depdikbud RI. Pemugaran bangunan diarahkan ke kondisi sebelum 1925, yang tidak lain adalah bangunan yang didirikan de Klerk.

Sebab, ketika masih sebagai Landsarchief pada 1925, beranda pada kedua paviliun di belakang rumah induk ditutup untuk kepentingan penyimpanan arsip. Sekarang setelah mengalami renovasi, kompleks Gedung Arsip Nasional mengalami banyak sekali perubahan, selain aspek fisik yaitu tampilan bangunan yang mengalami peremajaan, aspek fungsi bangunan juga mengalami penambahan. Selain dapat difungsikan sebagai tempat penyimpanan dokumen dokumen bersejarah, bangunan ini juga dapat dijadikan sebagai salah satu obyek wisata sejarah di Jakarta, bahkan ada yang pernah juga menggunakan sebagai tempat resepsi pernikahan.

3. Revitalisasi Gedung Merdeka, Bandung

Museum Konferensi Asia Afrika (KAA) merupakan museum khusus untuk mengabadikan Konferensi Asia Afrika (KAA) yang berlangsung pada tahun 1955 di Gedung Merdeka. KAA berperan besar bagi perjuangan kemerdekaan

negera-negera Asia dan Afrika yang pada waktu itu berada dalam kolonisasi bangsa Eropa. Museum KAA telah terdaftar dalam Peraturan Daerah No. 19 Tahun 2009 sebagai salah satu Bangunan Cagar Budaya di Kota Bandung. Museum KAA terletak di Jalan Asia Afrika No. 65 Bandung. Bangunan yang sekarang berfungsi sebagai Museum KAA dibangun pada tahun 1895. Pada tahun tersebut tempat ini hanya berupa bangunan sederhana, yang sebagian dindingnya terbuat dari papan dan penerangan dalamnya memakai lentera minyak tanah. Bangunan ini berada di sudut jalan Groote Postweg (sekarang Jalan Asia Afrika) dan Bragweg (sekarang Jalan Braga).

Sisi sebelah kanannya berdekatan dengan kali Tjikapoendoeng (Cikapundung) yang sejuk karena banyak ditumbuhi pohon rindang (<http://asianafrican-museum.org/>). Pada tahun 1921, dilakukan pembenahan pada gedung tersebut agar lebih menarik, yaitu dengan cara merenovasi bagian sayap kiri bangunan oleh perancang C.P. Wolf Schoemaker dengan gaya arsitektur Art Deco. Gedung ini berubah wajah menjadi gedung pertemuan super club yang paling mewah, lengkap, eksklusif dan modern di Nusantara (<http://asianafrican-museum.org/>). Societeit Concordia kembali mengalami perombakan pada tahun 1940 dengan gaya arsitektur International Style oleh Arsitek A. F. Albers. Bangunan gaya arsitektur ini bercirikan dinding tembok plesteran dengan atap mendatar, tampak depan bangunan terdiri dari garis dan elemen horizontal, sedangkan bagian gedung bercorak kubisme (<http://asianafrican-museum.org/>). Pada masa pendudukan Jepang, bangunan utama gedung ini berganti nama menjadi Dai Toa Kaikan yang digunakan sebagai pusat

kebudayaan. Sedangkan bangunan sayap kiri gedung diberi nama Yamato yang berfungsi sebagai tempat minum-minum, yang kemudian terbakar (1944).

Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia (17 Agustus 1945), gedung ini dijadikan markas pemuda Indonesia menghadapi tentara Jepang dan selanjutnya menjadi tempat kegiatan Pemerintah Kota Bandung. Pada masa pemerintahan presiden pertama (1946 – 1950), fungsi gedung dikembalikan menjadi tempat rekreasi. Menjelang Konferensi Asia Afrika, gedung itu mengalami perbaikan dan diubah namanya oleh Presiden Indonesia, Soekarno, menjadi Gedung Merdeka pada 7 April 1955. Setelah terbentuk Konstituante Republik Indonesia sebagai hasil pemilihan umum tahun 1955, Gedung Merdeka dijadikan Gedung Konstituante. Ketika konstituante dibubarkan melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959, gedung ini dijadikan tempat kegiatan Badan Perancang Nasional (Bapenas), kemudian diubah menjadi Gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) dari tahun 1960-1971. Pada 1965, di gedung tersebut berlangsung Konferensi Islam Afrika Asia (<http://asianaffrican-museum.org/>). Setelah meletus pemberontakan G30S tahun 1965, Gedung Merdeka dikuasai oleh instansi militer dan sebagian dari gedung tersebut dijadikan tempat tahanan politik.

Pada 1966, pemeliharaan gedung diserahkan dari pemerintah pusat ke Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Barat, yang selanjutnya diserahkan lagi pelaksanaannya kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Kotamadya Bandung. Tahun 1968, MPRS mengubah surat keputusannya dengan ketentuan bahwa yang diserahkan adalah bangunan induk gedung, sedangkan bangunan-bangunan lainnya yang terletak di bagian belakang masih tetap menjadi tanggung jawab MPRS. Tahun 1969, pengelolaan gedung diambil alih kembali oleh

Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Barat dari Pemerintah Daerah Tingkat II Kotamadya Bandung (<http://asianafrican-museum.org/>). Pada Peringatan Konferensi Asia-Afrika ke-25, 8 April 1980, bangunan sayap Gedung Merdeka diresmikan sebagai Museum Konferensi Asia Afrika. Gedung Merdeka dan Museum KAA berada dibawah otoritas Kementrian Luar Negeri, adapun masalah pengelolaan dan pemeliharaan diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Fitriyani, 2014).

2.15 Sintesa Teori

Dari hasil yang dijelaskan pada teori-teori diatas akan dirangkum dalam satu tabel sebagai kemudahan pengambilan kesimpulan, untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2.1 Sintesa Teori

No	Tinjauan Pustaka	Sumber Pustaka	Keterangan
1	Revitalisasi	Danisworo (2002) dan Piagam Burra (1988)	Pengertian Revitalisasi: 1. Revitalisasi adalah upaya untuk memvitalkan kembali suatu kawasan atau bagian kawasan yang dulunya pernah vital/hidup, akan tetapi kemudian mengalami kemunduran/degradasi. 2. Revitalisasi adalah menghidupkan kembali kegiatan sosial dan ekonomi bangunan atau lingkungan bersejarah yang sudah kehilangan vitalitas fungsi aslinya, dengan memasukkan fungsi baru ke dalamnya sebagai daya tarik, agar bangunan atau lingkungan tersebut menjadi hidup kembali.
2	Kawasan Bersejarah	Budiharjo, (1993) dalam Ilham Irawan (2016)	Kawasan bersejarah adalah suatu kawasan yang mampu memberikan gambaran tentang sejarah masa lalu dan di dalamnya memiliki nilai budaya yang tinggi yang sudah sewajarnya harus di jaga kelestariannya.
3	Cagar Budaya	Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010	Warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
4	Kriteria kawasan bersejarah	Danisworo (2002)	Indikasi kawasan dapat di nilai sebagai suatu kawasan bersejarah warisan budaya antara lain adalah: 1. kawasan bersejarah merupakan kawasan yang pernah menjadi pusat-pusat dari komplektifitas fungsi dan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya yang mengakumulasi makna historis di dalamnya. 2. kawasan bersejarah adalah kawasan yang mampu mengakumulasi nilai-nilai makna kultural.
5	Karakteristik Bangunan Bersejarah	Akbar <i>et al</i> (2017)	Karakteristik bangunan kuno didasarkan pada usia bangunan, fungsi bangunan, status kepemilikan bangunan, bentuk/arsitektur bangunan serta titik persebaran bangunan.
6	Pelestarian kawasan bersejarah	Budiraharjo (1993)	Pelestarian kawasan bersejarah adalah segenap proses konservasi, interpretasi, dan manajemen terhadap suatu kawasan agar makna cultural yang terkandung dapat terpelihara dengan baik. Dalam sebuah pelestarian kawasan cagar budaya perlu disediakan kesempatan kepada masyarakat yang bertanggung jawab kultural terhadap kawasan tersebut untuk ikut berpartisipasi dalam proses pelestarian.
7	Lingkup objek pelestarian	Shankland (2000) dalam Muchamad dan Mentayani (2004)	Pada kawasan kota objek dan lingkungan pelestarian digolongkan dalam beberapa luasan, antara lain; 1. Satuan Areal, yaitu berwujud sub wilayah. 2. Satuan Pandang atau View, berupa aspek visual yang memberikan bayangan mental (<i>image</i>) antara lain, <i>path</i> ,

			<i>edge, node, distric, dan landmark.</i> 3. Satuan Fisik, berwujud bangunan, sederetan bangunan, bahkan unsur bangunan seperti struktur, ornamen dan lainnya.
8	Pelestarian	Piagam Pelestarian Pusaka Indonesia (2003)	Upaya pengelolaan pusaka melalui kegiatan penelitian, perencanaan, perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan, pengawasan, dan/atau pengembangan secara selektif untuk menjaga kesinambungan, keserasian, dan daya dukungnya dalam menjawab dinamika jaman untuk membangun kehidupan bangsa yang lebih berkualitas.
		Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 Cagar Budaya	Upaya dinamis untuk mempertahankan cagar budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan dan memanfaatkannya.
		Antariksa (2017)	Upaya untuk melindungi dan menjaga bangunan dan lingkungan dari kerusakan ataupun mencegah terjadinya kerusakan sehingga sehingga makna kulturalnya yang mengandung nilai sejarah arsitektural, keindahan, nilai keilmuan dan nilai sosial tetap dapat terpelihara untuk generasi mendatang
9	Kategori Objek Pelestarian	Antariksa (2017)	1)Objek religius berupa peninggalan arsitektur atau nilai artistik yang berbeda dalam suatu periode sejarah. 2)Bangunan atau bentuk struktur yang telah dipindahkan dari lokasi eksisting yang memiliki nilai signifikan dalam arsitektur atau bentuk struktur yang masih bertahan terkait dalam peristiwa sejarah tokoh tertentu. 3)Tempat kelahiran atau makam tokoh terkenal dalam sejarah, dalam catatan tidak ada tempat atau bangunan yang terkait dengan riwayat hidupnya. 4)Tempat pemakaman dari tokoh penting; dari zaman tertentu, keunikan desai, atau berkaitan dengan peristiwa sejarah tertentu. 5)Bangunan hasil rekonstruksi dan merupakan satu-satunya bangunan yang dapat diselamatkan. Objek berusia 50 tahun yang memberi nilai yang cukup signifikan atau pengecualian yang di anggap penting

Sumber: Hasil Analisis, 2018

2.16 Keaslian Penelitian

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis:



Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul	Tujuan	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Oktavia Altika Dewi, Antarksa, Kartika Eka Sari	Zonasi Kawasan dan Golongan Bangunan Kuno Untuk Pelestarian Kawasan di Kota Pasuruan.	Kota Pasuruan	<i>Visual Absorption Capability</i> (VAC)	Terdapat 19 bangunan kuno bersejarah yang berada di zona inti, 7 bangunan kuno bersejarah di zona pengembangan, 5 bangunan kuno bersejarah di zona pemanfaatan, 7 bangunan kuno bersejarah di zona sarana-prasarana.
2.	Iskandar Zulkarnain (2010)	Studi penyusunan kriteria perencanaan pelestarian kawasan bersejarah sunda kelapa menggunakan metode analytical hierarchy process (AHP)	• Permasalahan sirkulasi kondisi jalan, pembongkaran . • Permasalahan bangunan-bangunan kuno dan pertumbuhan bangunan baru secara sporadis. • Permasalahan berkurangnya ruang-ruang terbuka kota baik secara jumlah maupun ukuran.	Metode analisis <i>Analytical Hierarchy Process</i> (AHP) dan Metode expert choice yaitu metode yang dilakukan untuk mengolah masukan dari informan yang diperoleh dengan menggunakan <i>indeep interview</i> .	Kriteria utama yang harus diperhatikan: • Aspek peraturan dan tujuan dari kegiatan pelestarian. • Pelestarian bangunan dapat lebih terarah dan sesuai dengan harapan banyak pihak.
3.	Jefrizon dan Dosen P. DR. Rimadewi S, MIP (2011)	Arahan Revitalisasi kawasan cagar budaya kota lama siak.	• Penurunan vitalitas kawasan di wilayah studi akibat dari penuaan kawasan • Menurunnya aktivitas serta kualitas fisik kawasan yang belum mendukung terhadap	Deskriptif dengan teknik pengumpulan data Observasi dan	• Pada kawasan cagar budaya kota lama Siak harus dilakukan revitalisasi kawasan sehingga kawasan tersebut kembali berfungsi seperti sedia kala dan pengembangan kawasan tersebut sehingga mencakup segala aspek baik fisik, sosial budaya dan ekonomi sehingga dapat menjadi tujuan wisata dan

No.	Nama Peneliti	Judul	Tujuan	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
			kelestarian kawasan	Wawancara	membangkitkan ekonomi masyarakat.
4.	Refni Yulia, SS, M.Hum, Meri Erawati, SS,M.Hum, Prof. Phil. Gusti Asnan, DR. Nopriyasman, M.Hum. (2107)	Revitalisasi Kawasan Kota Padang Sebagai Salah Satu Alternatif Wisata Sejarah di Kota Padang	• Status kepemilikan bangunan bersejarah yang sebagian besar milik swasta (perorangan), • Kurangnya sosialisasi pemerintah kepada masyarakat sebagai pemilik bangunan tua dan kekurangan dana (investor).	Metode penelitian kualitatif.	Revitalisasi kawasan kota tua Padang, sudah mendesak untuk dilaksanakan karena kalau terus diulur-ulur akan menyebabkan bangunan hancur dan juga kepunahan budaya. Dewasa ini pemerintah kota Padang melalui dinas Pariwisata Kota Padang melakukan terobosan baru dengan memperbanyak event pariwisata yang bertujuan untuk mengangkat wisata kota tua. Pelaksanaan festival Siti Nurbaya yang dilakukan setiap tahun seharusnya dilakukan secara bersamaan dengan agenda wisata kota tua seperti Imlek, dan serak gulo. Dinas pariwisata kota Padang kemudian menjadikan semua tradisi itu dalam kalender wisata kota Padang yang bekerjasama dengan biro perjalanan dan juga mengandeng masyarakat sekitar kota tua sebagai pemilik kebudayaan.

No.	Nama Peneliti	Judul	Tujuan	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
5.	Volare Amanda Wirastari dan Rimadewi Suriprihardjo (2012)	Pelestarian Kawasan Cagar Budaya Berbasis Partisipasi Masyarakat (Studi Kasus: Kawasan Cagar Budaya Bubutan, Surabaya)	Kota Surabaya	Deskriptif Kualitatif dan teknik <i>purposive sampling</i>	Terdapat tujuh cluster kawasan cagar budaya di Bubutan yaitu Kamung Praban, Kampung Temanggung, Kampung Alun-Alun Contong, Kampung Kawatan, Kampung Maspatih, Kampung Tambak Bayan dan Kepatihan, dan Kampung Kraton. Adapun bentuk partisipasi yang diarahkan untuk ketujuh kampung tersebut berbeda-beda sesuai dengan kondisi eksisting yang ada. Bentuk partisipasi masyarakat yang ada perlu dibentuk jaringan dalam masyarakat itu sendiri. Pemberdayaan masyarakat dapat dimulai dari RT/RW setempat, tokoh masyarakat, ataupun kerjasama dengan pihak lain yang memiliki interest dalam bidang cagar budaya.
6.	Oktavia Altika Dewi, Antariksa, Kartika Eka Sari	Zonasi kawasan dan golongan bangunan kuno untuk pelestarian kawasan di kota pasuruan.	• Peraturan Daerah tentang Bangunan Cagar Budaya tidak menyebutkan jumlah bangunan yang dilestarikan, nama atau identitas bangunannya. Selain itu juga tidak disebutkan jenis-jenis pelestarian yang dapat diterapkan di Kota Pasuruan. • Belum adanya zonasi cagar budaya di Kota Pasuruan sehingga mempersulit kegiatan pelestarian bangunan kuno.	Analisis evaluatif <i>development</i>	Hasil analisis <i>Visual Absorption Capability</i> (VAC) menunjukkan bahwa sebanyak empat zona yang dapat diterapkan di kawasan bangunan kuno di Kota Pasuruan, yaitu: • Zona inti, • zona pengembangan <i>heritage</i>, • zona pemanfaatan <i>heritage</i> dan zona sarana-prasarana <i>heritage</i>. Selain itu untuk jenis pelestarian bangunan yang dapat diterapkan untuk pelestarian bangunan kuno, yaitu jenis preservasi sebanyak 5 bangunan, restorasi sebanyak 12 bangunan, rehabilitasi sebanyak 2 bangunan atau rekonstruksi sebanyak 3 bangunan, revitalisasi sebanyak 12 bangunan atau adaptasi sebanyak 2 bangunan dan demolisis sebanyak 2 bangunan.

Sumber: Hasil Analisis, 2018

Penelitian Terdahulu ini merupakan suatu syarat sebagai keabsahan suatu karya ilmiah yang dapat ditinjau dari ide dasar penelitian dan perbandingan penelitian dengan penelitian yang sejenis lainnya. Adapun keabsahan penenilaian tentang “Revitalisasi Kawasan Bersejarah pada Daerah Tepi Air di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak (Studi Kasus: Desa Benteng Hulu, Desa Kampung Tengah, dan Desa Benteng Hilir) dapat dilihat melalui beberapa kajian yang sudah ada sebelumnya.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metode berasal dari kata “*methodos*” yang terdiri dari kata “*Methoda*” yaitu melewati, menempuh atau melalui dan kata “*hodos*” yang berarti cara atau jalan. Metode artinya cara atau jalan yang akan dilalui atau ditempuh. Sedangkan menurut istilah metode ialah cara atau jalan yang harus ditempuh untuk mencapai sebuah tujuan.

Metodologi secara bahasa berasal bahasa Yunani yaitu “*methodos*” dan “*logos*” berarti ilmu atau bersifat yang ilmiah. Jadi metodologi adalah ilmu atau cara yang digunakan untuk memperoleh suatu kebenaran dengan menggunakan penelusuran dengan urutan atau tatacara tertentu sesuai dengan apa yang dikaji atau diteliti secara ilmiah.

3.1 Metodologi Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan memperlihatkan masalah yang akan dikaji. Dalam hal ini akan digunakan metode survey lapangan, yang merupakan penelitian untuk memperoleh data atau keterangan dalam suatu wilayah tertentu. Dengan demikian akan didapatkan suatu gambaran yang jelas mengenai wilayah tersebut. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif terhadap hal-hal yang berpengaruh terhadap revitalisasi kawasan bersejarah diantaranya pendekatan karakteristik fisik, pendekatan tata ruang makro terhadap fungsi-fungsi kawasan sekitarnya. Perpaduan metode kualitatif diharapkan mampu mendapatkan data akurat yang saling mendukung dan melengkapi.

3.2 Lokasi & Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dalam kajian ini adalah Kecamatan Mempura Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Berikut adalah waktu dan tahapan penelitian:

Tabel 3.1
Waktu Penelitian

No.	Tahap & Kegiatan Penelitian	Bulan								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Persiapan penyusunan proposal penelitian									
2.	Bimbingan pengurusan proposal penelitian									
3.	Seminar proposal									
4.	Pengumpulan data									
5.	Pengelolaan dan analisis data									
6.	Penyusunan laporan hasil penelitian									
7.	Bimbingan laporan hasil penelitian									
8.	Seminar hasil									
9.	Ujian kompresip									

Sumber: Hasil Rencana, 2018

3.3 Metode Penelitian

3.3.1 Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif

Penelitian deskriptif kualitatif merupakan salah satu dari jenis penelitian yang termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi. Penelitian ini menafsirkan dan menguraikan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi di dalam suatu masyarakat, pertentangan antara dua keadaan atau lebih,

hubungan antar variable yang timbul, perbedaan antar fakta yang ada serta pengaruhnya terhadap suatu kondisi, dan sebagainya (Prasetyo, 2016).

Metode penelitian deskriptif kualitatif digunakan untuk menganalisa karakteristik kawasan bersejarah yang ada di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak. Dan melihat secara langsung pada lapangan kondisi bangunan bersejarah tersebut serta mendeskripsikan bangunan-bangunan bersejarah tersebut melalui observasi dan wawancara dengan masyarakat sekitar.

3.3.2 Metode Penelitian Deskriptif Kuantitatif

Menurut Syamsudin & Damiyanti (2011) dalam Bintara (2014) Penelitian Deskriptif Kuantitatif merupakan penelitian yang bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk mencandarkan karakteristik individu atau kelompok.

Metode penelitian deskriptif kuantitatif digunakan untuk menilai bangunan-bangunan bersejarah yang ada di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak dengan variabel-variabel yang telah ditentukan. Setiap variabel mempunyai nilai-nilai tersendiri sesuai dengan katagori informasi yang berkaitan dengan variabel tersebut.

3.4 Teknik *Purposive Sampling*

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi, karena penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu dan hasil kajiannya tidak diberlakukan ke populasi, tetapi ditransferkan ketempat lain

pada situasi sosial pada kasus yang dipelajari. Sampel dalam penelitian ini dinamakan informan penelitian.

Data yang diperoleh oleh penulis ditentukan dengan langsung terjun kelapangan yang diperoleh langsung dari informan penelitian yang menjadi objek penelitian. Penentuan Informan dalam penelitian ini dengan teknik *sampling* yang bersifat *purposive*. Menurut Sugiyono (2010) *purposive sampling* adalah teknik untuk menentukan sampel penelitian dengan beberapa pertimbangan tentu yang bertujuan agar data yang diperoleh nantinya bisa lebih representatif. Hasil penelitian tidak akan digeneralisasikan ke populasi karena pengambilan sampel tidak diambil secara random. Proses penentuan besar sampel tidak dapat ditentukan sebelumnya akan tetapi ditentukan oleh pertimbangan informasi.

Berdasarkan penjelasan diatas informan dalam penelitian ini adalah orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan, atau mungkin orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan, atau mungkin orang yang sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek yang diteliti (Sugiyono, 2016). Informan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti dan memberikan informasi yang memadai berkaitan dengan segala aspek yang relevan dengan kegiatan revitalisasi kawasan bersejarah yang ada di Kecamatan Mempura.

Sebagai informan sebaiknya yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Mereka yang menguasai atau memahami sesuatu melalui proses akulturasi, sehingga sesuatu itu bukan sekedar diketahui tetapi juga dihayatinya

2. Mereka yang tergolong masih sedang berkecimpung atau terlibat pada kegiatan yang tengah diteliti
3. Mereka yang mempunyai waktu yang memadai untuk dimintai informasi
4. Mereka yang tidak cenderung menyampaikan informasi hasil “kemasannya” sendiri
5. Mereka yang mulanya tergolong “cukup asing” dengan peneliti sehingga lebih menggairahkan untuk dijadikan semacam guru atau narasumber.

Berdasarkan kriteria informan, terdapat beberapa informan penelitian yang sengaja dipilih dan ditentukan peneliti sebagai sumber data. Subyek-subyek penelitian tersebut adalah:

1. Unsur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata: Kepala Sub Bidang Cagar Budaya Kabupaten Siak.
2. Unsur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: Kepala Seksi Penataan Bangunan Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Siak
3. Unsur Terkait
 - a. Lembaga Adat Melayu Kecamatan Mempura
 - b. Masyarakat dan Sejarahwan Kecamatan Mempura
 - c. Pemilik Bangunan Bersejarah

Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2
Informan Penelitian

No	Unsur						
1.	Unsur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Siak: Kepala Sub Bidang Cagar Budaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Siak						
2.	Unsur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Siak: Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Siak						
3.	Unsur Terkait <table border="1"> <tr> <td>a.</td> <td>Lembaga Adat Melayu Kabupaten Siak</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Sejarahwan Kabupaten Siak</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>Pemilik Bangunan Bersejarah</td> </tr> </table>	a.	Lembaga Adat Melayu Kabupaten Siak	b.	Sejarahwan Kabupaten Siak	c.	Pemilik Bangunan Bersejarah
a.	Lembaga Adat Melayu Kabupaten Siak						
b.	Sejarahwan Kabupaten Siak						
c.	Pemilik Bangunan Bersejarah						

Sumber: Hasil Analisis, 2018.

3.5 Jenis Data

Menurut jenis datanya penelitian ini terbagi atas dua jenis data yaitu sebagai berikut ini:

1. Data Kualitatif

Data kualitatif adalah data informasi yang berbentuk kata atau kalimat verbal, bukan berupa simbol angka atau bilangan. Data kualitatif didapat melalui suatu proses menggunakan teknik analisis mendalam dan tidak bisa diperoleh secara langsung. Adapun data kualitatif yang dibutuhkan adalah:

- Gambaran umum wilayah yang meliputi data tentang batas administratif dan pembagian wilayah administrasi Kabupaten Siak.
- Profil masing-masing bangunan bersejarah.
- Data sejarah perkembangan Kecamatan Mempura.
- Tinjauan kebijakan terhadap revitalisasi kawasan bangunan bersejarah.

2. Data Kuantitatif

Data kuantitatif adalah data atau informasi yang berupa simbol angka atau bilangan. Berdasarkan angka tersebut, perhitungan secara kuantitatif dapat dilakukan untuk menghasilkan suatu kesimpulan yang berlaku umum. Adapun data kuantitatif yang dibutuhkan adalah:

- a. Gambaran umum wilayah Kecamatan Mempura yang meliputi data tentang luas wilayah administrasi.
- b. Data sebaran bangunan bersejarah di Kecamatan Mempura.

3.6 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh melalui pengamatan langsung pada lokasi penelitian. Jenis data tersebut meliputi kondisi eksisting kawasan bersejarah atau data fisik kawasan bersejarah melalui wawancara dengan masyarakat sekitar Kecamatan Mempura Kabupaten Siak.

2. Data Sekunder

Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan. Data sekunder adalah data yang sumbernya tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari instansi-instansi yang terkait dengan kebutuhan data yang diperlukan.

Adapun kebutuhan data sekunder dari instansi terkait yang dimaksud yaitu:

- a. Data kawasan bersejarah dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Siak.
- b. Gambaran umum wilayah Kabupaten Siak yang meliputi data tentang luas wilayah, batas administratif dan pembagian wilayah administrasi yang diperoleh dari kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau.
- c. Tinjauan kebijakan pemerintah terhadap bangunan bersejarah dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Siak, Dinas Bappeda, dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

3.7 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi lapangan, yaitu suatu teknik penyaringan data melalui pengamatan langsung di lapangan secara sistematis mengenai fenomena yang diteliti di lokasi penelitian.
2. Wawancara, yaitu kegiatan pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan cara menanyakan langsung pada sumber informasi dalam hal ini adalah instansi terkait yang mengetahui kondisi eksisting lokasi penelitian yaitu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Siak dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Siak.
3. Telaah pustaka, yaitu cara pengumpulan data dan informasi dengan cara membaca atau mengambil literatur laporan, jurnal, bahan seminar, bahan perkuliahan, dan sumber-sumber bacaan lainnya yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.

4. Studi dokumentasi, untuk melengkapi data maka kita memerlukan informasi dari dokumentasi yang ada hubungannya dengan obyek yang menjadi studi. Caranya yaitu dengan cara mengambil gambar, brosur objek, dan dokumentasi foto.

3.8 Teknik Analisis Data

Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini, maka metode dalam penyusunan revitalisasikawasan bersejarah pada daerah tepi air di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak adalah sebagai berikut:

3.8.1 Analisis Identifikasi Karakteristik Kawasan Bersejarah

Kawasan bersejarah dianalisis dengan analisis deksriptif melalui pengamatan dan observasi lapangan terhadap kawasan bersejarah dan penentuan karakteristik kawasan yang terdiri dari:

- a. Karakteristik fisik kawasan.
- b. Karakteristik non fisik kawasan.

-Karakteristik Sosial

-Karakteristik Ekonomi

- c. Karakteristik Lingkungan.

Sesuai dengan teori yang digunakan dan berdasarkan sumber dari penelitian yang terdahulu. Serta melihat kawasan bersejarah dilokasi studi penelitian berdasarkan Undang-Undang No.11 Tahun 2010 pasal 5 yang menyatakan bahwa benda, kawasan atau struktur cagar budaya apabila memiliki kriteria atau ciri-ciri;

- c. Berusia 50 tahun atau lebih;
- d. Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 tahun;
- e. Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan agama atau kebudayaan; dan
- f. Memiliki nilai budaya bagi penguat kepribadian bangsa.

Dengan mengidentifikasi bangunan bersejarah antara lain:

- a. Usia Bangunan
- b. Fungsi Bangunan
- c. Status Kepemilikan Bangunan
- d. Bentuk/Arsitektur Bangunan
- e. Sejarah Bangunan
- f. Karakteristik Bangunan

Penelitian ini dipadukan dengan pendekatan spasial yaitu pemetaan sebaran bangunan-bangunan bersejarah yang ada di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak dengan menggunakan aplikasi ArcGis dengan penentuan berdasarkan survei.

3.8.2 Analisis Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Revitalisasi

Dilakukan dengan analisis deskriptif berdasarkan kondisi lapangan, hasil wawancara dengan masyarakat dan dinas terkait. Kemudian data tersebut dirangkum dan dianalisis sehingga tercapainya faktor pendukung dan faktor penghambat revitalisasi di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak.

Dengan mengetahui faktor pendukung dan penghambat revitalisasi sebagai berikut:

- a. Bangunan Bersejarah
- b. Kawasan
- c. Kebijakan Pemerintah
- d. Peranan masyarakat
- e. Pendanaan/anggaran

3.9 Desain Survei

Setelah mengkaji teori dan konsep dari berbagai literatur yang ada, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk dapat mempermudah melakukan penelitian dalam menyelesaikan masalah diperlukan desain penelitian. Desain penelitian tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.13 berikut:



Tabel 3.3
Desain Survei

Tujuan	Sasaran	Variable	Indikator	Data	Sumber Data	Metode Analisis	Teknik Analisis	Output
Mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat dalam merevitalisasi Kawasan bersejarah	1. Teridentifikasi nya karakteristik kawasan bersejarah	Karakteristik Fisik Kawasan Bersejarah	- Penggunaan Lahan - Bangunan Kuno	- Penggunaan Lahan - Bangunan Kuno	Kondisi Lapangan	Kualitatif	Analisis Deskriptif	Kawasan Bersejarah di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak.
		Karakteristik non Fisik Kawasan	- Karakteristik Sosial - Karakteristik Ekonomi	- Karakteristik Sosial - Karakteristik Ekonomi	Kondisi Lapangan	Kuantitatif	Analisis Deskriptif	Karakteristik Sosial Ekonomi di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak.
		Karakteristik Lingkungan	- Topografi - Hidrologi - Iklim - Demografi	- Topografi - Hidrologi - Iklim - Demografi	Kondisi Lapangan	Kuantitatif	Analisis Deskriptif	Karakteristik Lingkungan di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak.
	2. Mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat dalam merevitalisasi Kawasan	Faktor Pendukung	- Bangunan Bersejarah - Kawasan - Kebijakan Pemerintah - Peranan Masyarakat - Pendanaan/Anggaran	- Hasil wawancara dengan pemilik bangunan bersejarah - Hasil wawancara dengan dinas-dinas terkait	Kondisi Lapangan dan Dinas Terkait	Kualitatif	Analisis Deskriptif	Faktor Pendukung Revitalisasi di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak.

	bersejarah	Faktor Penghambat	-Bangunan Bersejarah - Kawasan - Kebijakan Pemerintah - Peranan Masyarakat - Pendanaan/Anggaran	- Hasil wawancara dengan pemilik bangunan bersejarah - Hasil wawancara dengan dinas-dinas terkait	Kondisi Lapangan dan Dinas Terkait	Kualitatif	Analisis Deskriptif	Faktor Penghambat Revitalisasi di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak.
--	------------	-------------------	---	--	------------------------------------	------------	---------------------	---

Sumber: Hasil Analisis, 2019



BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Siak

Kabupaten Siak merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Riau, memiliki luas daerah 8.556,09 km². Kabupaten Siak memiliki karakteristik tersendiri dengan memiliki bagian darat dan air di sungai Siak. Hal tersebut menjadi bagian penting perkembangan Kabupaten Siak kedepannya. Perekonomian yang diidentik dengan perkebunan dan pertanian. Selain itu, saat ini telah ditetapkan sebagai kawasan budaya Benteng Mempura menjadi kawasan strategis. Hal ini didasari oleh potensi yang tinggi sebagai pusat baru yang berkembang dikawasan Kabupaten Siak, seperti pusat wisata dan permukiman.

4.1.1 Sejarah Kabupaten Siak

Sebelum Negara Republik Indonesia memproklamkan kemerdekaan, tanah yang dikenal dengan nusantara ini terdiri dari berbagai kerajaan baik kecil maupun besar. Kerajaan tersebut menempati dan memiliki kekuasaan masing-masing. Kerajaan Siak Sri Indrapura termasuk salah satu diantara kerajaan yang memiliki kedaulatan dan kekuasaan hingga ke luar dari nusantara. Menurut sejarah, kerajaan ini memiliki daerah kekuasaan sampai ke Negara tetangga yaitu Singapore, Malaysia dan Brunei Darussalam sekarang. Raja Kecil adalah nama pendiri Kerajaan Siak Sri Indrapura, Raja yang bergelar Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah putranya Raja Johor (Sultan Mahmud Syah) dengan istrinya Encik Pong. Beliau mendirikan kerajaan tersebut pada tahun 1723 M, dengan pusat kerajaan berada di Buntan, yang terletak beberapa kilo saja dari kota Siak Sri

Indrapura kearah hulu Sungai Siak. Beliau memberi nama kerajaan tersebut dengan kata Siak, konon nama Siak berasal dari nama sejenis tumbuh-tumbuhan yaitu siak-siak yang banyak terdapat di daerah tersebut.

Sebelum Kerajaan Siak berdiri, daerah Siak berada dibawah kekuasaan Kerajaan Johor. Raja yang memerintah dan mengawasi daerah ini adalah raja yang ditunjuk dan diangkat oleh Sultan Johor. Namun hampir 100 tahun daerah ini tidak ada yang memerintah, namun daerah ini diawasi oleh Syahbandar yang ditunjuk untuk memungut cukai hasil hutan dan hasil laut.

Setelah mangkatnya Raja Johor Mahmud Syah II, maka tampuk Kerajaan Johor diduduki oleh Datuk Bendahara tun Habib yang bergelar Sultan Abdul Jalil Riayat Syah. Setelah Raja Kecil dewasa, pada tahun 1717 Raja Kecil bersama para bala tentara yang dibawanya dari kerajaan Pagaruyung berhasil merebut tahta Kerajaan Johor. Tetapi tahun 1722 Kerajaan Johor tersebut direbut kembali oleh Tengku Sulaiman, yang merupakan ipar dari Raja Kecil putera Sultan Abdul Jalil Riayat Syah. Dalam merebut Kerajaan Johor ini, Tengku Sulaiman dibantu oleh beberapa bangsawan Bugis. Terjadilah perang saudara yang mengakibatkan kerugian yang cukup besar pada kedua belah pihak, maka akhirnya masing-masing pihak mengundurkan diri. Pihak Johor mengundurkan diri ke Pahang, dan Raja Kecil mengundurkan diri ke Bintan dan seterusnya mendirikan negeri baru di pinggir Sungai Buntan (anak Sungai Siak). Demikianlah awal berdirinya kerajaan Siak di Buntan.

Namun, pusat Kerajaan Siak tidak menetap di Buntan. Pusat kerajaan kemudian selalu berpindah-pindah dari kota Buntan pindah ke Mempura, pindah kemudian ke Senapelan di daerah Pekanbaru dan kembali lagi ke Mempura.

Semasa pemerintahan Sultan Ismail dengan Sultan Assyaidis Syarif Ismail Jalil Jalaluddin (1827-1864) pusat Kerajaan Siak dipindahkan ke kota Siak Sri Indrapura dan akhirnya menetap disana sampai akhirnya masa pemerintahan Sultan Siak terakhir. Pada masa Sultan ke-11 yaitu Sultan Assayaidis Syarief Hasyim Abdul Jalil Syaifuddin yang memerintah pada tahun 1889-1908, dibangunlah istana yang megah terletak di kota Siak dan istana ini diberi nama Istana Asseraiyah Hasyimiah yang dibangun pada tahun 1889.

Pada masa pemerintahan Sultan Syarif Hasyim, Kerajaan Siak mengalami kemajuan, terutama dibidang ekonomi. Pada masa itu pula beliau berkesempatan melawat (melakukan perjalanan) ke Eropa yaitu Jerman dan Belanda. Setelah wafat, beliau digantikan oleh putranya yang masih kecil dan sedang bersekolah di Batavia yaitu Tengku Sulung Syarif Kasim dan baru pada tahun 1915 beliau dinobatkan sebagai Sultan Siak ke-12 dengan gelar Assayaidis Syarif Kasim Abdul Jalil Syaifuddin dan terakhir terkenal dengan nama Sultan Syarif Kasim Tsani (Sultan Syarif Kasim II). Bersamaan dengan diproklamirkannya Kemerdekaan Republik Indonesia, beliau pun mengibarkan bendera merah putih di Istana Siak dan tak lama kemudian beliau berangkat ke Jawa menemui Bung Karno dan menyatakan bergabung dengan Republik Indonesia sambil menyerahkan Mahkota Kerajaan serta uang sebesar Sepuluh Ribu Gulden.

Diawal Pemerintahan Republik Indonesia, Kabupaten Siak ini merupakan Wilayah Kewedanan Siak yang merupakan bagian dari Kabupaten Bengkalis yang kemudian menjadi Kecamatan Siak. Barulah pada tahun 1999 Kecamatan Siak berubah menjadi Kabupaten Siak dengan ibukotanya Siak Sri Indrapura berdasarkan UU No. 53 Tahun 1999.



Gambar 4.1 Peta Administrasi Kabupaten Siak

4.1.2 Letak Geografis dan Batasan Wilayah

Secara geografis Kabupaten Siak terletak diantara $1^{\circ}16'30''$ LU- $0^{\circ}20'49''$ LU dan $100^{\circ}54'21''$ BT- $102^{\circ}10'59''$ BT, yang sebagian besar terdiri dari dataran rendah di bagian timur dan sebagian dataran tinggi di sebelah barat. Morfologi Wilayah Kabupaten Siak sebagian besar terdiri dari dataran, dan sebagian kecil terdiri dari perbukitan yang terletak di bagian barat daya. Morfologi dataran mencakup sekitar 60% wilayah Kabupaten Siak, morfologi perbukitan rendah terdapat dibagian utara, timur dan memanjang dari arah barat laut sampai tenggara, dan morfologi perbukitan tinggi terletak di bagian barat daya wilayah DAS Siak.

Kabupaten Siak memiliki luas 8.556,09 km² dengan pusat administrasi di Kota Siak Sri Indrapura. Dalam sistem wilayah Provinsi Riau, terdapat 4(empat) Daerah Aliran Sungai utama, yaitu DAS Indragiri, DAS Kampar, DAS Siak dan DAS Rokan. Dari keempat sungai utama tersebut, hanya DAS Siak yang memiliki hulu sungai di wilayah administrasi Provinsi Riau. Ekosistem Daerah Aliran Sungai Siak dapat dibagi menjadi daerah hulu (*up-stream*), antara (*middle-stream*) dan hilir (*down-stream*).

Daerah hulu sungai ini berfungsi sebagai penunjang dan pengatur tata air untuk daerah hilir. Oleh karena itu, ekosistem DAS hulu merupakan bagian yang penting karena mempunyai fungsi perlindungan terhadap seluruh bagian DAS. Daerah hulu menjadi fokus perencanaan pengelolaan DAS mengingat dalam suatu DAS, daerah hulu dan hilir memiliki keterkaitan biofisik melalui daur hidrologi.

Daerah ini merupakan daerah transisi mempunyai nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati (*biodiversity*) yang tinggi, yang ditunjukkan dengan keberadaan Taman Nasional, Suaka Margasatwa dan Cagar Alam yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Lindung Nasional didalam PP No. 26 Tahun 2008 tentang RTRWN.

Daerah hilir merupakan daerah dengan kemiringan lereng kecil sampai sangat kecil (<8%); pada beberapa tempat merupakan daerah banjir (genangan), pengaturan penggunaan air ditentukan oleh bangunan irigasi dan jenis vegetasi tanaman didominasi tanaman pertanian, hutan gambut dan bakau (di daerah pantai). Daerah hilir sungai (gambut) berfungsi sebagai *water table*, penampung limpasan air dalam jumlah besar dan sebagai penyekat masuknya air asin (laut) ke wilayah daratan.

Pengelolaan DAS Siak ini perlu dilakukan secara menyeluruh dan lintas wilayah kabupaten, karena kawasan hulu sungai berada di wilayah kabupaten lain di Provinsi Riau. Dengan ditetapkannya DAS Siak sebagai Wilayah Sungai Strategis Nasional didalam RTRWN, mengindikasikan bahwa ada kepentingan yang lebih tinggi (tingkat nasional) untuk meningkatkan perlindungan, pengelolaan dan pendayagunaan wilayah sungai ini baik dari aspek kelestarian fungsi dan daya dukung lingkungan (sebagai bagian pengendali sistem tata air) ataupun ekonomi (sebagai jaringan transportasi sungai dan penyeberangan). Dengan demikian diperlukan koordinasi kelembagaan pengelolaan yang lebih intensif dan sinergi antara Pemerintah Kabupaten Provinsi Riau, Kabupaten/Kota dengan pemerintah pusat. Kabupaten Siak terdiri dari satuan dataran rendah dan satuan perbukitan. Kabupaten Siak sebagian besar terdiri dari dataran rendah,

dengan ketinggian 0-50 m dari permukaan laut, meliputi dataran banjir sungai dan rawa serta terbentuk endapan permukaan. Kemiringan lereng sekitar 0° - 3° atau bisa dikatakan hampir datar. Sedangkan satuan perbukitan mempunyai ketinggian antara 50-150 m dari daerah sekitarnya, dengan kemiringan 3° - 15° dan beriklim tropis dengan suhu berkisar antara 25° - 32° Celcius. Kemiringan lereng akan sangat berpengaruh terhadap perancangan sistem drainase, karena sifat air yang mengalir menuju tempat yang rendah mengikuti hukum gravitasi. Lahan dengan kemiringan datar akan membuat perencanaan drainase dan pembuangan limbah menjadi lebih kompleks karena air cenderung sulit mengalir di tempat datar.

Jenis tanah pada umumnya terdiri dari tanah Pedzolik Merah Kuning dari batuan dan Alluvial serta tanah Organosol dan Gley Humus dalam bentuk rawa-rawa atau tanah basah. Kabupaten Siak merupakan daerah lahan gambut dan sangat rentan terhadap kebakaran lahan pada musim kemarau. Sehingga Kabupaten Siak juga sudah merupakan salah satu hot spot di Indonesia, karena merupakan langganan kebakaran setiap musim kemarau.

Kabupaten Siak beriklim tropis dengan suhu berkisar 25° - 32° Celcius. Imbangan antara curah hujan, evapotranspirasi dan aliran permukaan memberikan gambaran mengenai banyaknya air yang akan meresap membentuk air tanah. Berdasarkan grafik kesetimbangan hidrologi daerah Kabupaten Siak (laporan status lingkungan hidup Kabupaten Siak 2007), pada umumnya terjadi resapan kurang lebih 15% dari air permukaan dan 15% dari curah hujan rata-rata bulanan, dimana terjadi defisit air pada bulan Januari, Februari, Juli dan Agustus. Air tanah berwarna keruh coklat kehitaman dan secara laboratorium terlihat banyak mengandung unsur-unsur Na, SO_4 , CO_3 , HCO_3 serta zat organik (bakteri

Colliform) yang relatif sangat tinggi di banding mutu air baku. Potensi sumber daya air yang ada saat ini sudah dimanfaatkan untuk berbagai aktifitas seperti irigasi, transportasi, dan kebutuhan sehari-hari (MCK).

Secara administratif, Kabupaten Siak merupakan bagian dari Provinsi Riau yang memiliki koordinat 1°16'30" LU sampai dengan 0°20'49" LU dan 100°54'21" BT sampai dengan 102°10'59" BT memiliki batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara, berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Kepulauan Meranti.
2. Sebelah Selatan, berbatasan dengan Kabupaten Kampar, Kabupaten Pelalawan dan Kota Pekanbaru.
3. Sebelah Timur, berbatasan dengan Kabupaten Kepulauan Meranti Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Pelalawan.
4. Sebelah Barat, berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Kampar dan Kota Pekanbaru.

Kabupaten Siak meliputi 14 kecamatan, 9 kelurahan dan 122 desa. Luas wilayah Kabupaten Siak pada tahun 2018 yaitu seluas 8.556,09 km² dengan persentase kecamatan yang paling luas yaitu Kecamatan Sungai Mandau seluas 1705 km² atau sebesar 19,93%. Luas wilayah pada masing-masing kecamatan di Kabupaten Siak disajikan tabel 4.1 di bawah ini:

Tabel 4.1
Luas dan Persentase Luas Wilayah Kabupaten Siak Berdasarkan
Kecamatan Tahun 2018

No	Kecamatan	Ibukota	Luas (Km ²)	Persentase(%)
1	Minas	Minas	346,35	4,05
2	Kandis	Kandis	1493,65	17,46
3	Siak	Siak Sri Indrapura	894,17	10,45
4	Sungai Apit	Sungai Apit	1.346,33	15,74
5	Sungai Mandau	Muara Kelantan	1.705,00	19,93
6	Kerinci Kanan	Kerinci Kanan	128,66	1,50
7	Lubuk Dalam	Lubuk Dalam	155,09	1,81
8	Tualang	Tualang	343,60	4,02
9	Koto Gasib	Pangkalan Pisang	704,70	8,24
10	Dayun	Dayun	232,24	2,71
11	Bunga Raya	Bunga Raya	151,00	1,76
12	Mempura	Benteng Hilir	437,45	5,11
13	Sabak Auh	Bandar Sungai	73,38	0,86
14	Pusako	Dusun Pusaka	544,47	6,36
Jumlah			8.556,09	100,00

Sumber: Kabupaten Siak Dalam Angka 2018.

4.1.3 Kondisi Fisik Wilayah

a. Iklim

Secara umum, daerah Kabupaten Siak dan sekitarnya beriklim tropis dengan suhu udara relatif tinggi, lembab dengan curah hujan cukup tinggi. Analisis secara rinci mengenai kondisi iklim daerah Kabupaten Siak didasarkan pada catatan stasion Klimatologi Bengkalis, hal ini disebabkan tidak adanya catatan klimatologi yang lengkap dalam kurun waktu yang lama pada daerah Kabupaten Siak. Namun catatan yang dimiliki stasion klimatologi Kota Bengkalis ini diyakini dapat mewakili kondisi iklim di seluruh wilayah Kabupaten Siak.

- Curah Hujan

Selama tahun 1993, berlangsung 117 hari hujan dengan curah hujan setahun mencapai 1.965 mm, dan curah hujan rata-rata bulanan 163,8 mm.

Mengacu pada analisis data curah hujan tahun 1880-1978, di ketahui bahwa bulan basah berlangsung pada bulan Oktober-Desember, sedangkan bulan kering pada bulan Juni-Agustus. Distribusi curah hujan semakin meninggi kearah Pegunungan Bukit Barisan di bagian barat wilayah provinsi Riau Data curah hujan terlihat pada tabel 4.2.

Tabel 4.2

Data Curah Hujan Rata-Rata Bulanan 1880-1978

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nop	Des	Rata
159	131	194	257	194	130	127	160	219	273	330	291	205,4

Sumber: Kabupaten Siak Dalam Angka 2018

- Temperatur

Berdasarkan catatan data temperatur, selama bulanan $27,5^{\circ}\text{C}$ dengan rata-rata maksimum $32,8^{\circ}\text{C}$ dan minimum $22,7^{\circ}\text{C}$.

b. Hidrologi

1. Potensi Air Tanah

Secara umum potensi air tanah banyak tergantung pada kondisi litologi batuan setempat. Penyebaran potensi air tanah (Peta Hidrogeologi) terlihat pada wilayah endapan permukaan (Aluvium) memiliki potensi yang cukup besar.

- ✓ Air Tanah Dangkal

- ✓ Air Tanah Dalam

Air tanah dalam (artesis) pada daerah ini di duga pada akifer pasir kuarsa sisipan lempung pada kedalaman lebih besar dari 50 m dan memiliki ketebalan lebih besar dari 100 m. Akifer tersebut bersifat tertekan (*confined-aquifer*) dengan

lapisan penutup batu serpih karbonan. Transmisivitas akifer di wilayah ini bervariasi antara $1,7 \cdot 10^{-3}$ m²/dt sampai dengan $11,47 \cdot 10^{-3}$ m²/dt.

2. Kualitas Air Tanah

➤ Air Tanah Dangkal

Air tanah dangkal terdapat pada akifer pasir kuarsa bercampur lanau dengan ketebalan kurang dari 10 meter. Kedalaman air tanah dangkal bervariasi antara 0,20 m - 6,05 m dari permukaan tanah dan ketebalan air 0,21 m - 3,4 m. Kecepatan aliran air tanah ini diperkirakan bervariasi antara 0,864 m/hari - 12,1 m/hari atau dengan kelulusan antara $1,68 \cdot 10^{-4}$ m²/dt - $2,35 \cdot 10^{-4}$ m²/dt. Dengan memperhatikan faktor kelandaian topografi dan aliran regional, arah aliran air tanah adalah Barat - Timur. Potensi air tanah dangkal pada wilayah ini adalah 21,58 l/dt pada areal 1 km².

➤ Air tanah Dalam

Kualitas air tanah dalam (artesis) memiliki sifat yang sama dengan air tanah dangkal, walaupun secara visual terlihat relatif lebih jernih. Kandungan unsur-unsur Sodium (Na) dan Karbonat (CO₃) masih relatif lebih tinggi dari standar kualitas air minum. Walaupun demikian sudah dapat digolongkan pada air bersih. Konstruksi sumur yang kurang baik bisa juga mempengaruhi kualitas air.

3. Potensi Air Permukaan

Sumber air permukaan yang terdapat di daerah ini terdiri dari sungai dan rawa. Sungai Siak merupakan sungai utama pada daerah ini dengan aliran bulanan pada bulan kering rata-rata $123 \text{ m}^3/\text{dt}$ dan pada bulan basah rata-rata $575 \text{ m}^3/\text{dt}$. Aliran sungai ini sangat dipengaruhi oleh gerak pasang naik dan pasang surut air laut. Waktu antara pasang naik maksimum dan pasang surut minimum adalah 7,5 jam serta selang antara pasang surut minimum ke pasang naik maksimum selama 4 jam. Fluktuasi rata-rata muka air sungai Siak ini adalah 1493 mm. Air rawa tersebar di utara dan timur pada daerah ini yang merupakan dataran banjir Sungai Siak. Kedalaman rawa bervariasi antara 1-1,5 m, berada pada lapisan lempung bercampur gambut.

4. Kualitas Air Permukaan

Sumber air permukaan yang berasal dari Sungai Siak memiliki kualitas jelek dengan kandungan beberapa unsur (sodium, nitrat silikat dan zat organik) relatif tinggi di banding mutu baku air minum dan pH relatif rendah. Secara visual air yang berasal dari Sungai Siak ini keruh berwarna coklat dan berbau. Apabila air permukaan ini akan digunakan sebagai sumber air baku, diperlukan unit pengolahan air yang lengkap. Air rawa secara visual berwarna coklat dan kandungan unsur-unsur mineral sangat rendah.

c. Topografi

Bentang alam Kabupaten Siak sebagian besar terdiri dari dataran rendah di bagian Timur dan sebagian dataran tinggi di sebelah barat. Pada umumnya struktur tanah terdiri dari tanah podsolik merah kuning dari batuan, dan alluvial

serta tanah organosol dan gley humus dalam bentuk rawa-rawa atau tanah basah, Lahan semacam ini subur untuk pengembangan pertanian.

4.1.4 Nama - Nama Tempat Wisata di Kabupaten Siak

Berikut ini adalah beberapa tempat wisata sejarah dan wisata budaya yang ada di Kabupaten Siak, sebagai berikut:

a. Istana Siak

Istana Siak Sri indrapura adalah kediaman resmi Sultan Siak yang memiliki luas 32.000 meter. Istana ini sudah ada sejak tahun 1.723. Bentuk bangunan istana yang terdiri dari 2 lantai ini memiliki arsitektur bercorak Melayu, Arab, dan Eropa. Pada lantai bawah Anda dapat menemukan 6 ruangan yang difungsikan sebagai ruang tunggu tamu, ruang tamu kehormatan, ruang tamu laki-laki, ruang tamu perempuan, ruang siding kerajaan yang juga difungsikan sebagai ruang pesta.

Sementara untuk lantai atas terdiri atas 9 ruangan yang berfungsi sebagai tempat istirahat Sultan serta para tamu istana. Di bagian halaman istana, Anda dapat menemukan 8 meriam yang tersebar di berbagai sisi halaman istana. Apabila Anda pergi ke bagian kiri belakang istana, Anda akan menemukan bangunan kecil yang dulunya digunakan sebagai penjara sementara. Selain itu, Anda juga dapat melihat sebuah koleksi peninggalan kerajaan berupa perahu kuno bernama “Kapal Kato” yang dulunya digunakan Sultan untuk mengunjungi daerah-daerah kekuasaannya. Anda dapat mengunjungi

Istana Siak Sri Indrapura di Jl. Sultan Syarif Kasim, kabupaten Siak, Riau.

Bagi pengunjung yang menginap di BATIQA Hotel Pekanbaru, Anda dapat mencapai lokasi ini dalam waktu 2 jam berkendara. Memasuki bagian dalam Istana Siak Sri Indrapura, Anda akan menjumpai banyak barang peninggalan yang masih terawat dengan baik. Beberapa bahkan masih berfungsi sebagaimana mestinya. Mulai dari singgasana raja, replica mahkota raja, aneka keramik alat makan, hingga kursi kristal yang dibuat pada tahun 1896. Saat mengunjungi istana ini, pastikan menemukan peninggalan berupa cermin Kristal di salah satu sisi bangunan. Konon katanya, cermin tersebut dapat membuat selalu terlihat cantik dan awet muda. Untuk memasuki Istana Siak Sri Indrapura, Anda akan dikenakan biaya retribusi sebesar Rp 10.000/orang untuk dewasa dan Rp 5.000/orang untuk anak-anak. Istana yang kini dikelola oleh Pemda Kabupaten Siak ini buka untuk umum setiap hari pukul 09.00-17.00.

b. Masjid Sultan Syarif Hasyim

Sejak awal, Siak dikenal sebagai wilayah yang sangat religius. Kata Siak Sri Indrapura sendiri secara harfiah bermakna pusat kota raja yang taat beragama. Konon, dalam keseharian masyarakat Melayu tempo dulu, kata Siak berkaitan erat dengan orang-orang yang ahli dalam agama Islam. Oleh karenanya, seseorang yang tekun beragama dikatakan sebagai Orang Siak. Dengan citra demikian, sudah selayaknya Siak memiliki ikon yang dapat menjadi landmark wilayah. Keberadaan Masjid Sultan Syarif Hasyim yang indah dan megah

menjawab kebutuhan tersebut. Berlokasi di jantung kota, tepatnya di tepi Sungai Siak dan Jembatan Siak, masjid ini menjadi pusat perhatian pengunjung yang melintas di sana. Lima kubah besar yang didominasi warna biru dipadu kuning terlihat sangat mencolok. Model kubah tersebut banyak dipakai oleh masjid-masjid besar di Provinsi Riau. Terdapat juga menara di salah satu sudut pintu masuk area masjid.

Pintu tersebut pun cukup unik karena langsung terhubung dengan selasar yang mengelilingi masjid membentuk garis persegi panjang dan menjadi akses masuk masjid. Di tengah selasar terdapat pekarangan masjid yang, hingga buku ini diterbitkan, masih dalam proses penataan. Memasuki ruang utama masjid, akan terasa suasana lega. Atapnya yang begitu tinggi dengan plafon mengikuti bentuk kubah utama dibiarkan polos. Nuansa artistik justru muncul dari ornamen konstruksi struktur besinya. Dinding masjid banyak dihiasi lukisan kaligrafi dengan aneka warna cerah. Permainan warna ini terlihat kontras dengan plafon masjid yang didominasi warna cokelat dengan garis saling melintang yang cenderung minimalis. Bagian mihrab juga tampil semarak dengan permainan aksent geometris dan kaligrafi berwarna cerah. Ceruk mihrab yang tidak terlalu besar diisi oleh mimbar terbuat dari kayu berukir berwarna emas. Ukuran mimbar yang cukup besar menjadikan ceruk mihrab terlihat sangat penuh dan cenderung menjadi pigura mimbar. Selain keberadaan Istana Siak Indrapura sebagai objek wisata sejarah, sudah selayaknya jika Masjid Sultan Syarif Hasyim dijadikan sebagai destinasi wisata religi di tanah religius tersebut.

c. Taman Tengku Maharatu

Nama ini didedikasikan kepada permaisuri kedua Sultan Syarif Hasyim. Beliau telah berjasa mendirikan *istana limas* yakni Asrama putri bagi anak yatim piatu untuk bersekolah di latifah school, sebagai guru yang mengajarkan tata cara memasak, pelayan istana kerajaan serta beliau mendirikan juga sekolah Madrasyahtul Nisa' dan Taman Kanak- Kanak. Taman ini terbentang seluas 1.827 M2, lokasinya sangat mudah dikunjungi yakni di sekitar objek wisata Masjid Syahabuddin, Makam Koto Tinggi dan Makam Sultan Syarif Kasim II di Kota Siak. Panataan taman ini menambah keindahan suasana kota istana dan sebagai penyejuk di jantung kota Istana. Selain kita menikmati berbagai objek wisata sejarah disekitar taman Tengku Mahratu ini, para pengunjung juga dimanjakan dengan beberapa tempat peristirahatan seperti kursi taman yang disediakan dibawah pepohonan hijau untuk bersantai dan melepaskan lelah. Bagi orang tua yang membawa anaknya juga bisa menikmati berbagai permainan seperti Mobil Mobilan, Sepeda Motor Mini, Becak Mini, dan Dunia Balon dan Lain Sebagainya. Dan tidak kalah menariknya loh, pada malam harinya kita bisa menyaksikan atraksi air mancur zapin menari yang berada di sekitar taman tengku mahratu ini.

Taman air mancur ini berdiri di kawasan Taman Tengku Mahratu, persis di tepian Sungai Siak.Tepatnya di Jalan Sultan Ismail, tak jauh dari Istana Siak. Taman air mancur ini memiliki kolam yang cukup besar. Ukurannya lebih kurang 30 x 5 meter.Belasan pipa tempat pancuran air berdiri memenuhi kolam. Bila malam, air mancur ini sangat indah.Tata cahayanya begitu menarik

dengan lampu warna-warni. Air terlihat seakan menari dengan mengikuti irama lagu Zapin Berjoget maupun Mozart yang diputar.

d. Benteng Tangsi Belanda

Sebuah bangunan sisa peninggalan Belanda di Kabupaten Siak yang masih berdiri hingga kini adalah tangsi atau barak buatan Belanda. Sebuah bangunan lawas berarsitektur Eropa yang menjadi tempat berdiamnya para tentara di tengah suatu kawasan kosong. Tangsi Belanda yang ada di Siak terletak di Desa Benteng Hulu, Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak. Tepatnya tak jauh dari tepian Sungai Siak. Bangunan terlihat sangat lawas dan sudah mulai kotor. Bahkan bagian dinding bangunan sebagian sudah lapuk dan sudah banyak yang mulai runtuh. Bangunan ini diperkirakan didirikan pada kisaran abad ke 18. Tidak ada bukti sejarah yang jelas tentang kepastian kapan bangunan ini berdiri. Pada tahun 1920, bangunan ini sudah berdiri dengan megahnya, padahal saat itu Siak masih berupa hutan belantara.

Bangunan tangsi Belanda tersebut memiliki ruang-ruang kecil yang digunakan para tentara sebagai tempat penyimpanan senjata. Terdapat juga ruang penjara, ruang logistik serta ruangan kantor di dalam bangunan tersebut. Di kawasan tangsi ini pula terdapat sebuah sumur tua dengan diameter 2,5 meter. Konon di dalam sumur inilah dipendam mayat-mayat para pekerja paksa pada zaman Belanda yang umumnya merupakan warga pribumi. Menjadikan tangsi Belanda sebagai destinasi wisata untuk keluarga memang kurang tepat.

e. Balai Kerapatan Tinggi

Aliran neo klasik adalah sebuah aliran arsitektur yang berkembang di Indonesia pada zaman Hindia Belanda, aliran ini dikenalkan oleh Gubernur

Hindia Belanda yang ke-36, *Maarschalk en Gouverneur Generaal* Herman William Daendels yang memerintah dari tahun 1808 sampai dengan 1811. Bangunan dua lantai ini dibangun pada tahun 1886, tiga tahun setelah gunung Krakatau meletus di Selat Sunda, di bawah pemerintahan Sultan Hassim Abdul Jalil Saifuddin, sultan yang kesebelas dari sebuah kerajaan yang dahulunya adalah kerajaan besar di Pesisir Timur Sumatra.

Bangunan ini bernama Balai Kerapatan Tinggi. Salah satu bangunan yang berumur lebih dari seratus tahun di kota Siak. Balai kerapatan tinggi dibangun dengan cara gotong-royong yang melibatkan penduduk yang mendiami wilayah Datuk Empat Suku, yaitu Datuk Suku Tanah Datar, Datuk Suku Pesisir, Datuk Suku Lima Puluh, dan Datuk Suku Kampar. Di tahun 1937, balai ini direnovasi oleh pemerintah Hindia Belanda. Pintu masuk dari bangunan berbentuk persegi empat dengan ukuran 30.8 x 30.2 meter persegi berupa tangga yang terbuat dari beton, dengan letak pintu masuk balai kerapatan tinggi berada di tepi sungai Siak-sungai terdalam di Indonesia. Pintu keluar dari balai adalah dua buah tangga yang berbeda. Tangga besi berada di sebelah kanan, sedangkan tangga kayu berada di sebelah kiri. Tangga kayu dan besi ini memiliki makna tertentu, jika kita dinyatakan tidak bersalah dalam persidangan, kita akan turun dari tangga besi. Sedangkan jika dinyatakan bersalah dalam persidangan, kita akan turun dari tangga kayu.

f. Ekowisata Mangrove Mengkapan

Wisata Alam Ekowisata Mengkapan ini biasanya selalu ramai dikunjungi oleh wisatawan dari berbagai daerah, terutama di akhir pekan dan libur panjang seperti saat ini. Kawasan Hutan Mangrove yang dikelola oleh Kelompok

Mangrove Lestari dan PT EMP Malacca Strait S A ini memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem alam. Untuk menuju ke area wisata tersebut, ada dua jalur alternatif yang dapat ditempuh. Jalur pertama bisa melewati jalan baru Siak jika anda ingin berjalan-jalan di Kabupaten Siak terlebih dahulu. Setelah melewati jembatan Tengku Agung Sultanah Latifah anda bisa langsung menuju Kecamatan Bunga Raya. Di sepanjang perjalanan menuju Mangrove Mengkapan ini kita akan dimanjakan dengan pemandangan area persawahan yang menyejukkan mata.

Setelah itu, kita akan melintasi salah satu jembatan panjang di Teluk Masjid Kecamatan Sungai Apit yaitu Jembatan Sultan Abdul Jalil Rahmad Syah. Kemudian pada jalan yang mengarah ke pelabuhan Buton, kita akan menemukan papan petunjuk yang bertuliskan Jembatan Hitam Ekowisata Mangrove di simpang empat pelabuhan Buton. Sedangkan jika menempuh jalur alternatif, kita tidak perlu berbelok-belok dan jaraknya pun tidak sejauh jalur pertama. Jalannya hanya lurus saja melewati jalan Siak lama hingga ke simpang empat pelabuhan buton. Dari simpang empat tersebut, Desa Mengkapan tersebut terletak di sebelah kiri dengan plang yang terlihat sangat jelas. Sebelum sampai ke lokasi wisata, kita akan melewati pemukiman warga kampung mengkapan yang mayoritasnya merupakan suku melayu dan jawa.

Kawasan Ekowisata Mangrove ini berada di belakang rumah warga. Untuk mengunjungi kawasan ini tidak dipungut biaya sama sekali, cukup dengan membayar biaya parkir saja. Kawasan hutan ini memang sudah ada sejak tahun 2004 yang lalu, namun baru mulai terekspos dan dikenal luas pada tahun 2013. Berkat kegigihan masyarakat dan beberapa pihak yang membantu, Kawasan

Ekowisata Mangrove ini sekarang menjadi salah satu destinasi wisata yang cukup berpotensi. Salah satu spot menarik di sini terdapat jembatan kayu berwarna hitam yang lebih populer disebut Jembatan Hitam. Di Jembatan Hitam ini kita dapat menikmati keindahan kawasan yang memiliki pantai dan hamparan laut ini sekaligus untuk berfoto mengabadikan momen. Kawasan Ekowisata Mangrove ini juga menawarkan berbagai wisata edukasi tentang mangrove, mulai dari jenisnya, pembibitan, penanaman, dan sebagainya bagi para pengunjung.

g. Jembatan Kupu-Kupu

Sebagai destinasi wisata di Provinsi Riau, Pemkab Siak terus melakukan berbagai inovasi-inovasi baru untuk memikat hati wisatawan agar berlibur ke Negeri Istana. Demi mewujudkan semua itu, bak gadis yang mulai tumbuh remaja, Siak terus bersolek agar tampak cantik dan menarik. Tak hanya istana, masjid dan makam peninggalan Kerajaan Siak yang sudah berumur ratusan tahun serta Jembatan Tengku Agung Sultanah Latifah (Jembatan Siak, red) dan Tangsi Belanda, saat ini wisatawan yang datang ke Siak Sri Indrapura juga bisa menikmati keindahan Air Mancur Menari yang berada di samping Gedung Tengku Mahratu atau depan Istana Siak. Lalu, sembari melaksanakan salat fardu dan istirahat sejenak, wisatawan juga dapat mengunjungi Masjid Agung Sultan Syarif Hasyim nan megah yang berada di Komplek Islamic Centre Siak.

Kemudian, untuk menghabiskan waktu sore sambil menikmati mentari kembali ke peraduan, Pemkab Siak telah menyiapkan pelataran di tepian Sungai Siak. Tempat bersantai nan indah ini diberi nama Water Front City, lokasinya hanya 5 menit berjalan kaki dari Istana Siak. Wisatawan juga bisa menikmati

beraneka ragam masakan khas daerah yang tersedia disepanjang tepian Sungai Siak, biasa disebut Wisata Kuliner Turap Siak.

4.2. Gambaran Umum Wilayah Kecamatan Mempura

4.2.1. Kecamatan Mempura

Sebelumnya kawasan ini merupakan bagian dari Kesultanan Siak Sri Inderapura. Di awal kemerdekaan Indonesia, Sultan Syarif Kasim II, merupakan Sultan Siak terakhir menyatakan kerajaannya bergabung dengan negara Republik Indonesia. Kemudian wilayah ini menjadi wilayah Kewedanan Siak di bawah Kabupaten Bengkalis yang kemudian berubah status menjadi Kecamatan Siak. Pada tahun 1999 berdasarkan UU No. 53 Tahun 1999, meningkat statusnya menjadi Kabupaten Siak dengan ibu kotanya Siak Sri Indrapura.

Terbentuknya Kecamatan Mempura sebagai institusi eksekutif yang berperan menjalankan roda pemerintahan dan pemberdayaan serta pembangunan masyarakat merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah otonomi Kecamatan Mempura, merupakan aspirasi masyarakat yang bermanfaat untuk mempermudah masyarakat dalam hal pelaksanaan kepengurusan administrasi serta lebih memperdekat antara pemerintah dengan rakyat yang diperintahnya.

Pemerintah Kecamatan Mempura yang sebelumnya merupakan bagian dari Kecamatan Siak yang kemudian terpisah menjadi wilayah Kecamatan di Kecamatan Mempura. Dengan demikian potensi yang ada di Kecamatan ini secara tidak langsung lebih terangkat dengan jangkauan pemerintah yang lebih dekat, jangkauan pembangunan yang lebih baik dibandingkan dengan pemerintah yang

lama. Kecamatan Mempura yang posisi pusat pemerintahannya ada di Benteng Hilir, juga merupakan pusat pemerintahan Kecamatan Mempura.

Kecamatan Siak dimekarkan menjadi dua Kecamatan yaitu Kecamatan Mempura dan Siak yang dilaksanakan pada tahun 2008 berdasarkan pada Perda No. 04 Tahun 2008 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah . Tujuan pemekaran ini adalah untuk mempermudah masyarakat juga pemerintah dalam menjalankan hubungan administrasi, serta mempermudah jangkauan pembangunan dan pemerintahan Kecamatan.

4.2.2 Sejarah Kawasan Mempura

Kawasan Mempura terkait erat dengan sejarah Kerajaan Siak, pernah menjadi pusat Kerajaan Siak pada masa pemerintahan Sultan Siak ke- 2, Sultan Muhammad Abdul Jalil Muzaffar Syah. Ditemukan artefak berupa makam Sultan Siak ke-2 yang bergelar Tengku Buang Asmara. Pada masa pemerintahan Sultan Syarif Kasim I, Kawasan Mempura yang berpusat di koto Tinggi, Kawasan Mempura dijadikan kawasan permukiman bagi pembantu utama raja yang terdiri dari 4 orang datuk, yaitu Datuk Pesisir, datuk Lima Puluh, Datuk Tanah datar dan Datuk Kampar. Datuk-datuk ini memiliki peranan penting dalam strata pemerintahan Kerajaan siak, diantaranya memiliki hak suara dalam pemilihan Raja Kerajaan Siak.

Namun, pusat Kerajaan Siak tidak menetap di Buantan. Pusat kerajaan kemudian selalu berpindah-pindah dari kota Buantan pindah ke Mempura, pindah kemudian ke Senapelan didaerah Pekanbaru dan kembali lagi ke Mempura. Semasa pemerintahan Sultan Ismail dengan Sultan Assyaidis Syarif Ismail Jalil Jalaluddin (1827-1864) pusat Kerajaan Siak dipindahkan ke kota Siak Sri

Indrapura dan akhirnya menetap disana sampai akhirnya masa pemerintahan Sultan Siak terakhir. Pada masa Sultan ke-11 yaitu Sultan Assayaidis Syarief Hasyim Abdul Jalil Syaifuddin yang memerintah pada tahun 1889-1908, dibangunlah istana yang megah terletak di kota Siak dan istana ini diberi nama Istana Asseraiyah Hasyimiah yang dibangun pada tahun 1889.

Kecamatan Mempura terkhusus di daerah Desa Benteng Hulu, Desa Kampung Tengah, dan Desa Benteng Hilir merupakan daerah yang memiliki banyak peninggalan sejarah dan banyak bangunan-bangunan bersejarah yang masih ada sehingga berpotensi untuk menjadi destinasi wisata budaya dibandingkan dengan kecamatan lainnya yang ada di Kabupaten Siak.

a. Kependudukan di Kecamatan Mempura

Kecamatan Mempura merupakan bagian dari wilayah Kota Siak Sri Indrapura bersama dengan Kecamatan Siak. Menurut data kependudukan Kecamatan Mempura yang terdapat pada data Kecamatan Dalam Angka tahun 2018, di Kecamatan Mempura memiliki penduduk berjumlah 12.376 jiwa dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 4.3
Jumlah Penduduk per Desa di Kecamatan Mempura

No	Desa/Kelurahan	Jumlah Penduduk
1	Benteng Hulu	2.910
2	Benteng Hilir	1.972
3	Paluh	1.360
4	Kota Ringin	1.097
5	Kampung Tengah	438
6	Sungai Mempura	3.593
7	Merempan Hilir	2.129
Jumlah		12.376

Sumber : Kecamatan Mempura dalam Angka 2018.

Dari data pada tabel tersebut, Desa Sungai Mempura merupakan desa dengan jumlah penduduk terbanyak yaitu berjumlah 3.593 jiwa atau sekitar 29 % dari seluruh penduduk Kecamatan Mempura. Sedangkan Desa Kampung Tengah memiliki jumlah penduduk paling sedikit yaitu berjumlah 438 jiwa atau hanya 3% dari penduduk Kecamatan Mempura.

Tabel 4.4
Jumlah Kepala Keluarga di Kecamatan Mempura

Desa/Kelurahan	Kepala Keluarga	Penduduk	Rata-rata Penduduk per KK
Benteng Hulu	617	1.097	1,78
Benteng Hilir	367	1.360	3,71
Paluh	337	1.425	3,71
Kota Ringin	275	2.458	8,94
Kampung Tengah	74	314	4,19
Sungai Mempura	862	3.593	4,17
Merempan Hilir	561	2.129	3,80
Jumlah	3.094	12.376	4,00

Sumber : Kecamatan Mempura dalam Angka 2018.

Jika dilihat berdasarkan jumlah Kepala keluarga (KK) di Kecamatan Mempura terdapat 3.094 KK dengan rata-rata penduduk per KK 4,00. Desa kota Ringin memiliki jumlah penduduk per KK terbesar dengan jumlah penduduk per KK berjumlah 8,94.

4.2.3 Tingkat Kesuburuan Lahan di Kecamatan Mempura

Tingkat kesuburan lahan secara umum adalah sedang sebagian besar lahan pertanian digunakan untuk perkebunan. Sedangkan topografi Kecamatan Mempura secara umum adalah datar dengan sedikit berbukit-bukit.

Berikut Tabel 4.5 Kondisi Kesuburan lahan dirinci menurut Desa di Kecamatan Mempura tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel 4.5
Kondisi Kesuburan lahan dirinci menurut Desa/Kelurahan Kecamatan Mempura tahun 2018

No	Desa/Kelurahan	Kondisi Kesuburan Lahan
1	Benteng Hulu	Sedang
2	Benteng Hilir	Sedang
3	Paluh	Sedang
4	Kota Ringin	Sedang
5	Kampung Tengah	Sedang
6	Sungai Mempura	Sedang
7	Merempan Hilir	Sedang

Sumber: Kantor Camat Mempura, 2019

4.2.4 Sarana Pendidikan di Kecamatan Mempura

Untuk melihat gambaran secara umum perkembangan pendidikan di Kecamatan Mempura dalam publikasi ini disajikan data pendidikan meliputi data TK, SD, SMP/MTs, SMA/Ma, SMK, dan Perguruan Tinggi. Adapun jumlah sarana pendidikan yang ada di Kecamatan Mempura adalah 19 unit dengan jenis sebagai berikut:

Tabel 4.6
Jumlah Sarana Pendidikan di Kecamatan Mempura

No.	Sarana Pendidikan	Jumlah
1.	Taman Kanak-Kanak (TK)	0
2.	Sekolah Dasar (SD)	11
3.	SMP/MTs	4
4.	SMA/MA	3
5.	SMK	1
6.	Perguruan Tinggi	0
	Jumlah	19

Sumber: Data Kantor Camat Mempura, 2019

4.2.5 Sarana Kesehatan di Kecamatan Mempura

Pembangunan bidang kesehatan bertujuan agar semua lapisan masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan merata. Dengan tujuan tersebut diharapkan akan tercapai derajat kesehatan masyarakat yang baik.

Adapun jumlah sarana kesehatan yang ada di Kecamatan Mempura adalah 30 unit dengan jenis sebagai berikut:

Tabel 4.7
Jumlah Sarana Kesehatan di Kecamatan Mempura

No	Sarana Kesehatan	Jumlah
1.	Puskesmas Induk	1
2.	Puskesmas Pembantu	5
3.	Posyandu	21
4.	Polindes	3
Jumlah		30

Sumber: Data Kantor Camat Mempura, 2019

4.2.6 Sarana Peribadatan di Kecamatan Mempura

Adapun jumlah sarana ibadah yang ada di Kecamatan Mempura adalah 43 unit dengan jenis sebagai berikut:

Tabel 4.8
Jumlah Sarana Peribadatan di Kecamatan Mempura

No.	Sarana Ibadah	Jumlah
1.	Mesjid	24
2.	Musholla	19
3.	Gereja	0
4.	Vihara	0
Jumlah		43

Sumber: Data Kantor Camat Mempura, 2019

4.3 Gambaran Umum Kebijakan Kawasan Bersejarah

Penetapan kawasan Mempura ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 18/PRT/M/2010 tentang Pedoman Revitalisasi Kawasan mengamanatkan bahwa kawasan yang direvitalisasi diarahkan pada :

- a. Kawasan yang menurun produktivitas ekonominya, terjadi degradasi lingkungan dan/atau penurunan kerusakan warisan budaya perkotaan.

- b. Lokasi yang memiliki nilai investasi/potensi peningkatan nilai properti yang tinggi.
- c. Kawasan Mempura yang berpotensi di sektor pariwisata, perdagangan, permukiman, industri, pasar, budaya, pendidikan, ekologi dan warisan budaya.
- d. Kota-kota strategis menurut UU Penataan Ruang (PKN, PKW, PKSN).
- e. Kota/kawasan dengan komitmen Pemda yang tinggi.
- f. Kota/kawasan dengan kepemilikan tanah (*land tenure*) yang tidak bermasalah.

4.3.1. Visi dan Misi Pengembangan Kawasan Benteng Mempura

Berdasarkan Dokumen RTBL Kawasan Bersejarah Benteng Tahun 2012 disebutkan bahwa Visi dalam pengembangan Kawasan Bersejarah Benteng Mempura adalah: ***“Terwujudnya Kawasan Benteng Mempura sebagai Kawasan Wisata Budaya dan Sejarah yang Berkelanjutan”***. Visi ini dirumuskan dengan pertimbangan potensi yang dapat dikembangkan di Kawasan Bersejarah Benteng Mempura, diantaranya adanya peninggalan bersejarah yaitu Tangsi Belanda, Eks Kantor Kewidanaan, Kawasan Makam Bersejarah dan budaya daerah setempat yang dapat digali sebagai potensi wisata untuk meningkatkan pengembangan Kawasan Benteng Mempura ini.

Pernyataan berkelanjutan diangkat dengan harapan Kawasan Bersejarah Benteng Mempura dapat terus berkembang dengan keseimbangan antara aktivitas, pembangunan fisik dan ekonomi yang memperhatikan ekologi, budaya dan sejarah kawasan. Sementara Misi yang akan menunjang visi tersebut adalah ***“Menciptakan Kawasan Wisata yang mengutamakan budaya, sejarah, dan***

ekologi dalam pengembangannya”. Tujuan dalam penataan kawasan ini adalah: Menciptakan kota wisata budaya dan sejarah yang lengkap, aman dan nyaman bagi penduduk dan pendatang. Adapun Sasaran dalam penataan kawasan adalah sebagai berikut:

1. Mempertahankan dan mengembangkan aktivitas budaya yang ada.
2. Mempertahankan bangunan/kawasan yang bersejarah dalam kawasan dengan menentukan tindakan pelestarian yang tepat untuk masing-masing obyek.
3. Merencanakan guna lahan yang efektif dan efisien sesuai dengan karakteristik kawasan.
4. Menciptakan kawasan tepi sungai yang aman dan nyaman dengan menyediakan jalur pejalan dan merancang kawasan tepi sungai sebagai fasilitas publik.
5. Menciptakan sirkulasi yang aman dan nyaman bagi semua pengguna jalan, dengan memisahkan antara jalur pejalan dan kendaraan.
6. Menyediakan fasilitas-fasilitas penunjang kegiatan wisata yang lengkap.
7. Menciptakan tujuan wisata baru, sebagai penunjang wisata budaya dan sejarah, untuk lebih meningkatkan vitalitas kota.

4.4 Gambaran Umum Desa Benteng Hulu

4.4.1 Geografis dan Administrasi Desa Benteng Hulu

Benteng Hulu merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak, terdiri atas 4 RW dan 12 RT. Luas wilayah Desa

Benteng Hulu adalah 256.334 km². Berikut inilah batas-batas Desa Benteng Hulu sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Sungai Siak
- b. Sebelah Selatan : Kecamatan Dayun
- c. Sebelah Timur : Desa Benteng Hilir
- d. Sebelah Barat : Desa Kampung Tengah

4.4.2 Penggunaan Lahan Desa Benteng Hulu

Penggunaan Lahan Desa Benteng Hulu didominasi oleh kawasan permukiman. Kawasan permukiman di Desa Benteng Hulu adalah sebesar 0,322 Km². Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 4.12 berikut:

Tabel 4.9
Penggunaan Lahan di Desa Benteng Hulu

No.	Penggunaan	Luas (Km ²)
1.	Permukiman	0,322
2.	Tanah Kosong	0,022
Jumlah		0,344 Km²

Sumber: Data Kantor Camat Mempura, 2019

4.4.3 Kependudukan di Desa Benteng Hulu

Jumlah penduduk Desa Benteng Hulu mencapai 2.910 jiwa hingga Tahun 2019. Berikut tabel jumlah penduduk Desa Benteng Hulu hingga Tahun 2019:

Tabel 4.10
Jumlah Penduduk di Desa Benteng Hulu

No.	Tahun 2019	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Desa Benteng Hulu	1.474	1.436	2.910

Sumber: Data Kantor Camat Mempura, 2019

4.4.4 Sarana Pendidikan di Desa Benteng Hulu

Sarana Pendidikan merupakan salah satu aspek yang dikembangkan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Untuk melihat gambaran secara umum perkembangan pendidikan di Desa Benteng Hulu dapat dilihat dari publikasi yang disajikan dalam bentuk data jumlah sarana pendidikan. Adapun jumlah sarana pendidikan yang ada di Desa Benteng Hulu adalah 7 unit dengan jenis sebagai berikut:

Tabel 4.11
Jumlah Sarana Pendidikan di Desa Benteng Hulu

No.	Sarana Pendidikan	Jumlah
1.	Taman Kanak-Kanank (TK)	1
2.	Sekolah Dasar (SD)	2
3.	SMP/MTs	2
4.	SMA/MA	1
5.	SMK	1
6.	Perguruan Tinggi	0
	Jumlah	7

Sumber: Data Kantor Desa Benteng Hulu, 2019

4.4.5 Sarana Kesehatan di Desa Benteng Hulu

Sarana Kesehatan merupakan salah satu aspek yang perlu dikembangkan dengan tujuan diharapkan tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang baik. Untuk melihat gambaran secara umum perkembangan kesehatan di Desa Benteng Hulu dapat dilihat dari publikasi yang disajikan dalam bentuk data jumlah sarana Kesehatan. Adapun jumlah sarana kesehatan yang ada di Desa Benteng Hulu adalah 5 unit dengan jenis sebagai berikut:

Tabel 4.12
Jumlah Sarana Kesehatan di Desa Benteng Hulu

No.	Sarana Kesehatan	Jumlah
1.	Puskesmas Induk	0
2.	Puskesmas Pembantu	1
3.	Posyandu	4
4.	Balai Pengobatan	0
5.	Rumah Bersalin	0
6.	Rumah Sakit	0
7.	Praktek Dokter Umum	0
8.	Praktek Dokter Gigi	0
9.	Praktek Bidan	0
	Jumlah	5

Sumber: Data Kantor Desa Benteng Hulu, 2019

4.4.6 Sarana Peribadatan di Desa Benteng Hulu

Adapun jumlah sarana ibadah yang ada di Desa Benteng Hulu adalah 6 unit dengan jenis sebagai berikut:

Tabel 4.13
Jumlah Sarana Ibadah Desa Benteng Hulu

No.	Sarana Ibadah	Jumlah
1.	Mesjid	3
2.	Musholla	3
3.	Gereja	0
4.	Vihara	0
	Jumlah	6

Sumber: Data Kantor Desa Benteng Hulu, 2019.

4.5 Gambaran Umum Desa Kampung Tengah

4.5.1 Geografi dan Administrasi Kampung Tengah

Kampung Tengah merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Mempura, Kabupaten siak ini terdiri atas 1 RW dan 3 RT. Desa Kampung Tengah mempunyai luas daerah sebesar 10.721 Km². Berikut inilah batas-batas Desa Kampung Tengah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Sungai Siak
- b. Sebelah Selatan : Kecamatan Dayun
- c. Sebelah Timur : Desa Benteng Hulu
- d. Sebelah Barat : Desa Sungai Mempura

4.5.2 Penggunaan Lahan di Desa Kampung Tengah

Penggunaan Lahan di Desa Kampung Tengah didominasi oleh kawasan permukiman. Kawasan permukiman di Desa Kampung Tengah adalah sebesar 0,266 Km². Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 4.17 berikut:

Tabel 4.14
Penggunaan Lahan di Desa Kampung Tengah

No.	Penggunaan	Luas (Km ²)
1.	Permukiman	0,266
2.	Tanah Kosong	0,009
	Jumlah	0,275 Km²

Sumber: Kantor Camat Mempura, 2019

4.5.3 Kependudukan di Desa Kampung Tengah

Jumlah penduduk di Desa Kampung Tengah mencapai 438 jiwa hingga Tahun 2019. Berikut Tabel 4.18 jumlah penduduk Desa Kampung Tengah hingga Tahun 2019:

Tabel 4.15
Jumlah Penduduk di Desa Kampung Tengah

No.	Tahun 2017	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Desa Kampung Tengah	227	211	438

Sumber: Data Kantor Camat Mempur, 2019

4.5.4 Sarana Pendidikan di Desa Kampung Tengah

Untuk melihat gambaran secara umum perkembangan pendidikan di Desa Kampung Tengah dapat dilihat dari publikasi data yang disajikan dalam bentuk data sarana pendidikan. Adapun jumlah sarana pendidikan yang ada di Desa Kampung Tengah adalah 1 unit dengan jenis sebagai berikut:

Tabel 4.16
Jumlah Sarana Pendidikan di Desa Kampung Tengah

No.	Sarana Pendidikan	Jumlah
1.	Paud	0
2.	Taman Kanak-Kanak (TK)	1
3.	Sekolah Dasar (SD)	0
4.	SMP/MTs	0
5.	SMA/MA	0
6.	SMK	0
7.	Perguruan Tinggi	0
	Jumlah	1

Sumber: Data Kantor Desa Kampung Tengah, 2019

4.5.5 Sarana Kesehatan di Desa Kampung Tengah

Pembangunan bidang kesehatan bertujuan agar semua lapisan masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan merata. Dengan tujuan tersebut diharapkan akan tercapai derajat kesehatan masyarakat yang baik. Adapun jumlah sarana kesehatan yang ada di Desa Kampung Tengah adalah 2 unit dengan jenis sebagai berikut:

Tabel 4.17
Jumlah Sarana Kesehatan di Desa Kampung Tengah

No.	Sarana Kesehatan	Jumlah
1.	Puskesmas Induk	0
2.	Puskesmas Pembantu	0
3.	Posyandu	1
4.	Polindes	1
5.	Rumah Bersalin	0
6.	Rumah Sakit	0
7.	Praktek Dokter Umum	0
8.	Praktek Dokter Gigi	0
9.	Praktek Bidan	0
	Jumlah	2

Sumber: Data Kantor Desa Kampung Tengah, 2019

4.5.6 Sarana Peribadatan di Desa Kampung Tengah

Adapun jumlah sarana ibadah yang ada di Desa Kampung Tengah adalah 1 unit dengan jenis sebagai berikut:

Tabel 4.18
Jumlah Sarana Peribadatan di Desa Kampung Tengah

No.	Sarana Ibadah	Jumlah
1.	Mesjid	1
2.	Musholla	0
3.	Gereja	0
4.	Vihara	0
	Jumlah	1

Sumber: Data Kantor Desa Kampung Tengah, 2019

4.6 Gambaran Umum Desa Benteng Hilir

4.6.1 Geografi dan Administrasi Desa Benteng Hilir

Benteng Hilir merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Mempura, Kabupaten siak ini terdiri atas 4 RW dan 8 RT. Desa Benteng Hilir mempunyai luas daerah sebesar 381.364 Km². Berikut inilah batas-batas Desa Benteng Hilir sebagai berikut:

- e. Sebelah Utara : Sungai Siak
- f. Sebelah Selatan : Kecamatan Dayun
- g. Sebelah Timur : Desa Paluh
- h. Sebelah Barat : Desa Benteng Hulu

4.6.2 Penggunaan Lahan di Desa Benteng Hilir

Penggunaan Lahan di Desa Benteng Hilir didominasi oleh kawasan permukiman. Kawasan permukiman di Desa Benteng Hilir adalah sebesar 0,266 Km². Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 4.22 berikut:

Tabel 4.19
Penggunaan Lahan di Desa Benteng Hilir

No.	Penggunaan	Luas (Km ²)
1.	Permukiman	0,266
2.	Tanah Kosong	0,009
	Jumlah	0,275 Km²

Sumber: Data Kantor Camat Mempura, 2019

4.6.3 Kependudukan di Desa Benteng Hilir

Jumlah penduduk Desa Benteng Hilir mencapai 1.972 jiwa hingga Tahun 2019. Berikut Tabel 4.23 jumlah penduduk Desa Benteng Hilir hingga Tahun 2019:

Tabel 4.20
Jumlah Penduduk di Desa Benteng Hilir

No.	Tahun 2017	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Desa Benteng Hilir	1.016	956	1.972

Sumber: Data Kantor Camat Mempura, 2019

4.6.4 Sarana Pendidikan di Desa Benteng Hilir

Untuk melihat gambaran secara umum perkembangan pendidikan di Desa Benteng Hilir dapat dilihat dari publikasi data yang disajikan dalam bentuk data sarana pendidikan. Adapun jumlah sarana pendidikan yang ada di Desa Benteng Hilir adalah 3 unit dengan jenis sebagai berikut:

Tabel 4.21
Jumlah Sarana Pendidikan di Desa Benteng Hilir

No.	Sarana Pendidikan	Jumlah
1.	Paud	0
2.	Taman Kanak-Kanak (TK)	1
3.	Sekolah Dasar (SD)	1
4.	SMP/MTs	0
5.	SMA/MA	1
6.	SMK	0
7.	Perguruan Tinggi	0
	Jumlah	3

Sumber: Data Kantor Desa Benteng Hilir, 2019

4.6.5 Sarana Kesehatan di Desa Benteng Hilir

Pembangunan bidang kesehatan bertujuan agar semua lapisan masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan merata. Dengan tujuan tersebut diharapkan akan tercapai derajat kesehatan masyarakat yang baik. Adapun jumlah sarana kesehatan yang ada di Desa Benteng Hilir adalah 3 unit dengan jenis sebagai berikut:

Tabel 4.22
Jumlah Sarana Kesehatan di Desa Benteng Hilir

No.	Sarana Kesehatan	Jumlah
1.	Puskesmas Induk	1
2.	Puskesmas Pembantu	0
3.	Posyandu	2
4.	Polindes	0
5.	Rumah Bersalin	0
6.	Rumah Sakit	0
7.	Praktek Dokter Umum	0
8.	Praktek Dokter Gigi	0
9.	Praktek Bidan	0
	Jumlah	3

Sumber: Data Kantor Desa Benteng Hilir, 2019

4.6.6 Sarana Peribadatan di Desa Benteng Hilir

Adapun jumlah sarana ibadah yang ada di Desa Benteng Hilir adalah 5 unit dengan jenis sebagai berikut:

Tabel 4.23
Jumlah Sarana Peribadatan di Desa Benteng Hilir

No.	Sarana Ibadah	Jumlah
1.	Mesjid	3
2.	Musholla	2
3.	Gereja	0
4.	Vihara	0
	Jumlah	5

Sumber: Data Kantor Desa Benteng Hilir, 2019

4.7 Kebijakan Terkait Revitalisasi di Kabupaten Siak

4.7.1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Siak Tahun 2005-2025

Berikut adalah kebijakan terkait pelestarian kawasan dan bangunan bersejarah didalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Siak 2005-2025:

a. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Siak

1. Meningkatnya upaya pengembangan nilai budaya, dan pengelolaan kekayaan budaya serta keragaman budaya. Upaya untuk itu diarahkan melalui:
 - a. Meningkatkan peran serta masyarakat dan institusi kebudayaan, penggalian, pengembangan, dan pembelajaran budaya sejak usia dini, peningkatan prasarana pengembangan seni budaya daerah, pengamalan nilai-nilai budaya melayu dalam kehidupan masyarakat.
 - b. Pengembangan dan pembinaan kebudayaan daerah yang bersumber dari warisan, peningkatan pemahaman terhadap keragaman nilai-nilai budaya, dan pelestarian nilai-nilai budaya, adat istiadat yang konstruktif. Pelestarian dan apresiasi nilai kesenian dan budaya melayu, Pengembangan dan pembinaan kebudayaan melayu melalui pendidikan.
 - c. Penguatan partisipasi masyarakat dan peran institusi kebudayaan, pengembangan budaya inovatif yang berorientasi iptek dan percepatan penyerapan budaya asing yang maju sehingga mampu mendorong percepatan pembangunan, Peningkatan pemeliharaan dan pengelolaan situs-situ benda cagar budaya.
 - d. Pemantapan pengamanan nilai budaya dalam percepatan pembangunan, penguatan budaya inovatif berorientasi

4.7.2 Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Siak Tahun 2011-2031

Berikut adalah kebijakan terkait pelestarian kawasan dan bangunan bersejarah didalam Draff Rencana Tata Ruang Dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Siak 2011-2031:

Tabel 4.24
Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Siak 2011-2031
Terkait Kawasan Bersejarah

No	Kebijakan Penataan Ruang	Strategi Penataan Ruang
I	pengembangan kawasan berbasis agribisnis dan agroindustri yang berkelanjutan dan produktif	a. mengembangkan kawasan yang memiliki potensi unggulan pertanian dan perkebunan sebagai daerah produksi; b. mengembangkan lumbung pangan dan mencegah alih fungsi lahan pertanian; c. mengembangkan kawasan budidaya perikanan; d. menetapkan wilayah agribisnis; e. menetapkan wilayah agroindustri; dan f. meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana penunjang kawasan agro.
	Pengoptimalan dan pengendalian kawasan berbasis hutan	a. mengoptimalkan kawasan yang memiliki potensi unggulan kehutanan yang berkelanjutan; dan b. mengendalikan alih fungsi kawasan hutan.
	pengelolaan sumber daya alam dan buatan berbasis kelestarian lingkungan hidup	a. mengembangkan pengelolaan mineral, minyak dan gas bumi; b. meningkatkan rehabilitasi dan konservasi lahan; dan c. meningkatkan kualitas lingkungan hidup.
	Pengembangan kawasan pariwisata yang berbasis potensi alam dan budaya	a. mengembangkan dan meningkatkan objek wisata alam unggulan b. mengelola dan melestarikan situs sejarah c. melestarikan nilai-nilai budaya dan cagar budaya, dan d. mengembangkan sarana dan prasarana penunjang pariwisata.
	pengembangan sistem pusat kegiatan secara hirarkis dan terdistribusi	a. meningkatkan peran dan fungsi wilayah perkotaan; b. meningkatkan sinergitas kegiatan ekonomi wilayah perkotaan dengan wilayah perdesaan; dan c. menetapkan arahan fungsi sistem perkotaan dan perdesaan sesuai dengan potensi yang dimiliki.

No	Kebijakan Penataan Ruang	Strategi Penataan Ruang
	pengembangan sistem jaringan prasarana untuk mendukung dan menghubungkan pusat permukiman dan ekonomi	a. mengembangkan sistem transportasi penghubung perkotaan dan perdesaan; b. mengembangkan infrastruktur kereta api, pelabuhan sungai, dan laut; c. mengembangkan bandar udara baru; d. meningkatkan ketersediaan sumber dan pelayanan energi listrik; e. meningkatkan akses jangkauan pelayanan telekomunikasi; f. mengembangkan sistem pengelolaan prasarana sumber daya air; dan g. mengembangkan sistem pengelolaan lingkungan.
	peningkatan pelestarian kawasan lindung berkelanjutan	a. mempertahankan dan melestarikan kawasan lindung yang telah ditetapkan; b. memulihkan fungsi kawasan lindung yang mengalami kerusakan; c. menetapkan kawasan evakuasi bencana; d. mengembangkan dan meningkatkan kualitas jalur evakuasi bencana; dan e. mengembangkan ruang terbuka hijau dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan untuk menunjang fungsi lindung di wilayah darat, meliputi hutan kota, jalur hijau kota, taman kota, taman lingkungan, dan zona penyangga hijau (<i>buffer zone</i>).
	pengembangan kawasan budidaya secara efisien, seimbang, dan berwawasan lingkungan	a. mengembangkan kawasan hutan produksi dengan meningkatkan peran serta masyarakat; b. mengembangkan kegiatan budidaya unggulan beserta infrastruktur secara sinergis serta ramah lingkungan dan berkelanjutan; dan c. mengembangkan kawasan permukiman yang terstruktur serta tidak melampaui daya dukung dan daya tampung kawasan.
	peningkatan fungsi	a. mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan

No	Kebijakan Penataan Ruang	Strategi Penataan Ruang
	kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara	dan keamanan; b. mengembangkan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan; c. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagai zona penyangga; dan d. turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan.

Sumber : RTRW Kabupaten Siak 2011-2031

4.7.3 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Siak Tahun 2016-2021 Terkait Kawasan Bersejarah

Berikut adalah kebijakan terkait revitalisasi kawasan dan bangunan bersejarah didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Siak 2016-2021:

Tabel 4.25

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Siak Tahun 2016-2021 Terkait Kawasan Bangunan Bersejarah

Tahapan dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahap Lima Tahun Ke 3	
Misi	Sasaran Pokok
Mewujudkan destinasi pariwisata yang berdaya saing.	1. Mewujudkan pariwisata yang berdaya saing berbasis budaya dan nilai-nilai keagamaan 2. Pelestarian benda-benda cagar budaya bersejarah, karya seni dan produk budaya melayu 3. Penyelenggaraan kegiatan keagamaan melibatkan lembaga keagamaan dilingkungan masyarakat 4. Pemberdayaan lembaga-lembaga agama dalam mewujudkan kerukunan antar umat beragama

Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Siak 2016-2021

4.8 Implementasi Peraturan Pariwisata Terhadap Perencanaan Wilayah

4.8.1 Kebijakan Ruang (RTRW) Kabupaten Siak

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Siak adalah rencana tata ruang meliputi bagian wilayah Kabupaten Siak yang telah ditetapkan yang selanjutnya disebut RTRWK. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Siak adalah Rencana Tata Ruang meliputi bagian wilayah Kabupaten Siak yang telah ditetapkan yang selanjutnya disebut RTRWK. Visi adalah suatu pandangan kedepan yang menggambarkan arahan dan tujuan yang ingin dicapai serta akan menyatukan komitmen seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan kota. Misi adalah komitmen dan panduan arah bagi pembangunan pengelolaan kota untuk mencapai Visi pembangunan yang telah ditetapkan. Tujuan adalah nilai-nilai dan kinerja yang mesti dicapai dalam pembangunan kota berkaitan dalam kerangka visi dan misi yang telah ditetapkan: Strategi pengembangan adalah langkah-langkah penataan ruang dan pengelolaan kota yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan misi pembangunan kota yang telah ditetapkan (RTRW Kabupaten Siak tahun 2002).

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Siak diarahkan dengan visi mewujudkan “Kota Pemerintahan dan Kota Pusat Kebudayaan Melayu”. Untuk mewujudkan visi sebagaimana dalam RTRW Kabupaten Siak Tahun 2002 pasal 4 ayat 1, maka arahan penataan ruang wilayah kota akan ditunjukkan untuk melaksanakan 5 misi utama yaitu:

- a. Menumbuhkembangkan pelayanan umum skala wilayah Kabupaten, khususnya dalam bidang administrasi Pemerintahan dan Wisata Budaya.

- b. Mengembangkan sarana dan prasarana pendukung kegiatan budaya melayu sebagai objek wisata andalan Kabupaten Siak.
- c. Mengembangkan potensi sungai siak sebagai indentitas penting Sri Indrapura.
- d. Menumbuhkembangkan sarana dan prasarana pendukung pusat pemerintahan Kabupaten Siak.
- e. Menciptakan perkembangan kota secara berimbang.

4.8.2 Rencana Penyusunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Siak 2011-2016 tentang Pariwisata

Dalam RPJMD Kabupaten Siak tahun 2011-2016 ada beberapa isu yang terkait dengan bidang Pariwisata, antara lain:

1. Masih sangat terbatasnya daya dukung infrastruktur pendukung pariwisata, seperti jalan, jembatan, jaringan listrik, dan telekomunikasi.
2. Pemahaman masyarakat tentang pariwisata relatif masih terbatas. Sehingga perlu langkah sosialisasi terstruktur dan sistematis kepada seluruh lapisan masyarakat tentang arti penting pariwisata bagi Kabupaten Siak.
3. Perlu dibentuk lembaga lintas sektoral yng berfungsi khusus menyiapkan Regulasi, Perencanaan, Evaluasi, dan Monitoring program-program pembangunan pariwisata dengan Dinas Pariwisata sebagai leading sektornya.
4. Perlu dibentuk badan pengelolaan objek-objek wisata sehingga pengelolaan objek wisata dapat menjadi optimal.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1. Karakteristik Kawasan Bersejarah

Kawasan bersejarah di Kecamatan Mempura merupakan lanskap budaya yang menampilkan bangunan-bangunan pemerintahan Kolonial Belanda. Bangunan dan struktur-struktur serta situs-situs peninggalan yang tersebar di dalam kawasan bersejarah berisikan peninggalan yang bercorak Kolonial. Kawasan Mempura berada di tengah pemukiman penduduk pedesaan dan berada di pinggiran sungai Siak yang umumnya ramai penduduk, sehingga permasalahan utama yang masih muncul hingga sekarang adalah konflik penggunaan lahan dan hak-hak untuk memanfaatkan lahan untuk berbagai kepentingan, termasuk memanfaatkan sebagai kebun dan mendirikan bangunan di tengah-tengah situs. Masalah ini merupakan agenda penting bagi pemerintah karena harus menjalankan fungsi perlindungan dan memvitalkan kembali terhadap kawasan bersejarah serta mengembangkan dan memanfaatkannya secara maksimal sebagai sumber ilmu pengetahuan.

Berdasarkan bentuk, pola, dan fungsi kawasan yang telah diidentifikasi lewat Analisis Deskriptif Kualitatif, Kawasan Bersejarah Mempura dapat dibagi menjadi beberapa Karakteristik yakni: Karakteristik Fisik dan Non Fisik Kawasan (karakteristik sosial dan karakteristik ekonomi) dan Karakteristik Lingkungan.

5.1.1 Karakteristik Fisik Kawasan

1. Penggunaan lahan

Penggunaan Lahan di kawasan Desa Benteng Hulu, Desa Kampung Tengah dan Desa Benteng Hilir diklasifikasikan sebagai perkantoran, permukiman, perdagangan dan jasa, ruang terbuka hijau. Saat ini penggunaan lahan masih sesuai dengan apa yang ditetapkan, namun perlu adanya pengendalian perkembangan agar perkembangan kawasan tidak tumpang tindih dan mendegradasi kualitas estetika dan lingkungan kawasan.

a. Penggunaan Lahan Permukiman

Pada kawasan studi sudah adanya penetapan kawasan permukiman. Permukiman tersebut ditetapkan sebagai objek wisata sebagai kawasan permukiman wisata. Hal tersebut dinilai memiliki potensi yang kuat memberikan nilai wisata dari aspek sosial, budaya, arsitektur, dan spasial. Dari segi sosial kawasan ini dihuni oleh penduduk lokal asli kabupaten Siak sehingga mengandung nilai-nilai sendi kehidupan yang memiliki karakteristik sendiri seperti cara berkomunikasi, bekerja, dan saling berinteraksi. Dari segi budaya tentu mencerminkan budaya lokal yang memberikan pengalaman sendiri mengenal budaya lokal yang berasaskan pada nilai sejarah kerajaan Siak dan Budaya Islam. Dari segi arsitektur permukiman ini menggunakan jenis rumah yang menerapkan karakteristik lokal yang berbeda dari tempat lain seperti rumah masih berkontruksi panggung, material kayu, ukiran-ukiran, dan makna rumah secara umum. Secara spasial menempati strategis karena berada ditengah kawasan studi yang menghubungkan antara kawasan sejarah Benteng Tangsi, Landrat, dan

Controlleur dengan kawasan religi berupa makan kerajaan dan makam dalam pohon. Kawasan ini cukup strategis berada di tepi sungai Siak yang dapat melihat panorama Istana Siak yang berada disebaliknya.

Kecenderungan perkembangan permukiman di Kawasan adalah kantong-kantong permukiman (cluster) dan linear sepanjang jalan. Pengembangannya terjadi secara sporadis dan membentuk permukiman dengan kepadatan sedang. Perlu adanya pengendalian pertumbuhan baru seperti penataan sempadan bangunan dari jalan dan sungai, orientasi, dan material yang digunakan, serta kelengkapan permukiman.

Gambar 5.1
Penggunaan lahan permukiman



Sumber: Hasil Dokumentasi, 2019

b. Penggunaan Lahan Perkantoran

Kawasan perkantoran di Desa Benteng Hulu, Desa Kampung Tengah dan Desa Benteng Hilir terdiri dari perkantoran pemerintah bentuk usaha yaitu Kantor Televisi Siak dan Kantor RRI Siak. Selain itu terdapat juga kawasan khusus untuk perkantoran KORAMIL. Kawasan Kantor TV dan RRI Siak berada di sisi timur kawasan perencanaan yang berdekatan atau satu kawasan dengan kawasan Cagar Budaya Landraad dan Controlleur. Sedangkan Perkantoran ABRI berada di

tengah perencanaan yang berdekatan dengan kawasan Cagar Budaya Benteng Tangsi.

Gambar 5.2
Penggunaan lahan perkantoran



Sumber: Hasil Dokumentasi, 2019

c. Penggunaan Lahan Perdagangan dan Jasa

Jenis kegiatan perdagangan dan jasa pada kawasan di Desa Benteng Hulu, Desa Kampung Tengah dan Desa Benteng Hilir merupakan tipe Ribbons yaitu daerah perdagangan sepanjang jalan. Perdagangan dikawasan tersebar disepanjang jalan utama yang sering dilalui masyarakat yaitu jalan Padat Karya. Jenis perdagangan merupakan retail berupa toko mandiri yang tumbuh secara arterial atau dipinggiran jalan.

Gambar 5.3
Penggunaan lahan perdagangan da jasa



Sumber: Hasil Dokumentasi, 2019

d. Penggunaan Lahan Pendidikan dan Sosial

Terdapat fasilitas pendidikan didalam kawasan di Desa Benteng Hulu, Desa Kampung Tengah dan Desa Benteng Hilir berupa PAUD. Sedangkan fasilitas sosial berupa posyandu dan masjid. Paud dan Posyandu berada disisi timur kawasan dan berdekatan langsung dengan kawasan cagar budaya landraad dan controleur. Sehingga dalam perencanaan kawasan perlu adanya integrasi yang saling menguatkan antar kawasan. Pada kawasan ini dapat diintegrasikan berupa ruang luar bersama sehingga selalu adanya aktifitas pada kawasan.

Gambar 5.4
Penggunaan lahan pendidikan dan sosial



Sumber: Hasil Dokumentasi, 2019

Penggunaan lahan pada kawasan Kecamatan Mempura dapat dilihat pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1
Penggunaan Lahan pada Kawasan Kecamatan Mempura

No	Jenis Penggunaan Lahan	Persentase (%)
1	Permukiman	28,1
2	Perkantoran	11,8
3	Perdagangan dan Jasa	4,2
4	Pendidikan dan Sosial	1,7
5	Ruang Terbuka	13,2
Jumlah		59

Sumber: Hasil Penelitian, 2019

Bangunan yang paling mendominasi di kawasan Kecamatan Mempura adalah bangunan Tangsi Belanda. Keberadaan bangunan ini yang sangat diketahui wisatawan di seluruh kawasan tersebut disebabkan usia bangunan yang sangat tua.

Gambar 5.5
Bangunan Benteng Tangsi Belanda



Sumber: Hasil Dokumentasi, 2019



Gambar 5.6 Peta Penggunaan Lahan Kecamatan Mempura

2. Bangunan Kuno

Sebagian besar bangunan kuno di kawasan Desa Benteng Hulu, Desa Kampung Tengah dan Desa Benteng Hilir tentunya memiliki gaya arsitektur kolonial, dimana kawasan tersebut dahulu merupakan permukiman orang Belanda. Meskipun bentuk bangunan kuno sudah banyak berubah dari awal pembangunan, namun kondisi bangunan-bangunan kuno tersebut banyak yang masih belum terawat, kecuali sebagian besar bangunan kuno yang ada di Desa Benteng Hilir masih cukup terawat. Mengingat fungsi kawasan dulu merupakan pusat perkantoran orang Belanda.

a. Bangunan atau Benda Bersejarah di Kawasan Bersejarah

Karakteristik bangunan bersejarah ini dilihat dari kondisi lapangan dan keadaan dari bangunan bersejarah yang ada di Kecamatan Mempura. Setelah itu dibandingkan dengan teori-teori terkait karakteristik bangunan bersejarah yang digunakan dalam penelitian ini. Sehingga menghasilkan karakteristik bangunan bersejarah pada setiap bangunannya berdasarkan teori yang digunakan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kecamatan Mempura Tahun 2019, terdapat 5 Bangunan Bersejarah yang ada di Desa Benteng Hulu, Desa Kampung Tengah dan Desa Benteng Hilir. Namun setelah dilakukan survei lapangan dan mempelajari sejarah perkembangan Kabupaten Siak dan Sejarah dari bangunan bersejarah tersebut dengan ahli sejarah yang berada di Desa Benteng Hulu, Desa Kampung Tengah dan Desa Benteng Hilir, ternyata 2 bangunan diantaranya sudah di revitalisasi dan masih memiliki karakter-karakter dan nilai sejarah yang tinggi dan 1 bangunan bersejarah sudah tidak terawat lagi dan bangunan tersebut mulai tertutupi semak

belukar, sehingga bangunan bersejarah yang tersisa di Desa Benteng Hulu, Desa Kampung Tengah dan Desa Benteng Hilir hanya sebanyak 4 bangunan, yaitu 1 bangunan bersejarah berada pada Desa Benteng Hulu, 1 bangunan bersejarah berada pada Desa Kampung Tengah dan 2 bangunan bersejarah berada pada Desa Benteng Hilir.

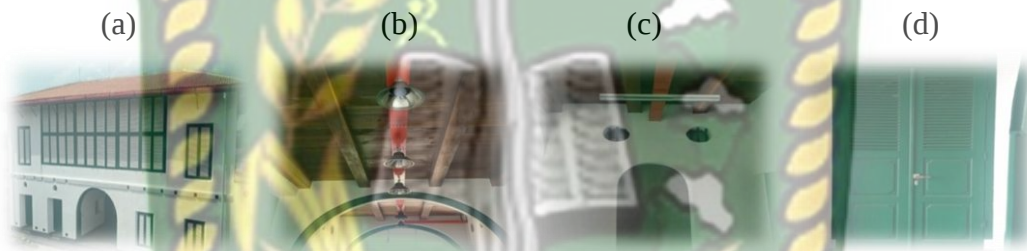
Setelah dilakukan penelitian terhadap bangunan-bangunan bersejarah yang tersisa di Desa Benteng Hulu, Desa Kampung Tengah dan Desa Benteng Hilir, Bahwasanya, pada kawasan ini terdapat beberapa bangunan-bangunan bersejarah yang masih memiliki karakter-karakter dan nilai sejarah yang tinggi yaitu: Bangunan Tangsi Belanda, Rumah Controlluer, Rumah Landraad, dan Rumah Datuk Pesisir. Maka berikut adalah hasil dari penelitian pada setiap bangunan tersebut:

- **Bangunan Tangsi Belanda**

Sejarah berdirinya bangunan Benteng Belanda ini tentu tidak terlepas dari sejarah berdirinya Kerajaan Siak sendiri. Raja Kecil yang merupakan Sultan pertama Kerajaan Siak yang bergelar Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah Putera Raja Johor pada tahun 1723 M berhasil menorehkan sejarah dengan mendirikan Kerajaan Siak. Kerajaan yang semula dikuasai oleh Kerajaan Johor ini, bisa berdiri sendiri dengan pusat kerajaan di Buntan. Beberapa kali pusat kerajaan selalu berpindah-pindah. Mulai dari Buntan ke Mempura. Sempat pula berpindah ke Senapelan Pekanbaru dan akhirnya kembali ke Mempura. Maka pada masa pemerintahan Sultan Ismail dengan gelar Sultan Assyaidis Syarif Ismail Jalil Jalaluddin (1827-1864) sejarah pun dibuat. Yakni pusat Kerajaan

Siak dipindahkan ke Kota Siak Sri Indrapura dan akhirnya menetap disana sampai berakhirnya masa pemerintahan Sultan Siak yang terakhir.

Sejarah pembangunan benteng ini memang sampai sekarang masih banyak yang belum mengetahui secara pasti. Hal ini dibuktikan dari hasil pencarian penulis di buku-buku dan hasil wawancara banyak yang masih meragukan, karena orang-orang yang hidup di zaman itu telah meninggal sehingga tidak ada lagi tempat untuk bertanya. Namun dari data-data diatas, penulis membuat suatu kesimpulan bahwa benteng ini didirikan oleh Belanda pada akhir tahun 1800-an.



Sumber: Survei Lapangan, 2019

Gambar 5.7
Benteng Tangsi Belanda

(a)Tampak depan bangunan secara keseluruhan, (b) Langit-langit menggunakan material kayu, (c) Pelapis dalam dinding berupa cat dengan warna putih, (d) Pintu dan kusen yang terbuat dari bahan material kayu.

- **Rumah Controlleur Siak**

Secara spasial, situs Gedung Controleur termasuk dalam kawasan perkotaan, cuma posisinya berada di seberang kompleks Kota Siak dengan Sungai Siak sebagai pembatas (pemisah). Oleh karena letaknya masih dalam kawasan perkotaan, akses ke situs cukup mudah, baik melalui jalan darat maupun jalan air (Sungai Siak). Keletakan situs ini cukup mudah dicari, karena bangunan ini tepat berada dipinggir gan bangunan Rumah Landraad dan Tangsi

Belanda yang sama-sama merupakan bangunan peninggalan Kolonial Belanda. Situs ini relatif dekat dengan pusat pemerintahan Kabupaten Siak.

Bangunan ini berada $\pm$ 150 meter di sebelah timur kompleks benteng Belanda. Arah bangunan ini ke timur menghadap ke Sungai Siak. Arsitektur bangunannya menunjukkan arsitektur bangunan Belanda. Dinding-dindingnya berupa dinding bata berlepa dengan ketebalan 20 cm. Atap terbuat dari genteng tanah. Pintu utama di bagian muka (teras) berbentuk pintu lengkung kubah yang diapit dengan dua buah jendela lengkung kubah. Pintu-pintu lainnya berdaun pintu ganda, setengah bagian atas kaca dan bagian bawah papan kayu. Daun jendela bentuk jurasi. Lantai berupa lantai semen beton. Bangunan ini terdiri dari lima ruangan, yaitu ruangan tengah, ruang depan samping kiri-kanan, dan ruang belakang samping kiri-kanan. Fungsi awal bangunan ini adalah kantor pemerintahan kolonial Belanda semasa zaman kerajaan Siak, fungsi sekarang Kantor Camat Mempura.

Jembatan istana berada $\pm$ 100 m di sebelah tenggara kompleks istana. Jembatan ini berangka tahun 1899. Di bawah jembatan istana masih terdapat bekas sungai yang kemungkinan dulu sekaligus berfungsi sebagai parit pertahanan kompleks istana. Sekarang jembatan ini masih tetap difungsikan untuk menghubungkan jalan depan istana dengan pemukiman di luar kompleks istana.



Sumber: Survei Lapangan, 2019

Gambar 5.8
Rumah Controlluer Siak

(a)Tampak depan bangunan yang menunjukkan atap menggunakan genteng tanah liat, (b) Jendela dengan ukuran yang cukup lebar dan masih menggunakan bahan kayu, (c) Pelapis muka dinding luar berupa cat dengan warna kuning. Saat ini cat sudah pudar, (d) Dinding dalam yang sudah pudar.

- **Rumah Landraad Siak**

Secara spasial, situs Rumah Landraad termasuk dalam kawasan perkotaan, cuma posisinya berada di seberang kompleks Kota Siak dengan Sungai Siak sebagai pembatas (pemisah). Oleh arena letaknya masih dalam kawasan perkotaan, akses ke situs cukup udah, baik melalui jalan darat maupun jalan air (Sungai Siak). Keletakan situs ini cukup mudah dicari, karena bangunan ini tepat berada dipinggir Sungai Siak dan berdekatan dengan bangunan Gedung Controlleur dan Tangsi Belanda.

Bangunan Landraad ini dahulunya berfungsi sebagai kantor bagi pemerintahan kolonial Belanda. Di kantor inilah para pejabat-pejabat Belanda menjalankan roda pemerintahan, khususnya untuk daerah Siak dan sekitarnya. Riwayat pembangunan gedung ini tidak diketahui dengan pasti, tetapi pembangunannya jelas sezaman dengan masa masuknya pengaruh (hegemoni) Belanda di Kesultanan Siak, yaitu pada abad ke-19. Gaya bangunan ini menunjukkan arsitektur Belanda. Dindingnya berupa bata lepa dengan ketebalan 20 cm. Bagian muka berupa dinding papan dan kaca.

Atapnya berupa genteng. Lantainya berupa lantai tegel Belanda, berukuran 20 x 20 cm. Berdasarkan warna dan motifnya terdapat 4 macam tegel, yaitu tegel dasar putih dengan motif warna abu-abu hitam, motif kuncup bunga dan rangkaian bulatan, abu-abu muda polos, dan kuning gading polos. Bangunan depan terdiri dari lima ruangan yaitu ruang tengah, ruang depan samping kiri-kanan, dan ruang belakang samping kiri-kanan. Antara ruang belakang samping kirikan terdapat lorong untuk menuju ke bangunan belakang yang merupakan bangunan dapur berukuran 6,7 x 6,2.

Fungsi awal kantor pemerintahan kolonial Belanda semasa zaman kerajaan Siak, fungsi sekarang Kantor Cabang Dinas Pendidikan di Kecamatan Mempura. Selain itu, rumah ini juga difungsikan sebagai Sekretariat Dharma Wanita Persatuan Kecamatan Mempura dan Sekretariat Tim Penggerak PKK Kecamatan Mempura.



Sumber: Survei Lapangan, 2019

Gambar 5.9

Rumah Landraad Siak

(a) Tampak depan bangunan yang menunjukkan dominan menggunakan bahan kayu, (b) Dinding yang berwarna putih tampak memudardan sudah ada bercak hitam, (c) Tampak lingkungan dari sisi utara yang sudah memadai.

- **Rumah Datuk Pesisir**

Rumah ini merupakan rumah tinggal dari Datuk Pesisir, yakni salah satu penasihat Raja di Kerajaan Siak. Rumah ini sekarang tidak dihuni lagi dan

hanya dipakai sebagai tempat meletakkan peralatan tenun tradisional. Oleh anak dari Datuk Pesisir pengelolaan perawatannya diserahkan kepada Pemkab Siak.

Rumah Datuk Pesisir merupakan rumah kayu yang berbentuk panggung dengan ditopang oleh 42 buah pondasi penopang dari bata plesteran. Atap rumah terbuat dari seng sedangkan komponen lainnya seperti dinding, lantai, dan plafon dari kayu. Rumah ini terbagi menjadi dua bagian yaitu bagian depan yang berfungsi sebagai ruang tamu dan ruang keluarga serta bagian belakang yang berfungsi sebagai dapur dan ruang makan. Interior bangunannya tidak memiliki ruang-ruang kamar yang dilengkapi oleh 10 buah pintu dan 26 buah jendela. Bangunan rumah ini terletak di sebelah barat Sungai Siak menghadap ke arah utara. Di bagian luar sisi kiri bangunannya terdapat bak penampungan air. Bangunannya dibatasi dengan pagar besi pada bagian depannya dan pagar tembok pada sisi lainnya.

Kondisi rumah kurang terawat dan sebagian atapnya sudah bocor, terutama pada bagian tengah yang membagi antara bangunan depan dan bangunan belakang yang mengakibatkan proses pelapukan komponen kayunya menjadi lebih cepat. Selain itu lima buah penopang bangunan sudah dalam kondisi miring. Dahulu Rumah Datuk Sekarang Tempat Penyimpanan Tenun Tradisional.

(a)

(b)

(c)



Sumber: Survei Lapangan, 2019

Gambar 5.10

Rumah Datuk Pesisir

(a)Tampak depan bangunan yang menunjukkan gaya bangunan Melayu berbentuk rumah panggung,(b) pintu dan jendela yang menunjukkan gaya bangunan transisi yang sudah menggunakan bahan kayu, (c) dan tampak lingkungan yang sudah di kelilingi pagar.



Tabel 5.2
Karakteristik Bangunan Bersejarah

No.	Nama Bangunan	Tahun didirikan	Usia Bangunan	Fungsi Bangunan Masa Dahulu	Fungsi Bangunan Masa Kini	Status Kepemilikan	Bentuk Bangunan	Foto Bangunan
A. Karakteristik Bangunan Bersejarah di Desa Benteng Hulu, Desa Kampung Tengah, dan Desa Benteng Hilir								
1.	Tangsi Belanda Siak	1800	219 Tahun	Tangsi Militer Belanda	Tidak difungsikan untuk fungsi tertentu	PEMKAB. Siak	Arsitektur Bangunan Belanda	
2.	Rumah Controluer Siak	1930	89 Tahun	Kantor Pemerintahan Belanda	Kantor Camat Mempura	PEMKAB. Siak	Arsitektur Bangunan Belanda	
3.	Rumah Landraad Siak	1819	200 Tahun	Kantor Pemerintahan Kolonial Belanda	Kantor Cabang Dinas Pendidikan di Kecamatan Mempura	PEMKAB. Siak	Arsitektur Bangunan Belanda	
4.	Rumah Datuk Pesisir	1920	98 Tahun	Rumah Tinggal	Tempat Penyimpanan Tenun	PEMKAB. Siak	Arsitektur Bangunan Belanda	

Sumber: Hasil Analisis, 2019



Peta 5.11 Peta Sebaran Bangunan

5.1.2 Karakteristik non Fisik Kawasan

Menurut para akademisi, kesadaran masyarakat mengenai kegiatan revitalisasi di kawasan di Desa Benteng Hulu, Desa Kampung Tengah dan Desa Benteng Hilir sudah cukup baik. Mereka setuju akan kegiatan revitalisasi dan bersedia untuk mendukung kegiatan tersebut. Namun, berdasarkan survey lapangan, beberapa masyarakat masih ada yang tidak peduli dengan kegiatan revitalisasi.

Karakteristik kawasan non fisik adalah suatu lokasi keberadaan benda atau bangunan bersejarah yang berkaitan dengan masa lalu dan saling berkaitan antara satu bangunan atau benda bersejarah dengan cerita sejarah yang ada. Sehingga adanya pembuktian dari suatu kejadian di masa lampau. Kawasan bersejarah dalam pengertian yang luas diartikan segala sesuatu yang ada di alam semesta pada masa lalu, baik yang berupa non fisik maupun fisik dan didalamnya terdapat komponen yang saling terkait dan saling melengkapi sehingga membentuk suatu ekosistem.

Badan atau organisasi yang terkait dengan kegiatan revitalisasi di kawasan Desa Benteng Hulu, Desa Kampung Tengah dan Desa Benteng Hilir adalah Badan Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Sumatera Barat, yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Sumatera Barat pada tahun 2015. Kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai upaya revitalisasi adalah membuat Daftar Pemutakhiran Data Cagar Budaya Kabupaten Siak Tahun 2017.

Karakteristik sosial ekonomi masyarakat ini di dapat dari hasil kondisi lapangan dan hasil wawancara terhadap masyarakat dan dinas terkait. Berikut

adalah karakteristik sosial dan karakteristik ekonomi masyarakat di kawasan bersejarah:

5.1.2.1 Karakteristik Sosial

Berdasarkan observasi lapangan di Desa Benteng Hulu, Desa Kampung Tengah, dan Desa Benteng Hilir dan Dinas-Dinas terkait, Jumlah penduduk Desa Benteng Hulu sebesar 2.910 jiwa, Desa Kampung Tengah sebesar 438 jiwa dan Desa Benteng Hilir sebesar 1.972 jiwa. Kepadatan penduduk sebesar 0,19 jiwa/km² untuk Desa Benteng Hulu, 0,04 jiwa/km² untuk Desa Kampung Tengah dan, 0,12 jiwa/km² untuk Desa Benteng Hilir. Sarana dan Prasarana di Desa Benteng Hulu, Desa Kampung Tengah, dan Desa Benteng Hilir yang sudah memadai, jumlah sarana yang ada di Desa Benteng Hulu, Desa Kampung Tengah, dan Desa Benteng Hilir antara lain sarana Pendidikan, sarana Kesehatan, dan sarana Peribadatan.

Hasil wawancara dari masyarakat Desa Benteng Hulu, Desa Kampung Tengah, dan Desa Benteng Hilir menjawab kadang-kadang dalam mengikuti kegiatan sosial yang ada di desa-desa tersebut dan ada juga masyarakat lainnya menjawab sering mengikuti kegiatan sosial. Alasan warga yang kadang-kadang dalam mengikuti kegiatan sosial yaitu waktu kerja mereka yang menuntut mereka harus berada di lokasi kerja sesuai dengan waktu yang di tentukan oleh tempat kerjanya, sehingga waktu mereka untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial berkurang.

5.1.2.2 Karakteristik Ekonomi

Berdasarkan hasil wawancara dari masyarakat yang sudah dilakukan, diketahui bahwa Pendapatan masyarakat Kawasan Mempura sangat beragam sesuai dengan jenis pekerjaan yang dimiliki oleh penduduknya. Penduduk Kawasan Mempura mempunyai 5 jenis mata pencaharian yaitu sebagai pegawai negeri sipil (PNS), pensiunan, petani, dan pedagang. Mata pencaharian yang mayoritas di kawasan ini adalah sebagai petani dan pedagang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 5.3.

Tabel 5.3
Penduduk Menurut Mata Pencarian Lima Tahun Terakhir di
Kawasan Mempura

No	Mata Pencarian	Jumlah Penduduk				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	PNS	1.580	1.489	1.989	1.789	1.850
2	Pensiunan	4.176	4.804	3.021	2.489	2.570
3	Petani	4.904	5.178	5.421	6.489	6.889
4	Pedagang	4.623	4.700	5.933	6.007	6890
5	TNI/POLRI	2.217	2.204	2.930	2989	3073
	Total	17.500	18.375	19.294	20.259	21.272

Sumber: Kantor Camat Mempura, 2019

Dari tabel 5.3 dapat diketahui bahwa hampir seluruh jenis mata pencaharian mengalami kenaikan jumlah penduduknya. Seperti pada jumlah penduduk yang bermata pencarian sebagai pedagang di Kawasan Mempura mengalami kenaikan di Tahun 2015 sampai 2018. Jumlah penduduk yang pensiun mengalami penurunan di Tahun 2016. Namun, untuk jenis mata pencarian sebagai petani mengalami peningkatan mulai Tahun 2014 hingga ke Tahun 2018, dan jumlah TNI/POLRI juga mengalami peningkatan dimulai dari tahun 2016. Adapun

pendapatan atau penghasilan per bulan masyarakat Mempura dapat dilihat pada tabel 5.4 berikut:

Tabel 5.4
Jumlah Penghasilan per Bulan Masyarakat di Kawasan Mempura

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah Penghasilan
1	PNS	Rp. 3000.000-Rp.4.000.000,-
2	Pensiunan	Rp. 1.500.000-Rp.2.500.000,-
3	Petani	Rp. 500.000-Rp.700.000,-
4	Pedagang	Rp. 500.000-Rp.800.000,-
5	TNI/POLRI	Rp. 3000.000-Rp.5.000.000,-

Sumber: Kantor Camat Tahun 2018.

Selain karena faktor jenis mata pencarian penduduk, tingkat pendapatan masyarakat Kawasan Mempura yang khusus pada bidang pedagang, sangat dipengaruhi oleh jumlah wisatawan yang datang berkunjung.

5.1.3 Karakteristik Lingkungan

Berdasarkan pengamatan kondisi di lapangan, terdapat karakteristik lingkungan pada wilayah penelitian terdiri dari Topografi, Hidrologi, Iklim, dan Demografi.

a. Topografi

Topografi wilayah Bersejarah Benteng Mempura memiliki ketinggian hingga 1-3 m dpl, dan tingkat kelerengan lahan berkisar antara 0–3%. Kawasan ini memiliki 2 (dua) jenis tanah yaitu: tanah organosol dan gley humus dalam bentuk rawa-rawa atau tanah basah. Jenis tanah ini kurang sesuai untuk bangunan yang mempunyai beban berat, untuk bangunan bertingkat perlu dilakukan pemadatan

tanah atau menggunakan teknik pondasi yang baik sesuai dengan kondisi tanah yang ada. Struktur geologi di Kawasan Bersejarah Mempura didominasi oleh jenis batuan aluvium tua, sediment. Secara keseluruhan struktur geologi seperti masih bersifat lepas hingga agak padu, kelulusan airnya rendah hingga sedang, daya dukung pondasinya rendah hingga sedang, dan kesuburan potensial tanahnya rendah hingga tinggi.

b. Hidrologi

Kondisi hidrologi di wilayah Kawasan Bersejarah Mempura didukung oleh potensi air permukaan (sungai), air tanah dalam, air tanah dangkal, dan akuifer produktivitas tinggi. Kondisi seperti ini mampu memberikan dukungan yang baik terhadap ketersediaan air baku untuk kebutuhan air bersih, kegiatan pertanian, dan kegiatan perkotaan lainnya. Dalam konteks ini, peranan vegetasi terutama hutan sangat penting dalam konservasi air tanah. Permukaan air terutama pada gua-gua karst dan sumur penduduk banyak dipengaruhi oleh naik turunnya muka air laut, memberikan indikasi tentang pentingnya perlindungan daerah pantai dari pengaruh abrasi.

c. Iklim

Kondisi iklim wilayah Kawasan Bersejarah Mempura ini memiliki Curah hujan berkisar antara 1.869,6–1.977,7 mm/tahun, dengan suhu udara antara 25°C–32°C. Berdasarkan intensitas curah hujan, maka Kawasan Bersejarah Benteng Mempura termasuk kedalam wilayah iklim tropis basah yang dapat mendukung upaya pengembangan wilayah.

d. Demografi

Kecamatan Mempura merupakan bagian dari wilayah Kota Siak Sri Indrapura bersama dengan Kecamatan Siak. Menurut data kependudukan Kecamatan Mempura yang terdapat pada data Kecamatan Dalam Angka tahun 2018, di Kecamatan Mempura memiliki penduduk berjumlah 12.376 jiwa dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5.5
Jumlah Penduduk per Desa di Kecamatan Mempura

No	Desa/Kelurahan	Jumlah Penduduk
1	Benteng Hulu	2.910
2	Benteng Hilir	1.972
3	Paluh	1.360
4	Kota Ringin	1.097
5	Kampung Tengah	438
6	Sungai Mempura	3.593
7	Merempan Hilir	2.129
Jumlah		12.376

Sumber : Kecamatan Mempura dalam Angka 2018.

5.2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Revitalisasi Kawasan Bersejarah

Faktor pendukung dan faktor penghambat merevitalisasi kawasan bersejarah ini didapat dari kondisi lapangan dan hasil wawancara terhadap pemilik bangunan bersejarah dan dinas terkait. Berikut adalah faktor pendukung dan faktor penghambat revitalisasi kawasan bersejarah:

5.2.1. Bangunan Bersejarah

Bangunan bersejarah merupakan salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam melakukan kegiatan revitalisasi karena merupakan salah satu objek yang sangat berpengaruh pada suatu kawasan. Berikut adalah faktor-faktor revitalisasi dari aspek bangunan bersejarah:

1. Masih banyak bangunan bersejarah yang menunjukkan karakteristik aslinya. Hal ini dapat dilihat pada kondisi lapangan bahwa dari 4 bangunan bersejarah yang diteliti, 2 bangunan bersejarah masih berkarakteristik aslinya dan 2 bangunan bersejarah lagi sudah tidak memiliki karakter aslinya karena sudah terjadi banyak perubahan pada bangunan bersejarah tersebut, yaitu Benteng Tangsi Belanda. Hal ini tentu dinilai dapat menjadi faktor pendorong dari revitalisasi karena masih banyak bangunan bersejarah yang mempertahankan karakteristik asli dari bangunan tersebut, karena dengan masih adanya bangunan yang memiliki karakteristik aslinya tentu akan mempunyai nilai-nilai yang tinggi pada bangunan maupun kawasan yang ada disekitar bangunan bersejarah tersebut.
2. Biaya perawatan bangunan bersejarah yang sudah disediakan. Namun ada juga bangunan itu sendiri harus mengeluarkan dana yang cukup relatif tinggi, Relatif tinggi yang dimaksud adalah tergantung dari bentuk perawatan dan perbaikan pada masing-masing bangunan bersejarah. Hanya saja pemilik bangunan Tangsi belanda menyatakan bahwa biaya perawatan yang tinggi tersebut juga dikarenakan perbaikan pada bangunan bersejarah tersebut harus menggunakan bahan yang sama ataupun sejenis, sehingga harus mengeluarkan biaya yang lebih agar bangunan tersebut tidak memiliki banyak

perubahan dan mempunyai kualitas yang sama. Hal ini tentu menjadi salah satu faktor penghambat dari merevitalisasi karena perawatan bangunan bersejarah yang dirasakan oleh pemilik bangunan bersejarah yang cukup tinggi.

3. Bangunan bersejarah yang ditetapkan sebagai cagar budaya sudah berjumlah 4 bangunan yang terdapat di desa benteng hulu, kampung tengah dan benteng Hilir. Hal ini sudah sepenuhnya diambil alih oleh pemerintah. Hal ini juga disampaikan oleh Kepala Sub Bidang Cagar Budaya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Siak yang mengatakan:

“Ya, seluruh bangunan dan makam bersejarah di kecamatan mempura ini sudah lama ditetapkan sebagai cagar budaya, karena menurut kami semua peninggalan sejarah di tempat ini sudah sepenuhnya jadi tugas dan tanggung jawab kami merawat dan menjaganya”

Hal ini tentu menjadi salah satu faktor pendukung karena semua bangunan bersejarah telah dilakukan penetapan cagar budaya, karena sebagai yang diketahui dengan dilakukannya penetapan maka akan dapat menekan kerusakan pada bangunan bersejarah tersebut karena telah memiliki aturan-aturan yang berbeda dengan bangunan lainnya.

4. Penetapan cagar budaya kepada bangunan yang telah dilakukan inventarisasi. Kegiatan ini akan dilakukan kedepannya setelah selesai dilakukannya inventarisasi. Hal ini juga disampaikan oleh Kepala Sub Bidang Cagar Budaya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Siak yang mengatakan:

“Saat ini sedang mendata, selanjutnya data-data yang di inventarisasi tersebut akan diberikan kepada Provinsi untuk dilakukan penetapan cagar budaya, setelah itu akan dilakukan pemeringkatan bangunan bersejarah tersebut untuk menetapkan bangunan bersejarah tersebut milik Kota atau milik Provinsi. Kemudian akan dilakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk memperkenalkan bangunan-bangunan bersejarah tersebut”

Berdasarkan hasil wawancara diatas, akan dilakukannya penetapan cagar budaya terhadap bangunan bersejarah tersebut dapat menjadi faktor pendukung revitalisasi, karena dengan dilakukannya penetapan kepada bangunan tersebut, maka bangunan tersebut memiliki aturan-aturan yang berbeda dengan bangunan lainnya agar tidak rusak, hancur, dan hilang.

5. Bangunan bersejarah yang tidak terawat. Hal tersebut dapat dilihat dari observasi lapangan yang menemukan bangunan bersejarah lainnya yang tidak terdata dan sudah mulai ditutupi semak belukar dalam keadaan tidak terawat. Hal ini dikarenakan pada bangunan tersebut sudah tidak ada melakukan aktivitas. Hal ini tentu menjadi faktor penghambat revitalisasi karena masih ada bangunan bersejarah yang tidak terawat.

5.2.2. Kawasan

Kawasan merupakan salah aspek yang perlu diperhatikan dalam upaya kegiatan revitalisasi, karena pada suatu kawasan mempunyai nilai-nilai yang bisa dikembangkan sesuai dengan peruntukannya, salah satunya yaitu kawasan bangunan bersejarah. Berikut adalah faktor-faktor revitalisasi dari aspek kawasan:

1. Terdapat kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan peruntukan kawasan. Kawasan bangunan bersejarah merupakan kawasan lindung yang tidak boleh digunakan oleh kegiatan budidaya. Namun pada kenyataannya terdapat kegiatan-kegiatan yang dapat mengganggu fungsi dari kawasan tersebut salah satunya adalah banyaknya masyarakat yang melakukan hal-hal yang tidak wajar posisinya sangat berdekatan dengan bangunan bersejarah. Hal tersebut tentu menjadi faktor penghambat pelestarian karena dapat mengurangi nilai-nilai penting suatu kawasan lindung dan tidak sesuai dengan peruntukan nya,
2. Penggunaan pedestrian pada kawasan bangunan bersejarah yang sudah maksimal. Hal ini dilihat pada kondisi lapangan bahwa sudah adanya pedestrian pejalan kaki yang digunakan sesuai dengan peruntukannya. Hal ini tentu merupakan faktor pendorong dalam revitalisasi karena pedestrian merupakan salah satu indikator dalam melakukan penilaian kawasan untuk membuat zonasi.

5.2.3. Kebijakan Pemerintah

Kebijakan merupakan aspek yang dapat menggerakkan suatu kegiatan termasuk kegiatan revitalisasi. Aspek kebijakan perlu diperkuat karena kebijakan merupakan aspek terpenting untuk memaksimalkan kegiatan revitalisasi kawasan bangunan bersejarah serta menjadi patokan dalam melakukan upaya kegiatan revitalisasi kawasan bangunan bersejarah. Berikut adalah faktor-faktor revitalisasi dari segi aspek kebijakan:

1. Tidak adanya Tim Ahli sendiri Kabupaten Siak membuat kurangnya tenaga profesional dalam melakukan upaya merevitalisasikan. Hal ini juga dikatakan

oleh Kepala Sub Bidang Cagar Budaya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Siak yang mengatakan:

“Belum cukup, alangkah baiknya kita mempunyai Tim Ahli sendiri yang bisa lebih fokus kepada revitalisasi yang ada di Kabupaten Siak, karena sekarang tentu kami berbagi waktu dan bergantung sesuai dengan waktu tim ahli dan disesuaikan dengan anggaran”

Berdasarkan wawancara diatas, belum adanya Tim Ahli khusus Kabupaten Siak atau kurangnya tenaga profesional dalam melakukan upaya revitalisasi dapat menjadi faktor penghambat dalam revitalisasi, karena hal tersebut dapat menghambat kelancaran upaya revitalisasi baik dari segi fokus kegiatan dan waktu.

2. Tim Ahli yang digunakan sangat paham dan mengerti serta sangat berkompeten sesuai dengan *job description*. Terlepas dari belum adanya Tim Ahli sendiri khusus Kabupaten Siak, namun tim ahli yang digunakan saat ini dinilai menjadi faktor pendukung karena sangat berkompeten dan dapat membantu dalam kegiatan revitalisasi ini. Hal ini disampaikan oleh Kepala Sub Bidang Cagar Budaya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Siak yang mengatakan:

“Tim ahli yang kita pakai dari BPCB Sumatera Barat ini juga membantu ya karena dia paham dan mengerti apa yang harus dilakukan sesuai job description masing-masing.”

Berdasarkan wawancara diatas, hal tersebut dinilai menjadi faktor pendukung karena tim ahli yang digunakan sekarang sangat membantu upaya revitalisasi salah satunya adalah inventarisasi yang sedang dilakukan.

3. Peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Siak yang saat ini melakukan inventarisasi dan perlindungan kawasan bangunan bersejarah berdasarkan anggaran kepada bangunan bersejarah yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya. Hal ini juga disampaikan oleh Kepala Sub Bidang Cagar Budaya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Siak yang mengatakan:

“Sejauh ini peran dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Siak yaitu adalah melakukan revitalisasi dengan mendata bangunan-bangunan bersejarah yang hingga saat ini masih tahap proses. Kemudian adalah memberikan perlindungan terhadap bangunan bersejarah yang telah ditetapkan berdasarkan anggaran pemerintah.”

Selain itu, pihak pemerintah sudah pernah datang untuk mendata maupun survey kawasan bangunan bersejarah tersebut.

Tabel 5.6
Hasil Wawancara Terkait Inventarisasi

No.	Pemilik Bangunan	Inventarisasi	
		Ada	Tidak Ada
1.	Benteng Tangsi Belanda	✓	
2.	Rumah Controleur Siak	✓	
3.	Rumah Landraad Siak	✓	
4.	Rumah Datuk Pesisir	✓	

Sumber: Hasil Wawancara Tahun 2019

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Siak juga sudah pernah melakukan penjagaan dan revitalisasi kepada cagar budaya yang telah dilakukan penetapan seperti Benteng Tangsi Belanda dan Rumah Datuk Pesisir. Hal ini juga disampaikan oleh Kepala Sub Bidang Cagar Budaya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Siak yang mengatakan:

“Sejauh ini yang sudah kami lakukan adalah meletakkan juru kunci pelihara pada Benteng Tangsi, dan merevitalisasi bangunan bersejarah yang rusak seperti Rumah Datuk Pesisir. Salah satunya seperti bagian atap dan pintu yang rusak”

Berdasarkan hasil wawancara diatas, adanya peran Kepala Sub Bidang Cagar Budaya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Siak dapat menjadi faktor pendukung dalam upaya revitalisasi, karena inventarisasi dan memberikan perlindungan pada bangunan bersejarah merupakan salah satu langkah dan kegiatan revitalisasi.

4. Peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai pekerjaan fisik secara teknis dalam revitalisasi bangunan bersejarah. Hal ini juga

disampaikan oleh Kepala Seksi Penataan Bangunan Dinas Pekerjaan umum dan penataan Ruang Kabupaten Siak yang mengatakan:

“Peranan kami adalah sebagai pelaksanaan pekerjaan fisik.Bisa dikatakan lebih secara teknisnya.Seperti memperbaiki bagian-bagian dari bangunan bersejarah yang rusak.”

Berdasarkan wawancara diatas, adanya peranan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat menjadi faktor pendukung revitalisasi, karena ini merupakan suatu kegiatan dari segi fisik.

5.2.4. Peranan Masyarakat

Masyarakat merupakan salah satu aspek yang harus diperhatikan dalam melakukan upaya revitalisasi, karena bangunan bersejarah di Kecamatan Mempura diantaranya 4 bangunan bersejarah yang memiliki oleh pemerintah pusat. Berikut adalah faktor-faktor revitalisasi dari aspek peranan masyarakat:

1. Kesadaran masyarakat yang tinggi dalam mempertahankan bangunan bersejarah tersebut dengan biaya menggunakan biaya dari pemerintah. Hal ini dilihat pada kondisi lapangan karena hingga saat ini masyarakat melakukan perawatan pada bangunan bersejarah milik Pemerintah Kabupaten Siak dengan biaya dari pemerintah. Mereka melakukan perawatan kepada bangunan bersejarah tersebut sesuai dengan kemampuan dari pemerintah. Hal ini juga dapat dilihat 2 dari 2 bangunan bersejarah yang dimiliki oleh pemerintah ini masih terawat dan di tempati oleh intansi dan yang lainnya. Sedangkan 2 bangunan lagi masih terawat karena belum ada kegiatan yang dilakukan di bangunan bersejarah tersebut. Hal ini tentu menjadi faktor

pendukung dalam melakukan upaya pelestarian karena dengan kesadaran masyarakat tersebut dapat mempertahankan bangunan bersejarah yang ada.

2. Masyarakat sangat terbuka dan sangat membantu proses inventarisasi yang dilakukan oleh pemerintah. Masyarakat pun mau memberikan informasi dan bukti-bukti sejarah yang tertinggal yang dapat dijadikan sebagai peninggalan sejarah. Masyarakat rumah juga mau memberikan masukan dan sangat mau terlibat dalam upaya kegiatan revitalisasi ini. Hal ini dapat dilihat dari respon masyarakat yang tanggap ketika proses inventarisasi dilakukan dan tentu hal ini menjadi faktor pendukung dalam melakukan revitalisasi kawasan bangunan bersejarah, karena masyarakat merupakan faktor penting untuk melakukan revitalisasi secara bersamaan.

5.2.5. Pendanaan / Anggaran

Pendanaan merupakan salah satu aspek dalam bidang keuangan yang digunakan untuk memaksimalkan upaya kegiatan merevitalisasi kawasan bangunan bersejarah. Belum cukupnya anggaran yang disediakan oleh pemerintah untuk upaya kegiatan revitalisasi merupakan salah satu faktor penghambat dalam melakukan upaya revitalisasi. Hal ini juga disampaikan oleh Kepala Sub Bidang Cagar Budaya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Siak yang mengatakan:

“Sudah ada tetapi sedikit dan tidak cukup. Karena kegiatan revitalisasi ini banyak ya, maka dari itu kami melakukan semuanya secara perlahan sesuai dengan anggaran”

Anggaran yang digunakan dalam kegiatan revitalisasi ini berasal dari pemerintah kabupaten siak. Berdasarkan hasil wawancara diatas, belum cukupnya

anggaran yang disediakan pemerintah untuk upaya revitalisasi dapat menjadi faktor penghambat dalam melakukan kegiatan revitalisasi, karena dengan keterbatasan anggaran dari pemerintah tersebut membuat Kepala Sub Bidang Cagar Budaya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Siak melakukan upaya kegiatan sesuai dengan anggaran yang ada.

Berikut adalah hasil rangkuman dan kondisi lapangan dari faktor-faktor diatas pada Tabel 5.7 :

Tabel 5.7
Rangkuman Faktor-Faktor dan Kondisi Lapangan

Indikator	Faktor	Sumber	Kondisi Lapangan
Bangunan Bersejarah	Masih banyak bangunan bersejarah yang menunjukkan karakteristik aslinya.	Observasi lapangan	2 dari 4 bangunan bersejarah masih mempunyai karakteristik aslinya. Sedangkan 2 bangunan bersejarah sudah berubah karena banyaknya perubahan pada bangunan bersejarah.
	Biaya perawatan bangunan bersejarah yang sudah disediakan.	Observasi Lapangan	Biaya perawatan bangunan bersejarah yang sudah disediakan. Namun ada juga bangunan itu sendiri harus mengeluarkan dana yang cukup relatif tinggi. Relatif tinggi yang dimaksud adalah tergantung dari bentuk perawatan dan perbaikan pada masing-masing bangunan bersejarah.
	Bangunan bersejarah yang ditetapkan sebagai cagar budaya hanya baru berjumlah 4 bangunan.	Observasi Lapangan Kepala Sub Bidang Cagar Budaya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Siak	Bangunan bersejarah yang ditetapkan sebagai cagar budaya sudah berjumlah 4 bangunan yang terdapat di desa benteng hulu, kampung tengah dan benteng Hilir
	Penetapan cagar budaya kepada bangunan yang telah dilakukan inventarisasi.	Kepala Sub Bidang Cagar Budaya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Siak	<i>“Saat ini sedang mendata, selanjutnya data-data yang di inventarisasi tersebut akan diberikan kepada Provinsi untuk dilakukan penetapan cagar budaya, setelah itu akan dilakukan pemeringkatan bangunan bersejarah tersebut untuk menetapkan bangunan bersejarah tersebut milik Kota atau milik Provinsi. Kemudian akan dilakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk memperkenalkan bangunan-bangunan bersejarah tersebut”</i>

Indikator	Faktor	Sumber	Kondisi Lapangan
	Bangunan bersejarah yang tidak terawat.	Observasi Lapangan	Hal tersebut dapat dilihat dari observasi lapangan yang menemukan bangunan bersejarah lainnya yang tidak terdata dan sudah mulai ditutupi semak belukar dalam keadaan tidak terawat. Hal ini dikarenakan pada bangunan tersebut sudah tidak ada melakukan aktivitas. Hal ini tentu menjadi faktor penghambat revitalisasi karena masih ada bangunan bersejarah yang tidak terawat.
Kawasan	Terdapat kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan peruntukan kawasan	Observasi lapangan	Terdapat kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan peruntukan kawasan. Kawasan bangunan bersejarah merupakan kawasan lindung yang tidak boleh digunakan oleh kegiatan budidaya. Namun pada kenyataannya terdapat kegiatan-kegiatan yang dapat mengganggu fungsi dari kawasan tersebut salah satunya adalah banyaknya masyarakat yang melakukan hal-hal yang tidak wajar posisinya sangat berdekatan dengan bangunan bersejarah.
	Penggunaan pedestrian pada kawasan bangunan bersejarah yang sudah maksimal	Observasi lapangan	Penggunaan pedestrian pada kawasan bangunan bersejarah yang sudah maksimal. Hal ini dilihat pada kondisi lapangan bahwa sudah adanya pedestrian pejalan kaki yang digunakan sesuai dengan peruntukannya.
Kebijakan	Tidak adanya Tim Ahli sendiri Kabupaten Siak membuat kurangnya tenaga profesional dalam melakukan upaya merevitalisasikan	Kepala Sub Bidang Cagar Budaya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Siak	<i>“Belum cukup, alangkah baiknya kita mempunyai Tim Ahli sendiri yang bisa lebih fokus kepada revitalisasi yang ada di Kabupaten Siak, karena sekarang tentu kami berbagi waktu dan bergantung sesuai dengan waktu tim ahli dan disesuaikan dengan anggaran”</i>
	Tim Ahli yang digunakan sangat paham dan mengerti serta sangat berkompeten sesuai dengan job description.	Kepala Sub Bidang Cagar Budaya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Siak	<i>“Tim ahli yang kita pakai dari provinsi ini juga membantu ya karena dia paham dan mengerti apa yang harus dilakukan sesuai job description masing-masing.”</i>
	Peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Siak	Kepala Sub Bidang Cagar Budaya, Dinas Kebudayaan dan	<i>“Sejauh ini peran dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Siak yaitu adalah melakukan revitalisasi dengan</i>

Indikator	Faktor	Sumber	Kondisi Lapangan
	yang saat ini melakukan inventarisasi dan perlindungan kawasan bangunan bersejarah berdasarkan anggaran kepada bangunan bersejarah yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya.	Pariwisata Kabupaten Siak	<i>mendata bangunan-bangunan bersejarah yang hingga saat ini masih tahap proses. Kemudian adalah memberikan perlindungan terhadap bangunan bersejarah yang telah ditetapkan berdasarkan anggaran pemerintah.”</i>
	Peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai pekerjaan fisik secara teknis dalam revitalisasi bangunan bersejarah	Kepala Seksi Penataan Bangunan Dinas Pekerjaan umum dan penataan Ruang Kabupaten Siak	<i>“Peranan kami adalah sebagai pelaksanaan pekerjaan fisik. Bisa dikatakan lebih secara teknisnya. Seperti memperbaiki bagian-bagian dari bangunan bersejarah yang rusak.”</i>
Peranan Masyarakat	Kesadaran masyarakat yang tinggi dalam mempertahankan bangunan bersejarah tersebut dengan biaya menggunakan biaya dari pemerintah.	Masyarakat	Hal ini juga dapat dilihat 2 dari 2 bangunan bersejarah yang dimiliki oleh pemerintah ini masih terawat dan di tempati oleh intansi dan yang lainnya. Sedangkan 2 bangunan lagi masih terawat karena belum ada kegiatan yang dilakukan di bangunan bersejarah tersebut.
Pendanaan / Anggaran			

Sumber: Hasil Analisis, 2019

Berdasarkan pembahasan diatas, maka berikut adalah faktor pendukung dan faktor penghambat revitalisasi kawasan bersejarah yang ada di Desa Benteng Hulu, Desa Kampung Tengah, dan Desa Benteng Hilir yang dapat dilihat pada Tabel 5.8:

Tabel 5.8
Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Revitalisasi

Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
1. Masih banyak bangunan bersejarah yang menunjukkan karakteristik aslinya. 2. Adanya kerjasama dengan dinas-dinas terkait yang berhubungan dengan pelaksanaan revitalisasi kawasan bangunan bersejarah seperti Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Siak, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Siak dan BPCB Sumatera Barat. 3. Penetapan cagar budaya kepada bangunan yang telah dilakukan inventarisasi. 4. Tim Ahli yang digunakan sangat paham dan mengerti serta sangat berkompeten sesuai dengan <i>job description</i>. 5. Peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Siak yang saat ini melakukan inventarisasi dan perlindungan bangunan bersejarah berdasarkan anggaran kepada bangunan bersejarah yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya. 6. Peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai pekerjaan fisik secara teknis dalam revitalisasi bangunan bersejarah. 7. Kesadaran masyarakat yang tinggi dalam mempertahankan bangunan bersejarah tersebut dengan biaya dari Pemerintah. 8. Masyarakat sangat terbuka dan sangat membantu. 9. Kesiapan masyarakat terhadap kegiatan pelaksanaan revitalisasi kepada bangunan bersejarah.	1. Biaya perawatan bangunan bersejarah yang relatif tinggi. 2. Terdapat kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan peruntukan kawasan. 3. Penggunaan pedestrian pada kawasan bangunan bersejarah yang belum maksimal. 4. Tidak adanya Tim Ahli sendiri Kabupaten Siak membuat kurangnya tenaga profesional dalam melakukan upaya pelaksanaan revitalisasi. 5. Belum cukupnya anggaran yang disediakan oleh pemerintah untuk upaya kegiatan revitalisasi.

Sumber: Hasil Analisis, 2019

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan tujuan dan hasil penelitian yaitu untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam melaksanakan revitalisasi kawasan bersejarah di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak didapati kesimpulan sebagai berikut:

1. Kawasan bersejarah di Kecamatan Mempura merupakan lanskap budaya yang menampilkan bangunan-bangunan pemerintahan Kolonial Belanda. Beberapa karakteristik kawasan yang terdapat pada Desa Benteng Hulu, Desa Kampung Tengah, dan Desa Benteng Hilir, sebagai berikut:
 - a. Karakteristik fisik kawasan pada kawasan Mempura yang terdiri dari penggunaan lahan diklasifikasikan sebagai perkantoran, permukiman, perdagangan jasa, ruang terbuka hijau, kemudian bangunan kuno yang terdapat pada kawasan mempura memiliki gaya arsitektur kolonial, kawasan tersebut dahulu merupakan permukiman orang Belanda. Di Desa Benteng Hulu, Desa Kampung Tengah, dan Desa Benteng Hilir masing-masing memiliki 4 peninggalan bangunan bersejarah yang terdapat pada kawasan Mempura, dimana pada 4 bangunan bersejarah yang ada di Desa Benteng Hulu, Desa Kampung Tengah, dan Desa Benteng Hilir memiliki 3 bangunan berkarakteristik Kolonial Arsitek Transisi yaitu bangunan Tangsi Belanda, Rumah Controlluer Siak, Rumah Landraad Siak, dan 1 bangunan berkarakteristik Rumah Tradisional Melayu yaitu Rumah Datuk Pesisir.

- b. Karakteristik non fisik kawasan yang terdiri dari karakteristik sosial pada kawasan mempura memiliki kepadatan penduduk di Desa Benteng Hulu sebesar 0,19 jiwa/km² dan karakteristik ekonomi di kawasan mempura memiliki jenis mata pencaharian terbanyak pada pekerjaan pedagang dan petani.
 - c. Karakteristik lingkungan yang terdiri dari topografi yang memiliki ketinggian hingga 1-3 mdpl dan tingkat kelerengan lahan berkisar antara 0-3%, hidrologi di wilayah kawasan mempura didukung oleh potensi air permukaan (sungai), air tanah dalam, air tanah dangkal dan akuifer produktivitas tinggi, iklim di wilayah kawasan mempura ini memiliki Curah hujan berkisar antara 1.869,6-1.977,7 mm/tahun, dengan suhu udara anatar 25 °C-32 °C, demografi di wilayah kawasan mempura memiliki penduduk berjumlah 12.376 jiwa, jumlah penduduk paling banyak pada desa benteng hulu berjumlah 2.910 jiwa,
2. Terdapat beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat revitalisasi di Desa Benteng Hulu, Desa Kampung Tengah, dan Desa Benteng Hilir, yaitu dari Segi bangunan bersejarah, kawasan bersejarah, kebijakan pemerintah, peranan masyarakat, dan pendanaan/anggaran. Salah satu faktor pendukung yang terjadi adalah Masih banyak bangunan bersejarah yang menunjukkan karakteristik aslinya dan adanya peran dinas terkait dalam melakukan revitalisasi kawasan bangunan bersejarah, dan salah satu faktor penghambat yang terjadi adalah biaya perawatan bangunan bersejarah yang relatif tinggi dan terdapat kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan peruntukan kawasan.

6.2 Saran

Dari penelitian yang dilakukan, saran yang dapat diberikan adalah:

1. Perlu adanya kebijakan pemerintah daerah terhadap keberadaan bangunan bersejarah agar tidak terjadi lagi hilangnya bangunan bersejarah yang diganti dengan bangunan baru .
2. Perlunya peran pemerintah yang aktif untuk memperhatikan kawasan bangunan bersejarah yang tersisa, karena peran pemerintah sangat penting untuk menjamin keberadaan bangunan bersejarah
3. Perlunya sosialisasi dan promosi kepada masyarakat terhadap kawasan bangunan bersejarah agar lebih dikenal oleh masyarakat. Karena masih banyak ketidak tahuan masyarakat akan keberadaan kawasan bangunan bersejarah.
4. Perlunya dilakukan revitalisasi secara fisik terhadap kawasan bangunan bersejarah yang ada di Desa Benteng Hulu, Desa Kampung Tengah, dan Desa Benteng Hilir agar bangunan tetap terawat dan untuk meningkatkan nilai sejarah pada bangunan maupun kawasan sekitar bangunan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Attoe, W. 1988. *Perlindungan Benda Bersejarah* dalam Catanese, A.J Perencanaan Kota. Diterjemahkan oleh Ir. Wahyudi. Jakarta : penerbit Erlangga
- Adishakti Laretna T, (2002) *Pusaka dan Pelestariannya perlu Sistem Yang mengakar dan menyeluruh*, artikel di Majalah AIKONI edisi 134, 2002.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Manajemen Penelitian*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Barnet, jonathan, (1982). *An Introduction to Urban desing*, Harper and Row Publishes, New York.
- Budiharjo, Eko, Sidharta, “*Konservasi Lingkungan & Bangunan Kuno Bersejarah di Surakarta*”, UGM PRESS, Yogyakarta, 1989.
- Catanese (1986), Pontoh (1992), Rypkema Tiesdel: 1992, *Kriteria yang menggambarkan dasar-dasar pertimbangan atau tolok ukur mengapa suatu obyek perlu dilestarikan*.
- Conzen MRG (1975) *Geography and Townscape Conservation*, dalam Geissner Geographische Schiften 1975, Glessen: Lenz-Verlag.
- Chulsum, Umi dan Novia Windy. 2006. “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*” Jakarta: Kashiko.
- Carr, Stephen, dkk. 1992. *Public Space*, Combridge University Press. USA.
- Danisworo, Muhammad / Widjaja Martokusumo, 2000. *Revitalisasi Kawasan Kota Sebuah Catatan dalam Pengembangan dan Pemanfaatan Kawasan Kota*, www.urdi.org (urban and reginal development institute, 2000).

Echols, John M, Kamus Inggris Indonesia, (Jakarta: PT Gramedia, 2000), cet. XXIV.

Feilden, B.M. (1994). *Conservation of Historic Building*, Great Britain: Butterworth Architecture.

Hall, P. and Pfeiffer, U. (2001) *URBAN 21. Der Expertenbericht zur Zukunft der Städte*. Stuttgart, München.

Hafizhah T, Mira, (2018). *Kajian zonasi Kawasan Cagar Budaya di Kecamatan Siak Kabupaten Siak*. Jurnal Plano Madani Volume 7 Nomor 1 April 2018, 46-58.

Maulana Rendy, (2018). *Kajian Pelestarian Kawasan Bangunan Bersejarah di Kota Pekanbaru*. Pekanbaru: Universitas Islam Riau.

Isfa Sastrawati. 2003 *Prinsip Perancangan Kawasan Tepian Air*. Procedia Engineering 20 (2011) 41-53.

Kimpraswil, 2002. *Pedoman Umum Program Penataan dan Revitalisasi Kawasan*, Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Direktorat Jenderal Tata Perkotaan dan Tata Perdesaan, Jakarta.

Martana, Salmon, 2002, *Preservasi Benda-Benda Bersejarah di Indonesia*, dalam *Warta Pariwisata* Volume 5 Nomor 3, www.p2par.itb.ac.id, 2002

Marzuki, 2005, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: Ekonisia.

Piagam Burra, 1999, *Tentang Upaya Revitalisasi sebagai upaya pelestarian*. www.kimpraswil.go.id.

Runa, I Wayan, (2016). *Konservasi Bangunan Bersejarah Studi Kasus Bangunan Peribadatan di Pulau Bali*.

Suwantoro, Gamal. 2004. *Dasar-dasar Pariwisata*. Yogyakarta: Penebit Andi.

Shirvani, H. (1985). *The Urban Design Process*. New York: Van Nostrand Reinhold Company.

Sangadji dan Sopiah (2013), *Definisi perilaku konsumen, buku pendekatan praktis*, Penerbit (Andi Yogyakarta).

Sidharta dan Eko Budihardjo. 1989. *Konservasi Lingkungan dan Bangunan Kuno Bersejarah Di Surakarta*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Serageldin, Ismail/Ephim Shluger/Joan Martin-Brown (eds.), 2000. *Historic Cities and Scared Sites, Cultural Roots for Urban Futures*, The World Bank, Washington

Sugyono, (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung:

Widiastuti, E.H. (2014). *Revitalisasi Benda Cagar Budaya Di Kota Semarang*. Majalah Ilmiah Pawiyatan, Vol.XXI, No.2.

Warren, Nicolas De. 2009. *Husserl And The Promise Of Time: Subjectivity In Transcendental Phenomenology*. Cambridge, UK: Cambridge University Press.

Kebijakan

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 18 tahun 2010 tentang Pedoman Revitalisasi Bangunan Bersejarah.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2010 tentang Ketentuan pengelolaan dan pengembangan di situss-situs Cagar Budaya.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Kuno Bersejarah.